

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ALOKASI  
BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SE-JAWA  
PERIODE TAHUN 2013-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

**ENDANG DWI WAHYUNI**  
**NIM. E20163030**

Dosen Pembimbing:

**AGUNG PARMONO, S.E., M.Si**  
**NIP. 19751216 200912 1 002**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2020**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ALOKASI  
BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SE-JAWA  
PERIODE TAHUN 2013-2017**

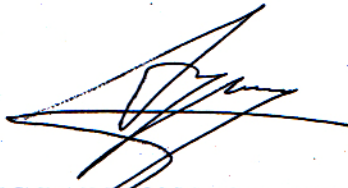
**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**ENDANG DWI WAHYUNI**  
**NiM. E20163030**

Disetujui Pembimbing:



**AGUNG PARNONO, S.E., M.Si**  
**NIP. 19751216 200912 1 002**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ALOKASI  
BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SE-JAWA  
PERIODE TAHUN 2013-2017**

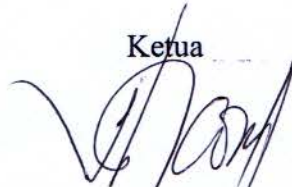
**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua



**(Daru Anondo, S.E., M.Si)**  
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris



**(Nur Ika Mauliyah, S.E., M. Ak)**  
NIP. 19880301201801 2 001

Anggota:

1. .Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si (
2. Agung Parmono, S.E., M.Si (



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl :90)\*

IAIN JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 268.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Sulastri dan Imam Royani), yang merupakan inspirasi utama dan beliau tiada hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Kakak saya tersayang ( Nur Indah Fatimah Ekawati sekeluarga), serta Adik-adik yang saya banggakan (M. Sholeh Ramadhani dan M. Irfan Fauzi), terima kasih untuk semangat dan doa dari kalian semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
3. Sahabat-sahabat terkasih QSPE yang telah setia menemani suka maupun duka, memberi motivasi dan nasihat, serta mewarnai hidupku
4. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi Syariah 2016 yang berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
5. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cinta dan bukan menjadi lambang perpisahan.
6. Dan terima kasih kepada semua orang-orang yang mendukung serta memotivasi dalam mengerjakan karya tulis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta Hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017”** dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Aamiin. Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Seiring dengan itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan.
4. Bapak Agung Parmono, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi.
5. Ibu Nurul Setyaningrum., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan bagi kelancaran perkuliahan selama ini.
6. Ibu Aminatuz Zahriyah, S.E., M.Si yang telah membimbing dalam pengolahan data penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 5 Februari 2020  
Penulis

Endang Dwi Wahyuni

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Endang Dwi Wahyuni, Agung Parmono, S.E., M.Si 2020 : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD terdapat pos pendapatan (PAD, dana perimbangan, serta pembiayaan lain yang sah) serta pos pembelanjaan (untuk kebutuhan fasilitas publik dan penyejahteraan masyarakat)

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (2) apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (3) apakah SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (4) apakah PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal (2) untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap belanja modal (3) untuk mengetahui pengaruh SiLPA terhadap belanja modal (4) untuk mengetahui pengaruh pembiayaan PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan terhadap belanja modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif. Populasi penelitian yaitu seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia berjumlah 34 provinsi. Sedangkan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Terdapat 30 data sampel dari pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017. Alat analisis data berupa, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dengan bantuan program SPSS Statistics Versi 22.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD dan SiLPA berpengaruh signifikan atau positif terhadap belanja modal. Variabel PAD nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,707 > t_{tabel} 2,056$ . Variabel SiLPA nilai signifikansi  $0,022 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,433 > t_{tabel} 2,056$ . Berbeda dengan variabel DAU yang berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap belanja modal karena memiliki nilai signifikansi  $0,057 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,995 < t_{tabel} 2,056$ . Sedangkan secara simultan variabel PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} 9,331 > F_{tabel} 2,98$ .

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Belanja Modal.



## ABSTRACT

**Endang Dwi Wahyuni, Agung Parmono, S.E, M.Si 2020:** *The Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditures of Provincial Governments in Java for the Period of 2013-2017*

Law Number 32 of 2004 concerning regional autonomy and fiscal decentralization states that regions have authority to determine the allocation of resources to capital expenditure by adhering to the principles of compliance, needs, and capability of the region. The public sector budget contains planned activities that are presented in the form of revenue and expenditure plans in monetary units. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), is the annual financial plan of the Regional Government that is discussed and agreed upon jointly by the Regional Government and the DPRD, and determined by regional regulations. In the APBD there are income posts (PAD, balance funds, and other legitimate financing) and expenditure items (for the needs of public facilities and community welfare).

The formulation of the problems examined in this thesis are (1) whether PAD has a significant effect on provincial capital expenditure Java? (2) does DAU have a significant effect on capital expenditure for the provincial government in Java? (3) does SiLPA have a significant effect on capital expenditure for the provincial government in Java? (4) Do the PAD, DAU, and SiLPA simultaneously have a significant effect on the provincial capital expenditure of the province?

The purpose of this study is (1) to determine the effect of PAD on capital expenditure (2) to determine the effect of DAU on capital expenditure (3) to determine the effect of SiLPA on capital expenditure (4) to determine the effect of PAD, DAU, and SiLPA financing simultaneously towards capital expenditure.

This study uses a quantitative approach to the type of descriptive statistical research. The population of the study is that all provincial governments in Indonesia total 34 provinces. Whereas the sampling technique used was *purposive sampling*, namely the sampling technique was carried out based on the characteristics assigned to the target population elements adjusted to the objectives or research problems. There are 30 sample data from provincial governments in Java for the period 2013-2017. Data analysis tools are in the form of, classic assumption test and multiple linear regression analysis, hypothesis testing and coefficient of determination test (R<sup>2</sup>) with the help of the SPSS Statistics Version 22 program. The

results of this study can be concluded that partially PAD and SiLPA variables have a significant or positive effect on capital expenditure. PAD variable significance value 0.012 < 0.05 and  $t_{\text{value}_{\text{count}}} \text{ of } 2.707 > t_{\text{table}} 2.056$ . SiLPA variable significance value 0.022 < 0.05 and  $t_{\text{value}_{\text{count}}} \text{ of } 2.433 > t_{\text{table}} 2.056$ . In contrast to the DAU variable which influences but is not significant to capital expenditure because it has a significance value of 0.057 > 0.05 and at  $\text{value}_{\text{calculated}}$  of -1.995 <  $t_{\text{table}} 2.056$ . While simultaneously the PAD, DAU, and SiLPA variables have a positive and significant effect on the allocation of capital expenditure with a significance value of 0,000 < 0.05 and aF value of  $\text{of}_{\text{calculated}} 9.333 > F_{\text{table}} 2.98$ .

**Keywords:** Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Remaining Budget Calculation (SiLPA), Capital Expenditures.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Asumsi Penelitian .....	13
H. Hipotesis .....	14
I. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	17
2. Lokasi Penelitian .....	17
3. Populasi dan Sampel .....	17
4. Variabel Penelitian .....	18
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>31</b>

A.	Penelitian Terdahulu .....	31
B.	Kajian Teori .....	41
1.	Teori Umum.....	41
2.	Belanja Modal .....	49
3.	Pendapatan Asli Daerah .....	51
4.	Dana Alokasi Umum.....	56
5.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	58
<b>BAB III</b>	<b>PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>60</b>
A.	Gambaran Objek Penelitian .....	60
B.	Penyajian Data .....	71
C.	Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	74
D.	Pembahasan .....	<b>87</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A.	Kesimpulan .....	92
B.	Saran .....	93
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1.	Pernyataan Keaslian Tulisan	
2.	Matrik Penelitian	
3.	Jurnal Penelitian	
4.	Surat Permohonan Izin Penelitian	
5.	Surat selesai Penelitian	
6.	Data Laporan realisasi APBD	
7.	Hasil Output SPSS	
8.	Tabel t	
9.	Tabel r	
10.	Tabel f	
11.	Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Tabel Uji Durbin Watson .....	24
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 2.2	Formulasi Perhitungan DAU.....	57
Tabel 3.1	Data PAD,DAU, dan SiLPA Pemprov Se-Jawa .....	71
Tabel 3.2	Data Belanja Modal Pemprov Se-Jawa.....	73
Tabel 3.3	Uji Multikolinieritas .....	77
Tabel 3.4	Uji Durbin Watson .....	79
Tabel 3.5	Uji Autokorelasi .....	79
Tabel 3.6	Regresi Linier Berganda .....	80
Tabel 3.7	Uji t .....	83
Tabel 3.8	Uji F .....	85
Tabel 3.9	Uji Koefisien Determinasi .....	86



## DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal
Gbr 1.1	Jumlah Penduduk Pulau Jawa .....	6
Gbr 1.2	Kerangka Konsep .....	13
Gbr 3.1	Uji Normalitas (Histogram) .....	75
Gbr 3.2	Uji Normalitas (grafik) .....	76
Gbr 3.3	Uji Heteroskedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ) .....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan otonomi daerah dimulai sejak 1 Januari 2001. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini karena masalah otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak keterkaitan dan melibatkan banyak variabel. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana telah terjadi pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan yang dikaitkan dengan sumber keuangan atau pembiayaan. Sesuai dengan UU No 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau *Intergovernment Fiscal Relation*.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan ketatanegaraan serta tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai gantinya UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 lahir, yang mana merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan,

---

<sup>1</sup> Ahad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 9.

kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja daerah dipisahkan menjadi dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan beban untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, berbeda halnya dengan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya sehingga diakui neraca.<sup>2</sup> Manajemen belanja daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah agar optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai. Belanja Daerah yang termasuk belanja modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Sementara peningkatan Belanja Modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta:Erlangga, 2010), 87.

infrastruktur dan sarana prasarana publik.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari faktor-faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang menjadi sumber finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.<sup>4</sup> Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat

---

<sup>3</sup> Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali", (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7 Nomor 3) 2018

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta



yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.<sup>5</sup>

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran negara yang menganggur

---

<sup>5</sup> I Made Pradana Adiputra dkk, “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Moda Sebagai Variabel Intervening, (Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha)

bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

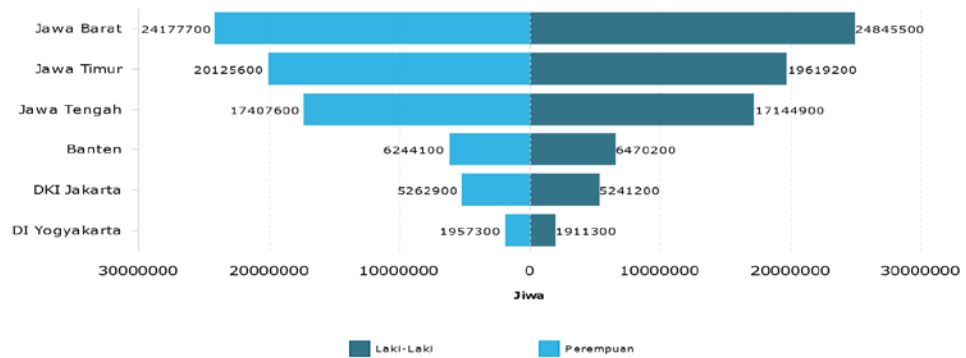
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2015-2045, penduduk di Pulau Jawa pada Tahun 2019 mencapai 150,4 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan separuh penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 Juta jiwa.<sup>6</sup> Adapun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, yakni masing-masing 75,23 juta jiwa dan 75,17 juta jiwa. Adapun provinsi di Jawa yang memiliki penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, yakni mencapai 49 juta jiwa. Kemudian diikuti Jawa Timur sebanyak 39,74 juta jiwa, lalu Jawa Tengah 34,55 juta jiwa. Lalu, Banten dengan jumlah penduduk 12,71 juta jiwa, DKI Jakarta 10,5 juta jiwa dan Daerah Istimewa Yogyakarta 3, 87 juta jiwa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019>  
diakses pada Jumat 4 Oktober 2019

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.1  
Jumlah Penduduk Pulau Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Daerah yang memiliki penduduk yang relatif besar akan memerlukan akses-akses publik dan pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang relatif besar dibanding dengan daerah yang penduduknya kecil. Selain itu, dari sektor penerimaan yakni PAD, serta pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat juga tentunya berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan pembelanjaan untuk pengadaan fasilitas publik berasal dari anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa lebih Perhitungan Pembiayaan (SiLPA) terhadap Belanja Modal dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013 - 2017”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Provinsi se-Jawa Periode 2013-2017?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Provinsi se-Jawa Periode 2013-2017?
3. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017
4. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
- b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Variabel penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>8</sup> Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu,

- a. Variabel Independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau  $X$  yaitu desentralisasi fiskal, yang mana dalam perhitungannya terdapat tiga variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai  $X1$ , Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai  $X2$ , serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai  $X3$ .
- b. Variabel Dependen. Sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu alokasi belanja modal yang dilambangkan dengan  $Y$ .

## 2. Indikator Variabel

- a. Indikator Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, serta PAD yang sah.
- b. Indikator Dana Alokasi Umum terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- c. Indikator Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
- d. Indikator Belanja Modal; Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 39.

<sup>9</sup> Ibid., 39.

<sup>10</sup> Ibid., 39.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.<sup>11</sup> Definisi operasional merupakan variabel yang diungkap dalam definisi konsep secara operasional, praktik, maupun secara nyata dalam lingkup obyek penelitian. Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>12</sup>

### 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana

<sup>11</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 38.

<sup>12</sup> Ahad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 52.

alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun, daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.<sup>13</sup> Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>14</sup>

### 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi

<sup>13</sup> Ibid., 52

<sup>14</sup> Kusnandar Dodik Siswantoro, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", (Jurnal Penelitian UI), 2012



Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.<sup>15</sup>

#### 4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Sedangkan menurut Peraturan dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

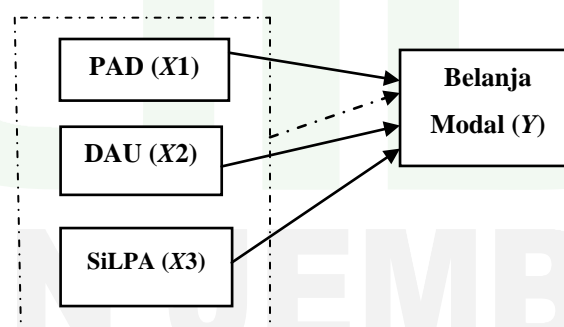
---

<sup>15</sup> Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur.*

## G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau biasa disebut juga sebagai anggapan dasar yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi penelitian atau anggapan dasar ini harus dirumuskan dengan jelas sebelum melangkah pada pengumpulan data. Asumsi penelitian atau anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dalam merumuskan hipotesis.<sup>16</sup> Asumsi pada penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat dilihat dari kerangka konseptual (*conceptual Framework*) berikut:

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : data diolah

**Keterangan:**

- ▶ :Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara Parsial
- - - - -▶ : Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara Simultan

<sup>16</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa alokasi anggaran belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017 berdasarkan pada faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

#### H. Hipotesis

Hipotesis berasal dari Bahasa Inggris, *hypo* (dibawah) dan *thesa* (kebenaran). Jadi, secara etimonologi hipotesis berarti kebenaran yang ada dibawah, kebenaran sementara, atau kebenaran yang masih perlu diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2017”, maka hipotesisnya sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal

Dalam penyusunan APBD, pos alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga pemerintah daerah ingin menambah pos belanja modal dengan tujuan pelayanan publik dan kesjahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD sebanyak - banyaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa

(2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

*H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.*

## 2. Pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal

Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi belanja modal salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>18</sup> Oleh karena itu hipotesis DAU terhadap belanja modal:

*H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal*

## 3. Pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan belanja modal

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja

<sup>17</sup> Kesit Bambang Prakoso, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)" (Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Volume 8 No 2, 101-118).

<sup>18</sup> Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* (Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.2007)

pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hasil Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>19</sup> Sebagai Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal*

4. Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap alokasi belanja modal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Adib Irsyadi (2014:10) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah DAU, PAD, DAK, dan SiLPA.<sup>21</sup> Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>20</sup> Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. (Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.2007)

<sup>21</sup> Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

*H<sub>4</sub>: PAD, DAU, SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap alokasi Belanja Modal*

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis penelitiannya dalam hal ini menggunakan jenis penelitian analisis asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan dalam penelitian ini menganalisis hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi).<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2013-2017. Data penelitian diunduh dari situs resmi Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup>

Populasi juga bisa diartikan sebagai kumpulan dari individu dengan kualitas

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 36-37.

<sup>23</sup> Ibid, 80.

serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu ada 34 provinsi.

#### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>24</sup> Sampel juga bisa dikatakan sebagai bagian dari populasi.<sup>25</sup> Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *puspositive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Karakteristik yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu pulau Jawa yang mana padat penduduknya, dengan periode waktu lima tahun terakhir dalam laporan realisasi anggaran APBD.

Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD dari provinsi di pulau Jawa pada tahun 2013-2017. Provinsi di pulau Jawa adalah provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

#### 4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

---

<sup>24</sup> Ibid, 81.

<sup>25</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 240.

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Variabel juga bisa dikatakan sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.<sup>27</sup> Adapun macam-macam variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Variabel independen atau variabel bebas

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.<sup>28</sup> Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah variabel Pendapat Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran.

b) Variabel dependen atau variabel terikat

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuan. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>29</sup> Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah variabel belanja modal.

## 5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>26</sup> Ibid., 38.

<sup>27</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 107.

<sup>28</sup> Ibid., 39.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 39.



yaitu data laporan realisasi APBD dari laman *website* Badan Pusat Statistik (BPS) atau di web [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

#### b. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah pustaka, serta menghimpun dan mengkaji informasi-informasi yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini jenis analisis statistik yang digunakan yaitu analisis statistik parametris. Pada statistik parametris akan terdapat asumsi-asumsi yang mendasari digunakannya rumus tersebut yang secara umum disebut dengan asumsi klasik dalam model regresi.<sup>30</sup> Dalam hal ini akan melihat pengaruh desentralisasi fiskal (PAD, DAU, SiLPA) terhadap alokasi Belanja modal. Untuk menganalisis dan menguji data yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Statistic Program for Social Science* (SPSS 22.0).

Dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik maka harus terbebas dari penyimpangan data diantaranya adalah terhindar dari adanya normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.<sup>31</sup>

##### 1) Uji Normalitas

<sup>30</sup> Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISREL*, 11.

<sup>31</sup> Sulyanto, *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 81.

Dalam penelitian ini sebelum data diolah berdasarkan model penelitian yang digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas pada data-data yang akan diolah. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*Bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar hingga tak terhingga. Uji normalitas tidak dilakukan pervariabel (*univariate*) tetapi hanya terdapat nilai residua terstandarisasinya *mutivariate*.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal dan nilai residual terstandarisasi digambarkan dengan sumbu horizontal. Jika *Histogram Standardized Regression Residual* membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik adalah menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan

---

<sup>32</sup> Ibid., 69

atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *Plotting*. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.<sup>33</sup>

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini uji multikolinieritas yang digunakan yaitu multikolinieritas dengan TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*),<sup>35</sup> untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai VIF < 10.00 dan nilai Tolerance > 0.1, maka tidak terjadi multikolonieritas.
- b) Jika nilai VIF > 10.00 dan nilai Tolerance < 0.1, maka terjadi multikolonieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan

<sup>33</sup> Ibid., 69

<sup>34</sup> Suliyanto, *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 81

<sup>35</sup> Ibid, 90

homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross-section*.

Penelitian ini menggunakan metode grafik *scatterplot* untuk menguji adanya heteroskedastisitas. Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti titik- titik yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titiktitik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi secara lebih lanjut mengenai variabel bebas mana yang menjadi penyebab terjadinya masalah heterokedastisitas, kita dapat mengamati *scatterplot* dimana variabel

bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.<sup>36</sup>

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross-section*). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Waston.

---

<sup>36</sup> Ibid.,95

**Tabel 1.1**  
**Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson**

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < dL$	Ada auto korelasi positif
$dL \leq d \leq du$	Ragu – ragu
$du \leq d \leq 4 - du$	Tidak ada korelasi
$4 - du \leq d \leq 4 - dL$	Ragu – ragu
$4 - dL \leq d \leq 4$	Ada korelasi negative

Sumber: Suliyanto:2011

#### b. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda adalah analisis pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ).<sup>37</sup> Rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= alokasi belanja modal
$\alpha$	= Konstanta
$X_1$	= Pendapatan Asli Daerah
$X_2$	= Dana Alokasi Umum
$X_3$	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
e	= Standar error

#### c. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka peneliti melakukan beberapa uji, yaitu analisis regresi berganda, uji  $t$  secara parsial, uji F secara Simultan, serta Koefisien Determinasi,.

##### 1. Analisis Uji $t$ (Parsial)

<sup>37</sup> Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 53.

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Apabila tingkat signifikansi setiap variabel berada dibawah 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>38</sup> Adapun langkah-langkah uji  $t$  adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

a) Menentukan hipotesis

1.  $H_0 : b_1 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap alokasi belanja modal

$H_1 : b_1 = 0$  artinya dalam notasi  $H_1$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap alokasi belanja modal

2.  $H_0 : b_2 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap alokasi belanja modal

$H_2 : b_2 = 0$  artinya dalam notasi  $H_2$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan DAU terhadap alokasi belanja modal

3.  $H_0 : b_3 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara SiLPA terhadap alokasi belanja modal

$H_3 : b_3 = 0$  artinya dalam notasi  $H_3$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara SiLPA terhadap alokasi belanja modal

b) Nilai Kritis

Nilai Kritis didapat dari tabel distribusi  $t$  dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

c) Menentukan  $t_{hitung}$  dengan rumus:

<sup>38</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 46.

<sup>39</sup> Mundir, *Statistik Pendidikan* (Jember: STAIN-Press Jember, 2014), 119

$$t_{\text{hitung}} = \frac{x - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$x$  : rata-rata nilai dari pengumpulan data

$\mu_0$  : nilai yang dihipotesiskan

$s$  : standar deviasi

$n$  : jumlah sampel penelitian

d) Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$ .

Untuk mencari nilai  $t_{\text{tabel}}$  adalah  $df = n-k$ .

e) Membuat Kesimpulan

1. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen ( $X$ ) atau desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) yaitu alokasi belanja modal.

2. Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel desentralisasi fiskal berpengaruh tidak secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) atau alokasi belanja modal.<sup>40</sup>

2) Analisis Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam

---

<sup>40</sup> Ibid,

model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak.

Langkah-langkah dari Uji F yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Menentukan Hipotesis

$H_4 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, DAU, dan SiLPA terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ , berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, DAU, dan SiLPA terhadap belanja modal.

b. Nilai Kritis

Nilai kritis didapat dari tabel F dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

c. Nilai  $F_{hitung}$

$$F_{hitung} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{K(1 - R^2)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien Determinasi

n = jumlah data atau sampel

k = jumlah variabel independen

d. Keputusan

<sup>41</sup> Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2014),86



Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Untuk mencari nilai  $F_{tabel}$  adalah  $df = n-k$ .

e. Membuat kesimpulan:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel desentralisasi fiskal secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel belanja modal

2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, menyatakan bahwa masing-masing variabel desentralisasi fiskal secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal

3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.<sup>42</sup> Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah

<sup>42</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 95.

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi :

$$0 < R^2 < 1$$

Dasar Pengambilan Keputusan:

- a. Nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas.
- b. Nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis akan menguraikan secara singkat untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan penguat dalam penelitian ini, dan kajian teori yang membahas teori-teori tentang desentralisasi fiskal, APBD, dan alokasi anggaran belanja modal.

### **BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu berupa gambaran umum desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran belanja modal. Analisis data hasil uji F (Simultan) dan hasil uji  $t$  secara parsial.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana keaslian karya tulis, persamaan dan perbedaan yang hendak dilakukan.<sup>43</sup> Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian, diantaranya:

- a. Santika Adhi Karyadi, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 yang meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*”.<sup>44</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian menggunakan penelitian kausal Komparatif, dan analisis data dengan metode analisis dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), dan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), berpengaruh signifikan dan simultan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

<sup>44</sup> Santika Adi Karyadi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

oleh peneliti adalah variabel penelitian yang digunakan adalah belanja modal, PAD, serta DAU. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada populasi penelitian. Penelitian ini yaitu kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014, sedangkan sampel pada penelitian yang dilakukan yaitu pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

- b. Yuliana, Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017 yang meneliti tentang “*Pengaruh PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Tenaga Kerja dan Angka Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 – 2015*”.<sup>45</sup> Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa data yang sudah terpublikasi oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan data tahunan dari tahun 2006 – 2015. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial semua variabel bebas tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pesara simultan PDRB perkapita, PAD, jumlah tenaga kerja dan angka kematian berpengaruh bersama terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Banyuwangi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebasnya, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, maupun metode penelitiannya

---

<sup>45</sup> Yuliana, *Pengaruh PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Tenaga Kerja dan Angka Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 – 2015*, (Skripsi IAIN Jember, 2017)

- c. Putri Retno Aryani, Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017 yang meneliti tentang “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan*”.<sup>46</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten atau kota di provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari laporan realisasi APBD dari tahun 2012 – 2014 yang diperoleh melalui [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat analisis uji regresi berganda. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap BM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat variabelnya, sementara perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian.
- d. Ranti Suryana, Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2017 yang meneliti tentang “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau*”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Daerah dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau. Data yang

---

<sup>46</sup> Putri Retno Aryani, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.2017)

digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja Modal tidak berpengaruh Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal berpengaruh terhadap Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran.<sup>47</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu variabelnya sama-sama membahas tentang PAD, DAU, SiLPA, dan Belanja Modal. Selain itu untuk metode pengumpulan data dan analisisnya juga sama. Sedangkan, perbedaan dari keduanya yaitu populasi dan sampel keduanya.

- e. I Made Aditya Pramatha dan A.A. N. B. Dwirandra, Universitas Udayana Tahun 2018 yang meneliti tentang “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*”,<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Populasi yang digunakan yaitu seluruh data dalam laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah serta laporan indeks pembangunan manusia seluruh kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2011-2016. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampel jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif signifikan pada indeks pembangunan

<sup>47</sup> Ranti Suryana, “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau*” (Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017)

<sup>48</sup> I Made Aditya Paramartha, A.A. N. B Dwirandra, “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*”, (E-Journal Universitas Udayana Bali) 2018

manusia. Belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada variabel yaitu belanja modal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini belanja modal terdapat pada variabel dependen, sedangkan pada penelitian yang dilakukan belanja modal merupakan variabel independen, selain itu terletak pada populasi.

- f. Desak Made Mya Yudia Sari dan Dewa Gede Wirama, Universitas Udayana Bali Tahun 2018 yang meneliti tentang, “*Pengaruh PAD, DAU, dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi*”.<sup>49</sup>

Sampel penelitian ini adalah pemerintah kota/ kabupaten se-Bali periode Tahun 2012-2016 yang menghasilkan 45 amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis*.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif pada alokasi belanja modal sedangkan dau tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Pendapatan per kapita tidak memoderasi pad, dau, dan dak pada alokasi belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel PAD, DAU, dan belanja modal. Selain itu teknik analisisnya yang regresi linier berganda. Sedangkan, perbedaan antara keduanya terletak pada sampel yang digunakan serta pada penelitian ini menggunakan pendapatan per kapita sebagai pemoderasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan tidak.

- g. Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, Universitas Udayana Tahun 2018 yang meneliti tentang “*Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja*

<sup>49</sup> Desak Made M. dan Dewa Gede W, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Dengan Pendapatann Perkapita Sebagai Pemoderasi*, (E-Jurnal Univeresitas Udayana Bali). 2018





dengan tujuan dan masalah penelitian).Jumlah sampel sebanyak 24 kabupaten/kota dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linear berganda diketahui variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, tingkat kemandirian keuangan daerah, luas wilayah dan kepadatan penduduk secara simultan signifikan mempengaruhi variabel belanja modal pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh yang terjadi antara sisa lebih pembiayaan anggaran,luas wilayah, dan kepadatan penduduk dengan variabel belanja modal secara parsial signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Namun pengaruh yang terjadi antara variabel tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal secara parsial tidak signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada metode pengumpulan data dan analisis datanya, serta variabel SiLPA. Dan untuk perbedaannya yaitu terletak pada sampel dan variabel lain diluar SiLPA.

- i. Ni Ketut Ayu dan Luh Gede Sri Artini, Universitas Udayana Bali Tahun 2019 yang meneliti tentang “*Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali*”.Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni diperoleh melalui metode observasi non perilaku sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner (daftar pertanyaan). Teknik analisis data memakai analisis regresi berganda. Hasil penelitian didapatkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja

keuangan daerah kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan kabupaten badung menurun. Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah kabupaten Badung menurun.<sup>52</sup> Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu variabelnya sama-sama membahas tentang alokasi belanja modal dan PAD. Serta metode pengumpulan data memakai sekunder, serta teknik analisis data memakai analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan membahas pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap belanja modal sedangkan penelitian ini membahas tentang PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan.

- j. Safiul Huda dan Ati Sumiati, Universitas Negeri Jakarta pada Tahun 2019 yang membahas tentang “*Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah*”. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan realiasi APBD dari Tahun 2014-2016 yang diperoleh dari DJPK kementerian keuangan RI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan *t*-Statistik dan *f*-Statistik serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja

---

<sup>52</sup> Ni Ketut Ayu dan Luh Gede Sri Artini, tentang “*Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali*” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, No. 3, 2019: 1315 - 1345

modal.<sup>53</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah variabelnya yang sama-sama membahas tentang PAD, DAU, dan belanja modal. Selain itu teknik pengumpulan data dan analisis datanya sama. sedangkan perbedaannya terletak pada populasi dan sampel yang digunakan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Santika Adhi Karyadi, 2017	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014</i>	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU, Belanja Modal.	Perbedaannya terletak pada desain penelitian ini menggunakan penelitian kausal Komparatif dan sampe penelitian juga berbeda
2	Yuliana, 2017.	<i>“Pengaruh PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Tenaga Kerja dan Angka Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 – 2015”.</i>	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Variabel independen PAD, dan metode penelitiannya	Perbedaannya pada Variabel lain diluar PAD, pada Sampel dan populasi yang diambil.
3.	Putri Retno Aryani, 2017.	<i>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatra Selatan,</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Metode penelitian dan analisis datanya, serta pada variabel PAD, DAU, dan belanja modal	Perbedaannya pada variabel independen pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan, serta sampelnya

<sup>53</sup> Safiul Huda dan Ati Sumiati, “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 14 (1) 201, 85-100

				yang berbeda pada kedua penelitian.
4.	Ranti Suryana, 2017.	<i>“Faktor – Fakkor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau”.</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Variabel independen PAD, DAU, dan variabel dependen Belanja Modal, serta metode pengumpulan data dan metode analisis datanya	Perbedaan pada kedua penelitian yaitu terletak pada Populasi dan sampelnya
5.	I Made Aditya Pramatha dan A.A. N. B. Dwirandra, 2018.	<i>“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”</i>	Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu Variabel desentralisasi fiskal dan belanja modal, serta teknik analisis data	Perbedaan kedua penelitian terletak pada Teknik pengumpulan data, populasi serta sampel peneitian.
6.	Desak Made Mya Yudia Sari dan Dewa Gede Wirama, 2018.	<i>Pengaruh PAD, DAU, dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali Indonesia</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Variabel PAD, DAU, Belanja Modal, serta pada metode penelitiannya	Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada Variabel pemoderasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini
7.	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, 2018.	<i>“Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali</i>	Persamaan penelitian pada Variabel PAD, DAU, DAK, Belanja Modal. serta metode penelitiannya.	Perbedaannya pada Sampel yang diambil.
8.	M. Syarif Hafizh Simatupang, 2018.	<i>“Pengaruh SiLPA, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pengalokasian</i>	Persamaan kedua peneitian pada Variabel independen SiLPA dan metode penelitiannya,	Perbedaan keduanya pada Variabel diluar SiLPA dan sampel yang diambil.

		<i>Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara</i>		
9.	Ni Ketut Ayu dan Luh Gede Sri Artini, 2019	<i>“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali”</i>	Persamaan kedua penelitian pada metode pengumpulan data dan metode analisisnya, selain itu variabel yang membahas tentang PAD dan Belanja modal.	Perbedaannya pada Variabel lain diluar belanja modal dan PAD, serta sampel yang diambil.
10.	Safiul Huda dan Ati Sumiati, 2019	<i>“Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah”</i>	Persamaan kedua penelitian pada Variabel PAD, DAU, dan belanja modal, selain itu teknik pengumpulan data dan analisis datanya	Perbedaannya terletak pada populasi dan sampelnya.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>54</sup>

### 1. Teori Umum (*Grand Theory*)

#### a. Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin

<sup>54</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda pula. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami dalam suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.<sup>55</sup>

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah dalam kerangka NKRI, merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>56</sup>

Implikasi otonomi daerah terhadap Akuntansi Sektor Publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut

---

<sup>55</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:ANDI,2009),2

<sup>56</sup> *Ibid.*, 24

untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.<sup>57</sup>

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan nonfinansial. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat

---

<sup>57</sup> Ibid., 143



diadaptasi dari laporan keuangan sektor swasta yang disesuaikan dengan karakteristik dan sifat sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan nonmoneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pada organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan itu perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya *true and fair presentation*.

#### b. Teori Keagenan

Teori ini sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agen*, hal itu dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Ibid., 160

<sup>59</sup> Ibid., 5.

Kaitan *agency theory* dengan penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (principal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah berupa membayar pajak, retribusi, dan sebagainya untuk dapat meningkatkan PAD. Pemerintah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

#### c. Desentralisasi Fiskal

Istilah desentralisasi sejak lama diterapkan di Indonesia. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintah daerah diatur mengenai dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam UU tersebut, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan

dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah.<sup>60</sup> Dalam UU yang baru yakni UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 dan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan desentralisasi ini dilakukan dalam rangka untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktivitas pembangunan diseluruh daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah bersangkutan serta aspirasi serta keinginan masyarakat setempat.<sup>61</sup>

Desentralisasi merupakan alat untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi desentralisasi terutama terdiri dari pembagian fungsi/tugas/kewenangan antar level pemerintah. Desentralisasi biasanya didahului reformasi dari sisi pengeluaran, kemudian diikuti oleh sisi penerimaan. konsep desentralisasi secara umum terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*), Desentralisasi Administrasi (*Administrative Decentralization*).<sup>62</sup>

Desentralisasi fiskal sudah dua puluh satu tahun diimplementasikan di *Indonesia* yakni sejak penerapan UU tentang Otonomi Daerah yang didalamnya mengatur tentang desentralisasi fiskal. Sejak saat itu terjadi proses pelimpahan berbagai wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/daerah otonom dalam bidang fiskal atau disebut juga desentralisasi fiskal. Seiring berlalunya

<sup>60</sup> Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi Kelima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 201.

<sup>61</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 272.

<sup>62</sup> D.S.Priyarsono, *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*, (Bogor: IPB Press, 2011), 145.

waktu, tidak bisa disangkal bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama dekade terakhir tersebut telah mampu membangun stabilitas politik dan demokrasi yang dinamis.

Desentralisasi fiskal sebagai komponen utama dalam desentralisasi, selain melakukan penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah, juga harus memastikan bahwa daerah mendapatkan sumber-sumber keuangan yang memadai untuk menjalankan wewenang dan fungsinya.<sup>63</sup> Desentralisasi fiskal dilakukan melalui pelimpahan tanggung jawab fiskal untuk belanja publik dan penciptaan atau pengumpulan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau lokal.<sup>64</sup> Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah memperbaiki ketidakadilan fiskal dan efisiensi fiskal yang timbul dari perbedaan kemampuan fiskal daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan regional maupun nasional.<sup>65</sup>

Umumnya desentralisasi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengurangi peran dan tanggung jawab antara pemerintah pada semua tingkat.
- 2) Memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintah
- 3) Memperkuat sistem penerimaan daerah atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal
- 4) Memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan

<sup>63</sup> Ika, Syahrir, dkk., *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestimbangan Pembangunan Cetakan Kedua*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 179.

<sup>64</sup> Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, "Fiscal Decentralization and Economic Growth: Role of Democratic Institutions", *Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) Working Papers*, Vol. 89, 2013, hlm. 1

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- 5) Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dinilai dari sejauh mana fungsi-fungsi diatas telah terlaksana.<sup>66</sup>

Namun demikian, secara khusus desentralisasi fiskal mempunyai fungsi utama untuk memperbaiki efisiensi sektor publik dan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Efisiensi ekonomi ditingkatkan oleh desentralisasi karena provinsi dan pemerintah tingkat lokal mempunyai informasi lebih baik dan pengetahuan yang lengkap tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah tingkat lokal mempunyai hubungan yang erat dengan institusi dan dapat mengendalikan mereka dengan tepat.<sup>67</sup>

Di Indonesia, desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari dua dekade. Besaran dana yang dikucurkan dari pusat (APBN) ke daerah sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu banyak pihak berharap bahwa desentralisasi fiskal ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Ada banyak sudut pandang dari para ahli ekonomi dalam menentukan indikator sukses atau tidaknya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun begitu, ada sepuluh indikator suksesnya desentralisasi fiskal yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan pengeluaran atau belanja daerah, rasio antara belanja sosial dengan total belanja daerah, rasio antara belanja infrastruktur dengan total

---

<sup>66</sup> D.S.Priyarsono, *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*, (Bogor: IPB Press, 2011), 146.

<sup>67</sup> Muhammad Zahir Faridi, "Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan", *Pakistan Journal of Social Sciences*, Vol. 31, No.1, Juni 2011, 1-2.

belanja daerah, koefisien ketimpangan fiskal vertikal, kesenjangan (ketimpangan) pendapatan antar daerah, dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesinambungan fiskal, tujuan-tujuan spesifik sektoral dan kesejahteraan sosial.<sup>68</sup>

## 2. Belanja Modal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah melalui rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur melalui satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.<sup>69</sup>

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>70</sup> Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah beban modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah

---

<sup>68</sup> *Ibid*, 78-83.

<sup>69</sup> Baldrick Siregar, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta:, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2015),29.

<sup>70</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4, (Jakarta:Salemba Empat,2014), 107.

daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.<sup>71</sup>

Jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 yaitu:

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan

---

<sup>71</sup> Baldrick Siregar, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2015), 167.

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.<sup>72</sup>

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

---

<sup>72</sup> Ibid.,



yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>73</sup> Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah berasal empat jenis pendapatan,<sup>74</sup>

#### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Pajak pada setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan di atas air.
- e) Pajak air di bawah tanah.
- f) Pajak air permukaan.

<sup>73</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 132.

<sup>74</sup> Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeuaran Pemerintah*, (Jakarta: Saemba Empat, 2014), 101-103

### 1) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah juga berperan sebagai penyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi pada provinsi berbeda dengan kabupaten/kota, terkait dengan UU No. 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut<sup>75</sup>:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- d) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP
- d) Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
- e) Retribusi pelayanan pemakaman.
- f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
- g) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- h) Retribusi pelayanan pasar.
- i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

---

<sup>75</sup> Ibid.,

- k) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- l) Retribusi pengujian kapal perikanan.
- m) Retribusi pemakainya kekayaan daerah.
- n) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan.
- o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- p) Retribusi jasa usaha terminal
- q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
- r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
- t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
- u) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
- v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
- w) Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air
- x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
- z) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- bb) Retribusi izin gangguan.
- cc) Retribusi izin trayek.

## 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan

yang mencakup<sup>76</sup> :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil- hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.<sup>77</sup>

### 3) Penerimaan lain-lain

Pengertian Penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset milik pemerintah daerah

<sup>76</sup> Ibid.,

<sup>77</sup> Santika Adi Karyadi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

#### 4. Dana Alokasi Umum

##### 1) Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan atau kabupaten/kota. Namun, daerah kabupaten/kota di wilayah DKI tidak menerima DAU karena otonomi DKI diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan dengan besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Perubahan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafind Persada, 2008), 142

## 2) Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c) Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- d) Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

**Tabel 2.2**  
**Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum**

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
$26\% \times \text{APBN}$	$10\% \times 26\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 26\% \times \text{PDN}$
<p><b>DAU suatu Provinsi:</b>  <math display="block">\frac{\text{bobot seluruh provinsi yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}</math></p>		
<p><b>DAU suatu Kabupaten dan Kota:</b>  <math display="block">\frac{\text{bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan}}{\text{seluruh kabupaten dan kota di dan Kota Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kabupaten bobot}</math></p>		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitungan DAU adalah:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dimana,

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum ( kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Formulasi kebutuhan fiskal adalah: **Kebutuhan Fiskal = Total Belanja Daerah x (Jumlah penduduk (%) + Luas wilayah (%) + Indeks Kemahalan Konstruksi (%) + PDRB (%) + IPM (%)**. Sedangkan kapasitas fiskal dihitung berdasarkan jumlah dari Pendapatan Asli daerah (%) dan Dana Bagi Hasil (%).<sup>79</sup>

##### 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.<sup>80</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2011) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya

<sup>79</sup> Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 57

<sup>80</sup> (Balai Litbang NTT, 2008).....

menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.<sup>81</sup> Sejalan dengan Ardhini, penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.



---

<sup>81</sup> Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.



## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, berupa laporan realisasi APBD. Data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun obyek dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah provinsi yang ada di Indonesia periode tahun 2013-2017. Pengambilan sampel diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah letak pemerintah provinsi tersebut di Pulau Jawa. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asumsiklasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan yang terluas ke 13 di dunia. Dengan luas wilayah sekitar  $138.793,6 \text{ km}^2$ , Indonesia terdiri lebih dari 17 ribu pulau kecil dan 8 pulau besar. Dengan jumlah penduduk sekitar hampir 266,91 juta, pulau Jawa berpenduduk terbanyak di Indonesia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas ke-5, Pulau Jawa dihuni oleh 60% atau sekitar 150,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk rata-rata di Pulau Jawa adalah

1317 jiwa/km. Secara geografis, Pulau Jawa terletak di 7°30' - 10"Lintang Selatan dan 111°15 - 47"Bujur Timur. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah:

- a. Laut Jawa di utara
- b. Selat Sunda di barat
- c. Samudera Hindia di selatan
- d. Selat Bali dan Selat Madura di timur

Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi besar diantaranya: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

a. DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Berbeda dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa lima kota administratif dan satu kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat sendiri Jakarta memiliki luas 661,52 Km<sup>2</sup> (lautan 6.977,5 km<sup>2</sup>), dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa.<sup>82</sup> Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar kedua di Asia Tenggara.<sup>83</sup>

b. Jawa Barat

Jawa barat disingkat jabar adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang ibu

<sup>82</sup> ["Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017"](#). Diakses Pada Sabtu, 9 November 2019

<sup>83</sup> [Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik](#) diakses pada Sabtu, 9 November 2019

kotanya berada di Bandung. Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.<sup>84</sup> Jawa Barat telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tiga-perempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. Menurut data BPS 2018, perekonomian Jawa Barat tumbuh sekitar 5,64 %. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalan yang mengalami penurunan sebesar 4,11%.<sup>85</sup>

Jumlah penduduk provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 4. 670. 960.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 23.681.000 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 2. 302.860.000 jiwa. Jumlah penduduk yang reatif padat tersebut, dikarenakan pertumbuhan urbanisasi di Provinsi ini yang sangat cepat khususnya di sekitar JABODETABEK. Yang Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan (31%), industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel, dan restoran (22,5 %), dan sektor pelayanan (29%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 berhasil menembus nilai diatas 18 triliun rupiah, namun diperkirakan tahun 2018 akan menurun sehingga kembali dalam kisaran 17 triliun rupiah. Tahun 2016, PAD Jawa Barat mencapai Rp. 17.042,89 milyar. Naik 7,61 persen dari tahun

<sup>84</sup> <https://jabarprov.go.id/> diakses pada Jumat,8 November 2019

<sup>85</sup> <https://jabar.bps.go.id/> diakses pada Minggu 17 November 2019

sebelumnya. Kemudian tahun 2017 naik sebesar 6,09 persen hingga mencapai Rp. 18.081,12 milyar. Diperkirakan tahun 2018 PAD akan turun sebesar 2,74 persen hingga mencapai Rp. 17.584,97 milyar.

Tahun 2018 Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 55,02 persen PAD; 44,88 persen Dana Perimbangan; dan 0,097 persen lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Sumber ketiga pendapatan daerah berasal dari pendapatan daerah lain yang sah dengan persentase kecil menggenapkan pendapatan menjadi 100 persen terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pada pos Belanja Daerah pemerintahan Provinsi Jawa Barat baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sejalan dengan peningkatan pendapatan mengalami perkembangan, pada tahun 2014 sebesar Rp.20.797,99 milyar atau meningkat sebesar 13,05 persen dari tahun 2013. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp. 18.863,85 milyar atau tumbuh negative sebesar - 9,30 persen. Namun melonjak hingga 46,43 persen di tahun 2016 hingga mencapai Rp. 27.621,90 milyar. Tahun 2017 laju pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 18,41 persen, sehingga mencapai Rp.32.706, 74 Milyar. Namun, diperkirakan lajunya akan melonjak di tahun 3,84 di tahun 2018.<sup>86</sup>

### c. Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian

---

<sup>86</sup> <https://jabar.bps.go.id> diakses pada Minggu, 17 November 2019

tengah pulau Jawa dan ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Jawa Barat disebelah barat, Jawa Timur disebelah timur, Samudera India dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, dan laut Jawa disebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Pengertian *Jawa Tengah* secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.<sup>87</sup>

Secara administratif, Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintah kabupaten/kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8490 desa/kelurahan. Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari

---

<sup>87</sup> <https://jatengprov.go.id/> diakses pada Minggu, 17 November 2019

Kota Pekalongan ke Kajen)

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa). Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengarani dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).<sup>88</sup>

d. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. DIY memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan,

---

<sup>88</sup> <https://jatengprov.go.id/> diakses pada Sabtu, 16 November 2019

dan 438 desa/kelurahan.

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain meliputi sektor Investasi; Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM; Pertanian; Ketahanan Pangan; Kehutanan, dan Perkebunan; Perikanan, dan Kelautan; Energi, dan Sumber Daya Mineral; serta Pariwisata. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.<sup>89</sup>

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan yang signifikan, persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kabupaten Gunungkidul sebesar 118,60% persen, dari 6,72 persen pada Tahun 2013 menjadi 14,69 persen pada Tahun 2017. Persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan terkecil sebesar 33,49 %, yaitu dari 23,65 persen pada Tahun 2013 menjadi 31,57 persen pada Tahun 2017. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir dengan penurunan sebesar 6,30 %, yaitu dari 38,87 persen menjadi 36,42 persen.

Pada tahun 2017 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah

---

<sup>89</sup> <https://jogjaprovo.go.id/> diakses pada Sabtu 16 November 2019

D.I.Yogyakarta sebesar 1,314 triliun rupiah atau mencapai 25,85 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 26,71 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman dengan 38,10 persen, diikuti Kota Yogyakarta sebesar 39,71 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 50,79 persen.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta selama tahun 2017 menghabiskan dana 2,566 triliun rupiah (52,16 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung, kecuali Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 39,79 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 52,20 persen, dan diikuti Kabupaten Bantul sebesar 53,77 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 58,04 persen terhadap realisasi belanja daerahnya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 16 November 2019



e. Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia dan ibu kotanya di Surabaya. luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup>. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung). Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.<sup>91</sup>

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2017 adalah 42.030.633 jiwa, dengan kepadatan 884 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 3.046.218 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 3.195.487 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,76% per tahun.<sup>92</sup>

Kepala daerah Provinsi Jawa Timur adalah Gubernur, yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Jabatan Gubernur Jawa Timur

---

<sup>91</sup> <https://www.jatimprov.go.id/> diakses pada sabtu, 9 November 2019

<sup>92</sup> <https://jatim.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 9 November 2019

secara resmi saat ini diemban oleh Khofifah Indar Parawansa, yang terpilih dalam Pilkada Jatim 2018. Ia menggantikan Soekarwo, yang telah mengemban tugasnya selama 2 periode. Khofifah Indar Parawansa adalah Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 22 Dinas Daerah, 16 Badan, 3 Kantor, serta 5 Badan Rumah Sakit. Sementara dalam koordinasi wilayah, dibentuk 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil): Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, dan Bakorwil IV Pamekasan.

Empat kategori yang paling mendominasi perekonomian Jawa Timur adalah kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori konstruksi. Keempat kategori itu menyumbang 70,16 persen dari perekonomian Jawa Timur. Sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya berperan dominan dalam pembentukan ekonomi Jawa Timur (45,59 %). Hal ini terkait dengan kota Surabaya yang menjadi pusat perdagangan untuk Provinsi Jawa Timur dan daerah-daerah lain di sekitarnya.<sup>93</sup>

#### f. Banten

Banten adalah sebuah provinsi Indonesia yang beribukota di Serang. Banten merupakan wilayah paling barat di pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Jawa Barat, tetapi menjadi wilayah

---

<sup>93</sup> <https://jatim.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 9 November 2019

pemekaran sejak Tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Batas wilayah bagian utara yaitu Laut Jawa, Bagian TimurDKI Jakarta, bagian selatan samudera Indonesia,dan bagian barat selat sunda. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.<sup>94</sup>

Lebih dari 60% dari total pembentukan ekonomi Provinsi Banten disumbang oleh kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mbi dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, dan kategori konstruksi. Sedangkan katgori lainnya memberikan peranan yang beragam dengan besaran masing-masing kurang dari 10%. Kabupaten/kota yang paling berperan dalam

---

<sup>94</sup> <https://www.bantenprov.go.id/> diakses pada Minggu, 10 November 2019

pembentukan ekonomi Banten adalah Kota Tangerang (26,20 Tahun 2015), sementara dengan kontribusi 4,21 % kabupaten Pandeglang memberikan kontribusi paling kecil dalam perekonomian Banten.<sup>95</sup>

## B. Penyajian Data

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi yang diperoleh dari katalog Badan Pusat Statistik berasal dari website resmi BPS. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi se-Jawa periode Tahun 2013-2017 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

**Tabel 3.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,**  
**Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Untuk Provinsi**  
**Se-Jawa Periode 2013-2017**  
**(Dalam Ribu Rupiah)**

NO	PROVINSI – TAHUN	PAD	DAU	SILPA
1	DKI JAKARTA-2013	26.852.192.453	299.182.466	6.024.637
2	JAWA BARAT- 2013	12.360.109.870	1.472.453.011	1.512.965
3	JAWA TENGAH – 2013	8.212.800.641	1.670.859.369	71.935
4	DI YOGYAKARTA-2013	1.216.102.750	828.334.768	158.804
5	JAWA TIMUR – 2013	11.596.376.615	1.496.594.268	766.165
6	BANTEN -2013	4.118.551.716	617.081.101	876.277
7	DKI JAKARTA-2014	31.274.215.886	85.985.282	117.715
8	JAWA BARAT- 2014	15.038.153.310	1.687.686.386	(407.625)
9	JAWA TENGAH – 2014	9.916.358.231	1.803.931.189	(992.606)

<sup>95</sup> <https://www.bantenprov.go.id/> diakses pada Minggu, 10 November 2019

10	DI YOGYAKARTA-2014	1.464.604.954	899.923.550	(96.411)
11	JAWA TIMUR – 2014	14.442.216.520	1.866.548.185	(717.858)
12	BANTEN -2014	4.899.125.741	728.490.012	(755.919)
13	DKI JAKARTA-2015	33.686.176.815	-	665.896
14	JAWA BARAT- 2015	16.032.856.414	1.303.654.355	72.071
15	JAWA TENGAH – 2015	10.904.825.813	1.629.429.283	278.202
16	DI YOGYAKARTA-2015	1.593.110.770	920.544.722	51.230
17	JAWA TIMUR – 2015	15.402.647.675	1.587.261.707	1.102.168
18	BANTEN -2015	4.972.737.619	640.981.003	(269.418)
19	DKI JAKARTA-2016	3.888.017.588	-	(1.146.173)
20	JAWA BARAT- 2016	17.042.895.114	1.248.112.172	(1.888.125)
21	JAWA TENGAH – 2016	11.541.029.720	1.859.907.223	104.000
22	DI YOGYAKARTA-2016	1.673.749.196	940.835.434	(212.007)
23	JAWA TIMUR – 2016	15.817.795.025	1.672.878.372	(306.607)
24	BANTEN -2016	5.463.156.734	693.738.580	(559.063)
25	DKI JAKARTA-2017	43.901.488.808	-	1.216.042
26	JAWA BARAT- 2017	18.081.123.740	3.011.001.477	840.866
27	JAWA TENGAH – 2017	12.547.513.389	3.652.586.431	618.582
28	DI YOGYAKARTA-2017	1.851.977.303	1.314.372.147	73.414
29	JAWA TIMUR – 2017	17.324.177.665	3.803.428.371	634.111
30	BANTEN -2017	5.756.371.374	1.059.320.237	93.501

**Sumber: Data diolah dari BPS Realisasi APBD**

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, jumlah pendapatan asli daerah terendah pada provinsi DKI tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 1.216.102.750. 000 dan tertinggi pada pemerintah DKI Jakarta Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.43.901.488.808.000. Untuk Dana Alokasi Umum nilai terendah pada

pemerintah provinsi Jakarta, hal ini karena sesuai dengan Perda setempat bahwa untuk dana perimbangan termasuk DAU dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke daerah kabupaten/kota sehingga tidak ada DAU untuk pemerintah provinsi. Sedangkan nilai DAU tertinggi pada pemerintah provinsi Jawa Timur Periode 2017 yaitu sebesar Rp.3.803.428.371.000. Sedangkan nilai SiLPA terendah pada pemerintah provinsi Jawa Barat 2016 sebesar Rp. (1.888.125.000) dan nilai tertinggi pada pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2013 Rp. 6.024.637.000.

**Tabel 3.2**  
**Data Belanja Modal Pemerintah Provinsi**  
**Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017**  
**(Dalam Ribu Rupiah)**

NO	PROVINSI – TAHUN	BELANJA MODAL
1	DKI JAKARTA-2013	13.148.602.086
2	JAWA BARAT- 2013	14.724.113.008
3	JAWA TENGAH - 2013	9.213.696.623
4	DI YOGYAKARTA-2013	1.440.462.297
5	JAWA TIMUR – 2013	10.689.813.108
6	BANTEN -2013	3.316.069.657
7	DKI JAKARTA-2014	10.411.118.390
8	JAWA BARAT- 2014	1.359.802.615
9	JAWA TENGAH - 2014	1.570.679.411
10	DI YOGYAKARTA-2014	442.446.474
11	JAWA TIMUR – 2014	1.207.456.621
12	BANTEN -2014	691.484.393
13	DKI JAKARTA-2015	10.244.016.709

14	JAWA BARAT- 2015	2.298.676.125
15	JAWA TENGAH - 2015	2.514.681.555
16	DI YOGYAKARTA-2015	627.602.186
17	JAWA TIMUR – 2015	2.258.320.072
18	BANTEN -2015	1.435.969.707
19	DKI JAKARTA-2016	8.965.470.015
20	JAWA BARAT- 2016	2.859.355.624
21	JAWA TENGAH - 2016	2.815.678.179
22	DI YOGYAKARTA-2016	836.873.712
23	JAWA TIMUR – 2016	2.150.594.111
24	BANTEN -2016	1.334.133.583
25	DKI JAKARTA-2017	11.045.723.234
26	JAWA BARAT- 2017	2.311.616.146
27	JAWA TENGAH - 2017	1.454.598.084
28	DI YOGYAKARTA-2017	1.046.730.142
29	JAWA TIMUR – 2017	3.090.055.684
30	BANTEN -2017	1.349.687.360

**Sumber: Data diolah dari BPS laporan realisasi APBD**

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, jumlah alokasi Belanja Modal tertinggi pada pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2013 senilai Rp. 14.724.113.008.000 sedangkan untuk alokasi belanja modal terendah pada pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2014 senilai Rp. 442.446.474. 000.

### C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Asumsi Klasik

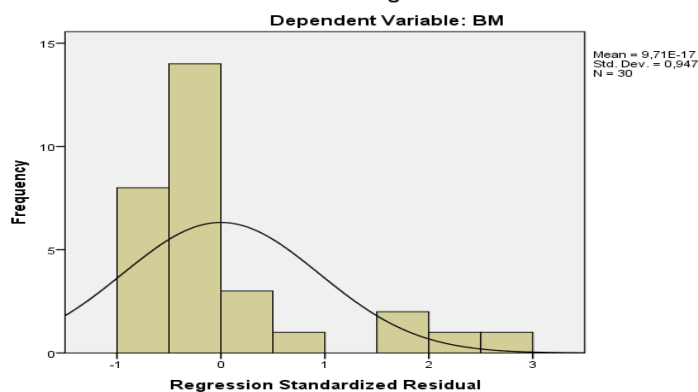
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik

dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, dimana uji ini untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. Diperlukannya uji ini adalah untuk menghindari estimasi yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian adalah :

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data-data dalam variabel pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk menganalisis data yang akan diuji yaitu dengan analisis Grafik.

**Gambar 3.1**  
**Uji Normalitas**  
**Histogram**

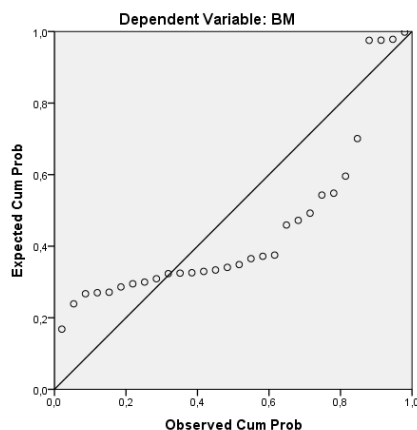


Sumber: Data Diolah

Dari hasil output histogram diatas terlihat bahwa kurva dependents dan *regression standardized residual* membentuk gambar lonceng jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.



**Gambar 3.2**  
**Uji Normalitas**  
**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Sumber: Data Diolah**

Berdasarkan tampilan Normal P-P *Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka data-data tersebut terdistribusi normal.

#### **b) Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai *tolerance* dapat dilakukan tidak ada gejala multikolonieritas, jika  $VIF < 10$  dan Nilai Tolerance  $> 0,10$ . Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas :

**Tabel 3.3**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Sig.	Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,015		
PAD	,012	,839	1,192
DAU	,057	,985	1,015
SiLPA	,022	,847	1,180

**Sumber: Data Diolah**

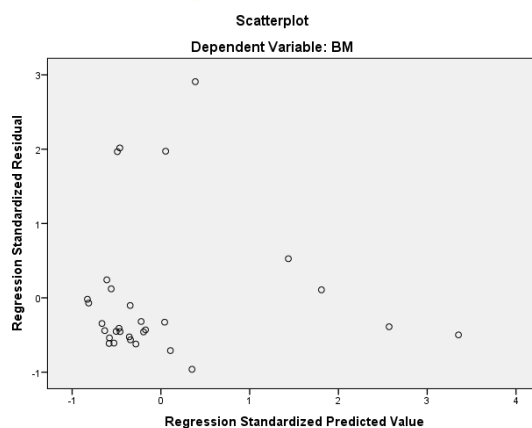
Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel PAD (X1) senilai 1,192 nilai *tolerance* sebesar 0,839. Variabel DAU (X2) memiliki VIF sebesar 1,015 dan nilai *tolerance* sebesar 0,985. Sementara variabel SiLPA memiliki VIF sebesar 1,180 dan nilai *tolerance* sebesar 0,847. Semua variabel tersebut nilai VIF kurang dari 10 dengan *tolerance* diatas 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinieritas.

### c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan heteroskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section. Heteroskedastisitas

menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan menggunakan pola scatterplot.

**Gambar 3.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Scatterplot**



**Sumber: Data Diolah**

Analisis output Scatterplot:

Berdasarkan tampilan pada *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *regression studentized residual*. Maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### **d) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi, akan tetapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain.

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai  $d_w$  dengan  $d_l$  dan  $d_u$  sebagai berikut:

- $d_U < d_w < 4-d_U$ , maka  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $D_w < d_L$  atau  $d_w > 4-d_L$ , maka  $H_a$  ditolak. Artinya terjadi autokorelasi.
- $d_L < d_w < d_L$  atau  $4-d_u < d_w < 4-d_L$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang terjadi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Uji Durbin – Watson**

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Ada autokorelasi negatif
0	$d_l$	$d_u$	$4-d_u$	$4-d_l$
		2		4

**Tabel 3.5**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727	1,718

Sumber:Data Diolah

### Analisis Model Summary:

Berdasarkan pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,718. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan dU, dengan  $n$  = jumlah sampel,  $K$  = jumlah variabel. Pada penelitian ini nilai  $n = 30$ ,  $K = 4$ , maka diperoleh nilai  $dL = 1,426$  dan  $dU = 1,7386$ . Kesimpulannya,  $dw (1,718) < dU$  (sebesar 1,7386)  $< 4-dU$  ( $4-1,7386 = 2,2614$ ). Jadi, dalam model persamaan regresi ini bisa tidak mengandung masalah autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal. Berikut hasil uji analisis regresi berganda

**Tabel 3.6**  
**Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
	PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
	DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
	SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

Sumber : data yang diolah

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa persamaan model regresi berganda adalah :

$$\text{BM} = 3393461568,629 + 0,170 \text{ PAD} - 1,254 \text{ DAU} \\ + 1189,565 \text{ SiLPA} + e$$

- a. Konstansta ( $\alpha$ ) = 3393461568,629

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar 3393461568,629, yang menunjukkan bahwa apabila variabel PAD, DAU, dan SiLPA bernilai nol (sama dengan nol), maka Belanja Modal sebesar 3393461568,629.

- b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,170

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal adalah positif. Jika PAD dinaikan satu satuan PAD maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Modal sebesar 0,170. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PAD dan Belanja Modal.

- c. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) = - 1,254

Pengaruh DAU terhadap belanja Modal adalah negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara kedua Variabel. Jika DAU dinaikan satu satuan DAU maka akan terjadi penurunan pada Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 1,254. Koefisien yang mempunyai nilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara pengungkapan DAU dan belanja Modal.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)= 1189,565

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal adalah positif.

Jika SiLPA dinaikan satu satuan SiLPA maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Modal sebesar 1189,565. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara SiLPA dan Belanja Modal.

e. Standar Error (e)

### 3. Uji Hipotesis

#### a) Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas  $< 0,05$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas  $> 0,05$  atau  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Uji *t***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

Sumber : data yang diolah

Analisis Uji *t*:

- (1) Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

$H_1$  : terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,707 > 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan PAD ( $X_1$ ) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

- (2) Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

Hipotesis:



$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

$H_2$  : terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,057 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $-1,995 < 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Artinya, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

(3) Pengaruh SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

$H_3$  : terdapat pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel SiLPA ( $X_3$ ) adalah sebesar  $0,022 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,433 > 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan SiLPA ( $X_3$ ) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

### b) Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F \text{ hitung} > F$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan  $F \text{ hitung} < F$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28513197264950437 0000,000	3	950439908831681 20000,000	9,33 1	,000 <sup>b</sup>
	Residual	26484277104125500 0000,000		26		
	Total	54997474369075940 0000,000	29			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

Sumber: Data Diolah

Dengan hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa secara simultan.

$H_4$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa secara simultan.

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0.05$  dan nilai F hitung  $9,331 > F$  tabel  $2,98$  , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2107 secara simultan.

### c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,463, yang memiliki arti bahwa PAD,DAU,dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja modal sebesar 46,3 %. Sedangkan untuk sisanya sebesar 53,7 % dijelaskan oleh variabel lain.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi belanja modal diperoleh hasil sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode tahun 2013-2017”, terbukti PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,707 > t$  tabel 2,056, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang penting terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santika Adhi Karyadi

(2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Jawa Periode Tahun 2013-2017”, terbukti bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,057 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $-1,995 < 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel DAU tidak

memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap alokasi belanja modal. Dalam hal ini ketidaksignifikan tersebut dapat disebabkan oleh adanya data sampel yang berasal dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Daerah kabupaten/kota di wilayah DKI tidak menerima DAU karena otonomi DKI diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku. DKI menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mendapat kucuran DAU dari transfer ke daerah, hal ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mampu untuk mencukupi kebutuhan provinsi. Ibu kota negara memiliki kapasitas fiskal yakni, dari pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam yang sangat besar.

### **3. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis Ketiga menyatakan bahwa “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode tahun 2013-2017”, terbukti SiLPA mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel SiLPA (X3) adalah sebesar  $0,022 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,433 > 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan SiLPA (X3) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode

2013-2017.

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha=0,5\%$ , hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011). SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

#### **4. Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dengan uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $9,331 > F$  tabel 2,98 yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara

parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Adib Irsyadi (2014: 10) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah DAU, PAD, DAK, dan SiLPA. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017” diterima.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi Fiskal Terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa Periode 2013-2017, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,707 > t_{tabel} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara PAD terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.
2. Untuk pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,057 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,995 < t_{tabel} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan DAU terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa dinyatakan ditolak.
3. Untuk pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,433 > t_{tabel} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.
4. Berdasarkan hasil pengujian simultan dapat disimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh signifikan

terhadap Alokasi Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0.05$  dan nilai F hitung  $9,331 > F$  tabel  $2,98$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh Desentralisasi Fiskal (PAD, DAU, dan SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor nonpublik agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi kepustakaan pihak kampus. Periode penelitian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui agar hasil yang didapat lebih dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- D.S. Priyarsono. 2011: *Dari Pertanian Ke Industri: Analisis Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Regional*, Bogor: IPB Press
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Desak Made M. dan Dewa Gede W, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Dengan Pendapatann Perkapita Sebagai Pemoderasi*”, (E-Jurnal Univeresitas Udayana Bali). 2018
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Harianto, D. & Adi, P.H. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019> diakses pada Jumat 4 Oktober 2019
- <https://jabar.bps.go.id> diakses pada Minggu, 17 Oktober 2019
- <https://jabarprov.go.id/> diakses pada Jumat,8 November 2019
- <https://jatengprov.go.id/> diakses pada Minggu, 17 Oktober 2019

<https://jatim.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 9 November 2019

<https://jogjaprov.go.id/> diakses pada Sabtu 16 November 2019

<https://www.bantenprov.go.id/> diakses pada Minggu, 10 November 2019

<https://www.jatimprov.go.id/> diakses pada sabtu, 9 November 2019

<https://yogyakarta.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 16 November 2019

I Made Pradana Adiputra dkk, “*Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Moda Sebagai Variabel Intervening*, (Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha)

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Pembangunan Edisi Kelima*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Kusnandar Dodik Siswanto, “*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”, (Jurnal Penelitian UI), 2012

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan*. Jember: STAIN-Press Jember

Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, “*Fiscal Decentralization and Economic Growth: Role of Democratic Institutions*”, *Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) Working Papers*, Vol. 89, 2013, hlm.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia,

Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

## Pengelolaan Keuangan daerah

PP Nomor 24 Tahun 2005

PP Nomor 71 Tahun 2010

Putri Retno Aryani, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*”, Skripsi Universitas Muhamadiyah Palembang.2017

Ridwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Peneitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* .Bandung:Alfabeta

Santika Adi Karyadi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*,Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

[Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik](#) diakses pada Sabtu, 9 November 2019

ShahNawaz Malik, Mahmood-Ul-Hassan dan Shahzad Hussain, “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan”, *The Pakistan Development Review*, 45:4, 2006, hlm. 845

Sheila Ardhian Nuarisa, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasi Belanja Modal*”,( Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang),2013

Sjahrijal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press

[Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017](#)". Diakses Pada Sabtu, 9 November 2019

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta

Sukarna, Wiranta. 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Suliyanto. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset

Syahrir, Ika dkk. 2013. *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestinambungan Pembangunan Cetakan Kedua*. Solo: Era Adicitra

## Intermedia

Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Jakarta.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia

Yani,Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* . Jakarta:Raja Grafindo Persada



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG DWI WAHYUNI  
NIM : E20163030  
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017” adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 2 Desember 2019

Saya yang menyatakan



**Endang Dwi Wahyuni**

**NIM. E20163030**

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS	RUMUSAN MASALAH
<p><b>Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017</b></p>	<p>Variabel Independen, Desentralisasi Fiskal (X)</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <p>2. Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3)</p> <p>Variabel dependen (Y), yaitu Alokasi Belanja modal</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>a. Pajak daerah</p> <p>b. Retribusi daerah</p> <p>c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>d. PAD yang sah</p> <p>2. Dana Alokasi Umum (DAU) <b>DAU = 10% x 26% x APBN</b></p> <p>3. Sisa lebih Pn Anggaran (SiLPA)</p> <p>1. Belanja Modal (BM)</p>	<p>Sumber data sekunder:</p> <p>1. Laporan Realisasi APBD (DJPK dan BPS)</p> <p>2. Studi Pustaka:</p> <p>a. Buku Ilmiah</p> <p>b. Laporan Penelitian</p> <p>c. Jurnal</p> <p>d. Skripsi</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: kuantitatif</p> <p>2. Jenis penelitian analisis statistik deskriptif</p> <p>3. Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i></p> <p>4. Metode analisis dengan Uji Asumsi Klasik dan uji Hipotesis:</p> <p>a. Uji normalitas data menggunakan uji kolmogorov</p> <p>b. Uji Multikolinieritas</p> <p>c. Uji Heteroskedastisitas</p> <p>d. Uji autokorelasi: Durbin Watson</p> <p>e. Uji F secara simultan</p> <p>f. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)</p> <p>g. Uji <i>t</i> secara parsial</p>	<p>1. <b>H<sub>1</sub></b>: PAD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>2. <b>H<sub>2</sub></b>: DAU berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>3. <b>H<sub>3</sub></b>: SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>4. <b>H<sub>4</sub></b>: PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal</p>	<p>1. Apakah PAD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi Se-Jawa pada Tahun 2013-2017?</p> <p>2. Apakah DAU berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi Se-Jawa pada Tahun 2013-2017?</p> <p>3. Apakah SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi Se-Jawa pada Tahun 2013-2017?</p> <p>4. Apakah PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi Se-Jawa pada Tahun 2013-2017?</p>





### Jurnal Penelitian

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	1 November 2019	Mencari data laporan Realisasi APBD periode Tahun 2014-2017 (BPS)
2.	3 November 2019	Mencari data laporan Realisasi APBD periode tahun 2013 (BPS)
3.	8 November 2019	Mencari data pemerintah provinsi se-Jawa (BPS dan website masing-masing provinsi)
4.	9 November 2019	Mencari data pemerintah provinsi se-Jawa (BPS dan website masing-masing provinsi)
5.	10 November 2019	Mencari data pemerintah provinsi se-Jawa (BPS dan website masing-masing provinsi)
6.	16 November 2019	Mencari data pemerintah provinsi se-Jawa (BPS dan website masing-masing provinsi)
7.	17 November 2019	Mencari data pemerintah provinsi se-Jawa (BPS dan website masing-masing provinsi)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

Nomor : B- 849 /In.20/7.a/PP.00.9/11/2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

**Kepala Laboratorium FEBI IAIN Jember**

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Endang Dwi Wahyuni  
NIM : E20163030  
Semester : VII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
No Telpon : 0856040034544  
Dosen Pembimbing : Agung Parmono, S.E., M.Si  
NIP : 19751216 200912 1 002  
Judul Penelitian : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 12 November 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-900/In.20/7.a/PP.00.9/11/2019

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Merujuk surat Nomor B-849/In.20/7.a/PP.00.9/11/2019 dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas berikut :

Nama : Endang Dwi Wahyuni  
NIM : E20163030  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa Periode Tahun 2013-2017

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data sekunder dari website BPS selama tanggal 1-17 November 2019 dalam rangka untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Jember, 18 November 2019

Mengetahui

Kepala Laboratorium

FEBI IAIN Jember



**Toton Fanshurna, M.E.I**

NIP. 19811224 201101 1 008

**REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**(ribu rupiah), 2014-2017**  
**5.B.3 ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 397 502 366	2 025 103 489	2 284 852 301	2 529 205 112
2.	Sumatera Utara	1 145 972 228	932 244 349	1 019 855 143	2 097 169 186
3.	Sumatera Barat	785 887 924	788 149 955	989 929 772	950 436 027
4.	R i a u	623 644 302	2 014 487 685	2 035 635 834	2 545 984 515
5.	J a m b i	818 059 264	791 302 089	945 539 007	1 011 118 961
6.	Sumatera Selatan	731 611 689	1 041 021 931	607 740 927	1 923 083 109
7.	Bengkulu	305 053 538	479 181 286	385 967 859	1 010 591 426
8.	Lampung	925 454 683	868 999 195	1 005 779 805	1 132 527 818
9.	Bangka Belitung	305 553 488	233 717 853	229 776 982	448 618 182
10.	Kepulauan Riau	717 994 481	341 284 895	287 515 440	573 943 372
11.	DKI Jakarta	10 411 118 390	10 244 016 709	8 965 470 015	15 881 105 921
12.	Jawa Barat	1 359 802 615	2 298 676 125	2 859 355 624	2 291 591 434
13.	Jawa Tengah	1 570 679 411	2 514 681 555	2 815 678 179	1 850 318 118
14.	D I Yogyakarta	442 446 474	627 602 186	836 873 712	1 040 563 177
15.	Jawa Timur	1 207 456 621	2 258 320 072	2 150 594 111	2 639 437 687
16.	Banten	691 484 393	1 435 969 707	1 334 133 583	1 515 648 566
17.	B a l i	370 585 308	562 235 633	730 924 238	706 058 700
18.	Nusa Tenggara Barat	422 797 430	834 584 079	696 681 646	950 584 631
19.	Nusa Tenggara Timur	407 600 789	606 702 215	602 299 046	582 791 379
20.	Kalimantan Barat	490 219 405	368 542 207	474 804 656	938 632 098
21.	Kalimantan Tengah	814 507 824	959 141 543	783 864 793	585 104 199
22.	Kalimantan Selatan	1 266 883 988	1 221 732 391	1 348 396 270	1 212 684 169
23.	Kalimantan Timur	2 211 317 315	2 010 917 819	1 571 814 627	925 853 954
24.	Kalimantan Utara	224 639 158	668 609 685	797 282 256	735 505 120
25.	Sulawesi Utara	506 723 318	757 277 045	745 899 590	697 064 710
26.	Sulawesi Tengah	276 831 808	442 524 325	503 973 010	479 617 819
27.	Sulawesi Selatan	676 237 209	849 305 058	856 863 744	1 059 508 067
28.	Sulawesi Tenggara	553 493 130	683 508 525	751 917 123	774 553 129
29.	Gorontalo	232 424 743	344 244 075	296 922 958	290 272 140
30.	Sulawesi Barat	267 018 262	445 228 018	498 735 453	540 094 349
31.	M a l u k u	369 329 906	542 785 444	832 064 350	583 835 640
32.	Maluku Utara	427 964 703	423 492 341	592 691 071	689 577 437
33.	Papua Barat	1 191 788 082	1 677 004 074	1 446 543 652	1 040 173 111
34.	P a p u a	1 689 302 792	2 865 461 762	2 490 333 442	3 530 217 100
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>36 839 387 037</b>	<b>45 158 055 320</b>	<b>44 776 710 219</b>	<b>55 763 470 363</b>

**REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**

**5.B.3 (ribu rupiah), 2015-2018**

No.	Provinsi/Province	2015	2016	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 025 103 489	2 284 852 301	2 168 299 050	3 301 299 641
2.	Sumatera Utara	932 244 349	1 019 855 143	1 919 452 036	1 900 431 185
3.	Sumatera Barat	788 149 955	989 929 772	1 113 508 186	1 113 064 613
4.	R i a u	2 014 487 685	2 035 635 834	1 941 215 182	1 784 614 414
5.	J a m b i	791 302 089	945 539 007	895 648 009	993 989 271
6.	Sumatera Selatan	1 041 021 931	607 740 927	1 377 382 678	843 255 047
7.	Bengkulu	479 181 286	385 967 859	711 073 586	770 202 172
8.	Lampung	868 999 195	1 005 779 805	1 451 484 673	1 769 013 848
9.	Bangka Belitung	233 717 853	229 776 982	368 209 932	408 024 732
10.	Kepulauan Riau	341 284 895	287 515 440	188 754 157	729 158 429
11.	DKI Jakarta	10 244 016 709	8 965 470 015	11 045 723 234	16 995 195 577
12.	Jawa Barat	2 298 676 125	2 859 355 624	2 311 616 146	3 617 655 383
13.	Jawa Tengah	2 514 681 555	2 815 678 179	1 454 598 084	1 863 194 953
14.	D I Yogyakarta	627 602 186	836 873 712	1 046 730 142	1 185 735 851
15.	Jawa Timur	2 258 320 072	2 150 594 111	3 090 055 684	2 846 847 342
16.	Banten	1 435 969 707	1 334 133 583	1 349 687 360	2 188 648 422
17.	B a l i	562 235 633	730 924 238	660 432 834	681 736 789
18.	Nusa Tenggara Barat	834 584 079	696 681 646	1 153 481 273	807 861 414
19.	Nusa Tenggara Timur	606 702 215	602 299 046	482 924 905	554 471 799
20.	Kalimantan Barat	368 542 207	474 804 656	954 917 378	785 507 781
21.	Kalimantan Tengah	959 141 543	783 864 793	565 245 264	1 053 109 643
22.	Kalimantan Selatan	1 221 732 391	1 348 396 270	1 388 008 913	1 286 878 471
23.	Kalimantan Timur	2 010 917 819	1 571 814 627	938 335 385	1 527 763 511
24.	Kalimantan Utara	668 609 685	797 282 256	654 364 109	1 181 320 845
25.	Sulawesi Utara	757 277 045	745 899 590	757 829 988	1 146 111 035
26.	Sulawesi Tengah	442 524 325	503 973 010	465 120 609	479 617 819
27.	Sulawesi Selatan	849 305 058	856 863 744	1 051 187 331	1 090 377 404
28.	Sulawesi Tenggara	683 508 525	751 917 123	903 121 912	764 130 802
29.	Gorontalo	344 244 075	296 922 958	254 842 225	332 495 447
30.	Sulawesi Barat	445 228 018	498 735 453	459 836 460	402 446 823
31.	M a l u k u	542 785 444	832 064 350	545 780 528	752 422 502
32.	Maluku Utara	423 492 341	592 691 071	561 613 740	319 918 129
33.	Papua Barat	1 677 004 074	1 446 543 652	770 102 986	1 680 227 985
34.	P a p u a	2 865 461 762	2 490 333 442	2 328 012 674	2 432 322 905
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>45 158 055 320</b>	<b>44 776 710 219</b>	<b>47 328 596 653</b>	<b>59 589 051 984</b>

(ribu rupiah), 2015-2018

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 650 120 551	2 397 502 366	2 025 103 489	2 582 415 195
2.	Sumatera Utara	760 722 417	1 145 972 228	932 244 349	1 243 297 180
3.	Sumatera Barat	691 489 599	785 887 924	788 149 955	1 164 098 684
4.	R i a u	2 245 307 028	623 644 302	2 014 487 685	2 532 123 774
5.	J a m b i	937 986 070	818 059 264	791 302 089	1 087 379 921
6.	Sumatera Selatan	862 903 668	731 611 689	1 044 021 931	1 241 874 465
7.	Bengkulu	277 377 980	305 053 538	477 514 286	588 697 163
8.	Lampung	804 089 325	925 454 683	838 559 195	1 067 238 598
9.	Bangka Belitung	402 766 577	305 553 488	233 717 853	340 787 640
10.	Kepulauan Riau	392 909 765	717 994 457	341 284 895	407 981 424
11.	DKI Jakarta	10 696 012 194	10 411 118 390	10 244 016 709	16 182 961 498
12.	Jawa Barat	1 272 779 829	1 359 525 115	2 298 676 125	3 545 942 272
13.	Jawa Tengah	994 740 520	1 510 099 411	2 514 681 555	3 147 522 814
14.	D I Yogyakarta	369 395 794	422 446 474	627 602 186	947 405 795
15.	Jawa Timur	1 175 751 046	1 207 456 621	2 258 320 072	2 233 574 626
16.	Banten	813 275 114	691 484 393	1 435 969 707	1 730 524 590
17.	B a l i	454 400 114	370 585 308	562 235 633	804 953 930
18.	Nusa Tenggara Barat	456 279 190	422 797 430	834 584 079	687 962 987
19.	Nusa Tenggara Timur	456 180 376	407 600 789	606 702 215	695 882 339
20.	Kalimantan Barat	490 511 463	490 219 405	368 542 207	644 118 080
21.	Kalimantan Tengah	940 602 626	814 507 824	959 141 543	1 194 128 440
22.	Kalimantan Selatan	1 339 858 648	1 266 883 988	1 221 732 391	1 501 664 385
23.	Kalimantan Timur	3 651 131 816	2 211 317 315	2 010 917 819	2 690 596 408
24.	Kalimantan Utara	0	224 639 158	668 609 685	735 505 120
25.	Sulawesi Utara	387 136 385	506 723 318	757 277 045	744 467 896
26.	Sulawesi Tengah	355 519 047	276 831 808	442 524 325	558 743 309
27.	Sulawesi Selatan	490 213 949	676 237 209	849 305 058	868 879 019
28.	Sulawesi Tenggara	430 716 880	553 493 130	683 508 525	802 238 824
29.	Gorontalo	184 959 338	232 424 743	344 244 075	378 716 503
30.	Sulawesi Barat	183 451 336	267 018 262	445 228 018	830 684 408
31.	M a l u k u	193 590 990	369 329 906	542 785 444	689 280 102
32.	Maluku Utara	389 731 154	427 964 703	423 492 341	745 414 219
33.	Papua Barat	833 669 082	1 191 788 082	1 677 004 074	1 472 995 924
34.	P a p u a	1 220 744 851	1 689 302 792	2 865 461 762	806 281 622





**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),  
2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 731 130 840	1 985 835 617	2 060 180 944	2 227 055 654
2.	Sumatera Utara	4 416 811 865	4 883 880 619	4 954 833 101	4 925 627 727
3.	Sumatera Barat	1 729 222 284	1 876 733 122	1 964 148 976	2 044 504 493
4.	R i a u	3 245 087 745	3 476 960 098	3 110 656 140	3 735 800 000
5.	J a m b i	1 281 239 473	1 241 237 022	1 192 291 685	1 393 072 790
6.	Sumatera Selatan	2 407 905 239	2 534 526 413	2 546 177 545	3 023 936 703
7.	Bengkulu	672 064 468	701 300 383	731 556 734	905 536 549
8.	Lampung	2 274 685 573	2 247 342 668	2 368 796 251	2 649 215 475
9.	Bangka Belitung	562 928 837	571 802 890	574 258 444	678 913 156
10.	Kepulauan Riau	1 070 208 289	1 012 146 824	1 039 401 353	1 104 344 659
11.	DKI Jakarta	31 274 215 886	33 686 176 815	36 888 017 588	41 488 193 371
12.	Jawa Barat	15 038 153 310	16 032 856 414	17 042 895 114	16 524 120 918
13.	Jawa Tengah	9 916 358 231	10 904 825 813	11 541 029 720	11 967 160 406
14.	D I Yogyakarta	1 464 604 954	1 593 110 770	1 673 749 196	1 657 147 882
15.	Jawa Timur	14 442 216 520	15 402 647 675	15 817 795 025	14 900 003 388
16.	Banten	4 899 125 741	4 972 737 619	5 463 156 734	5 666 689 017
17.	B a l i	2 920 416 698	3 041 298 422	3 041 195 258	3 250 531 000
18.	Nusa Tenggara Barat	1 115 060 397	1 374 165 767	1 359 844 019	1 501 609 334
19.	Nusa Tenggara Timur	763 337 478	882 315 240	995 186 121	1 004 044 139
20.	Kalimantan Barat	1 621 610 891	1 702 542 350	1 664 338 992	1 674 190 144
21.	Kalimantan Tengah	1 253 708 122	1 174 969 267	1 158 303 928	1 327 494 134
22.	Kalimantan Selatan	2 898 704 954	2 684 908 314	2 499 530 556	3 205 743 749
23.	Kalimantan Timur	6 663 113 275	4 861 546 726	4 029 364 844	3 987 452 610
24.	Kalimantan Utara	11 833 885	370 047 613	507 955 517	320 047 453
25.	Sulawesi Utara	937 681 927	1 012 945 961	981 044 550	1 076 342 496
26.	Sulawesi Tengah	824 611 352	904 937 124	939 092 070	914 431 692
27.	Sulawesi Selatan	3 029 122 239	3 270 828 511	3 449 561 308	3 724 172 762
28.	Sulawesi Tenggara	599 942 751	667 079 210	756 302 657	743 891 514
29.	Gorontalo	281 920 210	289 557 151	311 223 202	356 398 685
30.	Sulawesi Barat	223 704 906	273 507 239	277 686 126	299 021 359
31.	M a l u k u	425 425 608	390 813 372	600 781 690	519 252 406
32.	Maluku Utara	203 059 698	236 054 154	280 111 908	486 709 146
33.	Papua Barat	306 674 697	322 799 298	338 811 109	403 269 107
34.	P a p u a	944 929 692	912 908 312	1 019 732 912	1 308 280 586
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>121 450 818 035</b>	<b>127 497 344 793</b>	<b>133 179 011 317</b>	<b>140 994 204 504</b>

No.	Provinsi/Province	2015	2016	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 985 835 617	2 060 180 944	2 276 305 569	2 324 662 431
2.	Sumatera Utara	4 883 880 619	4 954 833 101	5 287 469 402	5 732 425 486
3.	Sumatera Barat	1 876 733 122	1 964 148 976	2 134 010 520	2 320 938 900
4.	R i a u	3 476 960 098	3 110 656 140	3 360 008 975	3 963 964 459
5.	J a m b i	1 241 237 022	1 192 291 685	1 580 533 417	1 494 530 066
6.	Sumatera Selatan	2 534 526 413	2 546 177 545	3 031 633 624	3 607 819 114
7.	Bengkulu	701 300 383	731 556 734	804 575 838	993 830 271
8.	Lampung	2 247 342 668	2 368 796 251	2 750 582 686	3 179 595 886
9.	Bangka Belitung	571 802 890	574 258 444	709 832 181	776 196 231
10.	Kepulauan Riau	1 012 146 824	1 039 401 353	1 094 786 189	1 223 732 044
11.	DKI Jakarta	33 686 176 815	36 888 017 588	43 901 488 808	44 570 508 024
12.	Jawa Barat	16 032 856 414	17 042 895 114	18 081 123 740	17 584 972 237
13.	Jawa Tengah	10 904 825 813	11 541 029 720	12 547 513 389	12 994 933 643
14.	DI Yogyakarta	1 593 110 770	1 673 749 196	1 851 977 303	1 734 005 738
15.	Jawa Timur	15 402 647 675	15 817 795 025	17 324 177 665	15 675 894 292
16.	Banten	4 972 737 619	5 463 156 734	5 756 371 374	6 183 868 752
17.	B a l i	3 041 298 422	3 041 195 258	3 398 472 278	3 348 053 405
18.	Nusa Tenggara Barat	1 374 165 767	1 359 844 019	1 684 468 710	1 719 519 116
19.	Nusa Tenggara Timur	882 315 240	995 186 121	1 047 491 567	1 061 828 395
20.	Kalimantan Barat	1 702 542 350	1 664 338 992	1 945 647 317	1 791 581 091
21.	Kalimantan Tengah	1 174 969 267	1 158 303 928	1 342 330 619	1 400 710 257
22.	Kalimantan Selatan	2 684 908 314	2 499 530 556	2 848 892 104	3 388 565 526
23.	Kalimantan Timur	4 861 546 726	4 029 364 844	4 588 752 896	4 281 264 186
24.	Kalimantan Utara	370 047 613	507 955 517	482 740 846	476 423 059
25.	Sulawesi Utara	1 012 945 961	981 044 550	1 146 674 828	1 168 433 686
26.	Sulawesi Tengah	904 937 124	939 092 070	958 212 002	914 431 692
27.	Sulawesi Selatan	3 270 828 511	3 449 561 308	3 679 083 944	3 917 732 580
28.	Sulawesi Tenggara	667 079 210	756 302 657	806 253 870	620 402 707
29.	Gorontalo	289 557 151	311 223 202	348 267 663	362 576 086
30.	Sulawesi Barat	273 507 239	277 686 126	296 935 168	334 264 863
31.	M a l u k u	390 813 372	600 781 690	430 866 044	807 617 106
32.	Maluku Utara	236 054 154	280 111 908	327 469 790	263 431 767
33.	Papua Barat	322 799 298	338 811 109	467 075 448	423 919 542
34.	P a p u a	912 908 312	1 019 732 912	1 015 781 100	1 008 758 235
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>127 497 344 793</b>	<b>133 179 011 317</b>	<b>149 307 806 874</b>	<b>151 651 390 873</b>

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 <sup>*</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 325 435 091	1 731 130 840	1 985 835 617	2 057 481 533
2.	Sumatera Utara	4 091 285 887	4 416 811 865	4 883 880 619	4 630 468 148
3.	Sumatera Barat	1 366 178 102	1 729 222 284	1 876 733 122	1 894 690 226
4.	R i a u	2 725 623 913	3 245 087 745	3 476 960 098	3 495 548 893
5.	J a m b i	1 063 922 065	1 281 239 473	1 241 237 022	1 273 892 967
6.	Sumatera Selatan	2 021 696 787	2 407 905 239	2 534 526 413	2 733 329 641
7.	Bengkulu	525 207 935	672 064 468	705 000 383	745 385 298
8.	Lampung	1 771 297 935	2 274 685 573	2 417 022 668	2 446 043 678
9.	Bangka Belitung	495 796 075	562 928 837	571 802 890	567 635 350
10.	Kepulauan Riau	907 982 039	1 070 208 289	1 012 146 824	1 109 056 420
11.	DKI Jakarta	26 852 192 453	31 274 215 886	33 686 176 815	39 322 613 624
12.	Jawa Barat	12 360 109 870	15 038 123 310	16 032 856 414	16 180 205 532
13.	Jawa Tengah	8 212 800 641	9 935 358 231	10 904 825 813	13 810 924 605
14.	D I Yogyakarta	1 216 102 750	1 344 044 954	1 593 110 770	1 553 180 369
15.	Jawa Timur	11 596 376 615	14 042 216 520	15 402 647 675	15 245 241 800
16.	Banten	4 118 551 716	4 899 125 741	4 972 737 619	5 242 329 551
17.	B a l i	2 529 976 446	2 920 416 698	3 041 298 422	3 379 078 508
18.	Nusa Tenggara Barat	857 442 205	1 115 060 397	1 374 165 767	1 384 517 817
19.	Nusa Tenggara Timur	5 532 32 134	763 337 478	882 315 240	966 858 995
20.	Kalimantan Barat	347 396 425	1 621 610 891	1 702 542 350	1 923 033 474
21.	Kalimantan Tengah	093 821 486	1 253 708 122	1 174 969 267	1 698 067 100
22.	Kalimantan Selatan	2 502 279 216	2 898 704 954	2 684 908 314	2 938 281 960
23.	Kalimantan Timur	5 885 262 004	6 663 113 275	4 861 546 726	5 089 508 170
24.	Kalimantan Utara	0	11 833 885	370 047 613	320 047 453
25.	Sulawesi Utara	789 631 755	937 681 927	1 012 945 961	1 141 321 190
26.	Sulawesi Tengah	662 226 616	824 611 352	904 937 124	1 004 414 626
27.	Sulawesi Selatan	2 560 045 632	3 029 122 239	3 270 828 511	3 511 644 272
28.	Sulawesi Tenggara	514 857 030	599 942 751	667 079 210	558 392 945
29.	Gorontalo	214 684 375	281 920 210	289 557 151	349 144 606
30.	Sulawesi Barat	154 131 860	223 704 906	273 507 239	278 766 459
31.	M a l u k u	304 364 506	425 425 608	390 813 372	527 230 635
32.	Maluku Utara	165 886 908	203 059 698	236 054 154	282 996 628
33.	Papua Barat	236 282 890	306 674 697	322 799 298	316 276 910
34.	P a p u a	597 707 375	944 929 692	912 908 312	528 011 87



**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 201 612 787	1 237 894 986	1 263 870 989	1 930 152 204
2.	Sumatera Utara	1 349 132 276	1 139 261 371	1 604 505 673	2 638 744 012
3.	Sumatera Barat	1 129 886 306	1 221 128 606	1 261 915 864	2 067 838 337
4.	R i a u	820 984 584	654 220 250	738 378 737	1 434 458 151
5.	J a m b i	948 337 712	1 009 165 864	1 070 452 478	1 432 088 270
6.	Sumatera Selatan	985 542 760	931 915 470	1 071 421 391	1 721 811 481
7.	Bengkulu	955 095 187	1 046 080 820	1 070 751 292	1 354 429 212
8.	Lampung	1 136 053 041	1 097 129 439	1 321 679 032	1 906 179 170
9.	Bangka Belitung	806 820 146	897 887 443	905 526 208	1 035 119 230
10.	Kepulauan Riau	698 009 318	695 943 711	866 810 696	1 043 954 307
11.	DKI Jakarta	85 985 282	0	0	0
12.	Jawa Barat	1 687 686 386	1 303 654 355	1 248 112 172	2 992 041 501
13.	Jawa Tengah	1 803 931 189	1 629 429 283	1 859 907 223	3 688 746 159
14.	D I Yogyakarta	899 923 550	920 544 722	940 835 434	1 380 356 648
15.	Jawa Timur	1 866 548 185	1 587 261 707	1 672 878 372	3 687 183 876
16.	Banten	728 490 012	640 981 003	693 738 580	1 105 821 476
17.	B a l i	832 297 473	831 597 268	850 144 224	1 311 447 133
18.	Nusa Tenggara Barat	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709	1 496 972 550
19.	Nusa Tenggara Timur	1 131 687 590	1 300 445 875	1 337 091 848	1 782 981 159
20.	Kalimantan Barat	1 290 222 856	1 405 594 169	1 493 486 253	1 667 449 642
21.	Kalimantan Tengah	1 152 428 738	1 280 595 848	1 294 850 243	1 612 657 546
22.	Kalimantan Selatan	701 725 536	571 244 699	779 517 454	1 111 200 737
23.	Kalimantan Timur	57 312 515	0	80 402 179	649 653 899
24.	Kalimantan Utara	20 567 986	651 247 428	1 032 459 159	1 032 459 159
25.	Sulawesi Utara	949 852 622	1 026 948 809	1 065 545 204	1 340 353 014
26.	Sulawesi Tengah	1 087 885 014	1 221 602 865	1 272 925 036	1 493 238 032
27.	Sulawesi Selatan	1 209 598 741	1 180 010 167	1 394 148 361	2 266 264 600
28.	Sulawesi Tenggara	1 053 636 011	1 176 423 577	1 200 634 199	1 602 253 856
29.	Gorontalo	734 279 438	845 395 651	884 557 753	1 019 780 418
30.	Sulawesi Barat	776 214 122	895 580 933	925 147 622	977 903 640
31.	M a l u k u	1 019 704 312	1 177 774 674	1 260 897 986	1 465 641 669
32.	Maluku Utara	906 623 550	1 061 177 950	1 132 578 857	1 219 425 902
33.	Papua Barat	1 122 264 659	1 284 079 495	1 322 765 639	1 378 805 557
34.	P a p u a	1 991 202 341	2 277 932 698	2 502 449 137	2 570 118 273
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>34 121 932 565</b>	<b>35 288 784 853</b>	<b>38 538 077 004</b>	<b>55 417 530 820</b>

No.	Provinsi/Province	2015	2016	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 237 894 986	1 263 870 989	2 060 263 235	2 060 263 235
2.	Sumatera Utara	1 139 261 371	1 604 505 673	2 629 224 545	2 629 224 545
<del>3.</del>	<del>Sumatera Barat</del>	<del>1 221 128 606</del>	<del>1 261 915 864</del>	<del>2 014 646 639</del>	<del>2 014 646 639</del>
4.	R i a u	654 220 250	738 378 737	1 457 997 067	1 434 458 151
5.	J a m b i	1 009 165 864	1 070 452 478	1 397 912 161	1 399 367 134
6.	Sumatera Selatan	931 915 470	1 071 421 391	1 697 897 817	1 697 897 817
7.	Bengkulu	1 046 080 820	1 070 751 292	1 301 538 847	1 301 538 847
8.	Lampung	1 097 129 439	1 321 679 032	1 851 595 354	1 857 043 487
9.	Bangka Belitung	897 887 443	905 526 208	980 297 314	1 018 673 218
10.	Kepulauan Riau	695 943 711	866 810 696	1 059 822 693	1 257 386 100
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	1 303 654 355	1 248 112 172	3 011 001 477	2 879 143 808
13.	Jawa Tengah	1 629 429 283	1 859 907 223	3 652 586 431	3 652 586 431
14.	D I Yogyakarta	920 544 722	940 835 434	1 314 372 147	1 314 372 147
15.	Jawa Timur	1 587 261 707	1 672 878 372	3 803 428 371	3 813 411 928
16.	Banten	640 981 003	693 738 580	1 059 320 237	1 072 903 468
17.	B a l i	831 597 268	850 144 224	1 260 842 523	1 268 585 388
18.	Nusa Tenggara Barat	1 088 633 717	1 117 691 709	1 537 777 886	1 537 777 886
19.	Nusa Tenggara Timur	1 300 445 875	1 337 091 848	1 784 462 326	1 827 412 640
20.	Kalimantan Barat	1 405 594 169	1 493 486 253	1 720 698 207	1 724 402 496
21.	Kalimantan Tengah	1 280 595 848	1 294 850 243	1 574 382 856	1 574 382 856
22.	Kalimantan Selatan	571 244 699	779 517 454	1 106 532 187	1 118 213 289
23.	Kalimantan Timur	0	80 402 179	714 906 576	767 682 423
24.	Kalimantan Utara	651 247 428	1 032 459 159	1 185 105 787	1 185 105 787
25.	Sulawesi Utara	1 026 948 809	1 065 545 204	1 390 272 639	1 427 544 997
26.	Sulawesi Tengah	1 221 602 865	1 272 925 036	1 546 247 611	1 493 238 032
27.	Sulawesi Selatan	1 180 010 167	1 394 148 361	2 509 480 255	2 509 480 255
28.	Sulawesi Tenggara	1 176 423 577	1 200 634 199	1 563 334 271	1 575 959 517
29.	Gorontalo	845 395 651	884 557 753	997 598 871	1 006 925 000
30.	Sulawesi Barat	895 580 933	925 147 622	1 008 360 523	1 025 033 063
31.	M a l u k u	1 177 774 674	1 260 897 986	1 555 603 048	1 670 234 402
32.	Maluku Utara	1 061 177 950	1 132 578 857	1 265 846 334	1 331 236 347
33.	Papua Barat	1 284 079 495	1 322 765 639	1 411 972 998	1 431 332 966
34.	P a p u a	2 277 932 698	2 502 449 137	2 338 200 799	2 570 118 273
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>35 288 784 853</b>	<b>38 538 077 004</b>	<b>55 763 530 032</b>	<b>56 447 582 572</b>

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	75 148 510	72 953 790	70 866 056	155 250 500
2.	Sumatera Utara	54 823 448	59 728 388	47 746 880	152 322 490
3.	Sumatera Barat	63 941 975	54 108 200	62 731 100	1 212 490 320
4.	R i a u	38 738 320	43 737 510	63 362 192	1 454 358 190
5.	J a m b i	53 328 486	49 355 510	57 944 770	154 639 420
6.	Sumatera Selatan	25 188 400	62 754 900	69 405 320	158 448 170
7.	Bengkulu	51 587 330	53 927 020	61 933 200	419 941 320
8.	Lampung	60 108 230	48 851 620	245 766 400	285 603 440
9.	Bangka Belitung	44 170 570	43 372 460	44 355 816	131 539 140
10.	Kepulauan Riau	36 672 910	41 678 090	42 537 210	153 293 920
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	80 072 050	78 215 380	18 904 024	7 747 404 320
13.	Jawa Tengah	82 522 510	80 055 240	57 972 640	5 373 908 330
14.	D I Yogyakarta	34 495 900	37 711 610	39 084 040	719 033 950
15.	Jawa Timur	48 047 785	101 875 970	66 039 190	150 731 780
16.	Banten	10 601 230	12 538 478	16 789 048	1 537 831 790
17.	B a l i	43 815 380	41 600 750	134 496 571	942 537 750
18.	Nusa Tenggara Barat	51 401 690	54 663 430	214 257 150	255 454 120
19.	Nusa Tenggara Timur	42 266 660	74 235 910	100 654 710	1 445 047 410
20.	Kalimantan Barat	74 172 390	63 189 480	85 584 200	189 823 170
21.	Kalimantan Tengah	63 299 310	61 929 830	72 525 960	272 357 450
22.	Kalimantan Selatan	41 553 540	54 189 940	63 890 470	969 446 175
23.	Kalimantan Timur	8 047 840	1 037 925	218 651 350	1 011 082 810
24.	Kalimantan Utara	0	8 221 270	59 947 820	311 330 690
25.	Sulawesi Utara	54 346 140	59 675 060	76 744 790	668 226 132
26.	Sulawesi Tengah	65 949 350	63 942 480	250 986 290	872 787 050
27.	Sulawesi Selatan	64 264 340	72 976 480	222 686 392	425 077 470
28.	Sulawesi Tenggara	53 266 770	58 750 010	86 399 950	190 919 990
29.	Gorontalo	43 013 530	42 374 060	67 883 960	378 984 540
30.	Sulawesi Barat	47 017 000	50 585 710	72 513 950	430 185 670
31.	M a l u k u	53 424 880	70 134 160	216 914 600	247 937 260
32.	Maluku Utara	69 688 380	74 623 090	146 686 448	271 522 830
33.	Papua Barat	64 931 200	61 215 730	92 376 080	533 498 030
34.	P a p u a	133 897 240	120 505 640	460 303 520	177 245 560





**REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI**  
**SELURUH INDONESIA TABEL** (juta rupiah), 2014  
**TABLE 1.a** **ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**  
*(million rupiahs), 2014*

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 606 325	1 399 324	13 005 649	12 045 848	959 801	13 005 649
2.	Sumatera Utara	7 772 029	51 426	7 823 455	7 808 557	14 898	7 823 455
3.	Sumatera Barat	3 635 838	240 277	3 876 115	3 483 673	392 442	3 876 115
4.	R i a u	8 132 410	1 451 087	9 583 497	5 602 074	3 981 423	9 583 497
5.	J a m b i	3 165 056	514 103	3 679 159	3 204 633	474 526	3 679 159
6.	Sumatera Selatan	6 237 368	10 179	6 247 547	5 770 733	476 814	6 247 547
7.	Bengkulu	1 986 239	210 176	2 196 415	1 934 722	261 693	2 196 415
8.	Lampung	4 526 532	41 141	4 567 673	4 454 187	113 486	4 567 673
9.	Bangka Belitung	1 719 594	201 966	1 921 560	1 596 087	325 473	1 921 560
10.	Kepulauan Riau	2 919 185	538 525	3 457 710	3 312 459	145 251	3 457 710
11.	DKI Jakarta	43 824 301	7 593 995	51 418 296	37 799 664	13 618 632	51 418 296
12.	Jawa Barat	22 310 953	3 586 472	25 897 425	20 797 988	5 099 437	25 897 425
13.	Jawa Tengah	15 157 460	1 689 428	16 846 888	15 086 065	1 760 833	16 846 898
14.	D I Yogyakarta	3 139 872	88 527	3 529 399	2 981 068	548 331	3 529 399
15.	Jawa Timur	20 772 484	1 446 787	22 619 271	20 006 319	2 612 952	22 619 271
16.	Banten	7 068 433	1 069 805	8 138 238	6 192 156	1 946 082	8 138 238
17.	B a l i	4 571 018	1 039 710	5 617 388	4 491 646	1 125 742	5 617 388
18.	Nusa Tenggara Barat	2 762 427	13 828	2 803 255	2 614 100	189 155	2 803 255
19.	Nusa Tenggara Timur	2 787 589	235 105	3 022 694	2 693 049	329 645	3 022 694
20.	Kalimantan Barat	3 719 770	127 745	3 847 515	3 652 914	194 601	3 847 515
21.	Kalimantan Tengah	3 129 695	386 720	3 516 415	3 235 800	280 615	3 516 415
22.	Kalimantan Selatan	4 793 165	863 395	5 656 560	4 917 828	738 732	5 656 560
23.	Kalimantan Timur	11 285 828	1 050 356	12 336 184	11 274 556	1 061 628	12 336 184
24.	Kalimantan Utara	1 513 353	313 461	1 826 814	642 365	1 184 449	1 826 814
25.	Sulawesi Utara	2 320 811	249 382	2 570 193	2 229 484	340 709	2 570 193
26.	Sulawesi Tengah	2 440 227	147 909	2 588 136	2 445 661	142 475	2 588 136
27.	Sulawesi Selatan	5 503 161	339 681	5 842 842	5 600 387	242 455	5 842 842
28.	Sulawesi Tenggara	2 189 560	331 004	2 520 564	2 088 600	431 964	2 520 564
29.	Gorontalo	1 209 049	92 443	1 301 492	1 204 490	97 002	1 301 492
30.	Sulawesi Barat	1 240 242	129 255	1 369 497	1 227 422	142 075	1 369 497
31.	M a l u k u	1 823 030	89 520	1 912 550	1 726 133	186 417	1 912 550
32.	Maluku Utara	1 508 578	24 142	1 532 720	1 481 565	51 155	1 532 720
33.	Papua Barat	5 762 348	1 334 409	7 096 757	5 428 849	1 667 908	7 096 757
34.	P a p u a	10 709 819	833 203	11 543 022	10 303 787	1 239 235	11 543 022
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>233 277 409</b>	<b>28 435 496</b>	<b>261 712 905</b>	<b>219 334 869</b>	<b>42 378 036</b>	<b>261 712 905</b>

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.b (juta rupiah), 2015

TABLE 1.b ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA  
(million rupiahs), 2015

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 694 163	916 943	12 611 106	12 149 422	461 684	12 611 106
2.	Sumatera Utara	8 480 759	14 898	8 495 657	7 959 167	536 490	8 495 657
3.	Sumatera Barat	4 052 249	274 105	4 326 354	4 022 257	304 097	4 326 354
4.	R i a u	6 911 045	3 981 811	10 892 856	7 760 972	3 131 884	10 892 856
5.	J a m b i	3 129 719	474 526	3 604 245	3 425 566	178 679	3 604 245
6.	Sumatera Selatan	5 990 424	39 970	6 030 394	5 190 199	840 195	6 030 394
7.	Bengkulu	2 180 679	255 525	2 436 204	2 282 345	153 859	2 436 204
8.	Lampung	4 787 308	111 475	4 898 783	4 781 202	117 581	4 898 783
9.	Bangka Belitung	1 886 999	325 654	2 212 653	1 869 959	342 694	2 212 653
10.	Kepulauan Riau	2 513 438	136 340	2 649 778	2 605 394	44 384	2 649 778
11.	DKI Jakarta	44 209 238	9 209 782	53 419 020	43 031 323	10 387 697	53 419 020
12.	Jawa Barat	24 009 981	4 551 872	28 561 853	24 417 606	4 144 247	28 561 853
13.	Jawa Tengah	16 828 154	1 689 437	18 517 591	17 820 760	696 831	18 517 591
14.	DI Yogyakarta	3 400 015	511 993	3 911 108	3 496 426	414 682	3 911 108
15.	Jawa Timur	22 228 450	450 199	24 678 649	22 946 308	1 732 341	24 678 649
16.	Banten	7 328 221	1 907 994	9 236 215	8 084 140	1 152 075	9 236 215
17.	B a l i	4 967 955	905 741	5 873 708	4 999 031	874 677	5 873 708
18.	Nusa Tenggara Barat	8 443 366	198 748	3 647 334	3 364 904	282 430	3 647 334
19.	Nusa Tenggara Timur	3 315 669	254 559	3 570 228	3 328 496	241 732	3 570 228
20.	Kalimantan Barat	4 073 147	134 601	4 207 748	4 123 636	84 112	4 207 748
21.	Kalimantan Tengah	3 252 748	294 181	3 546 929	3 482 434	64 495	3 546 929
22.	Kalimantan Selatan	4 746 943	753 331	5 500 274	5 102 865	397 409	5 500 274
23.	Kalimantan Timur	9 376 313	0	9 376 313	8 598 988	777 325	9 376 313
24.	Kalimantan Utara	1 444 383	1 184 449	2 628 832	1 893 597	735 235	2 628 832
25.	Sulawesi Utara	2 527 959	290 709	2 818 668	2 693 084	125 584	2 818 668
26.	Sulawesi Tengah	2 901 588	135 830	3 037 418	2 953 281	84 137	3 037 418
27.	Sulawesi Selatan	6 105 815	309 745	6 415 560	6 149 605	265 955	6 415 560
28.	Sulawesi Tenggara	2 471 389	415 301	2 886 690	2 349 274	537 416	2 886 690
29.	Gorontalo	1 389 324	87 003	1 476 327	1 407 931	68 396	1 476 327
30.	Sulawesi Barat	1 473 750	0	1 473 750	1 385 842	87 908	1 473 750
31.	M a l u k u	2 132 589	171 948	2 304 537	2 280 091	24 446	2 304 537
32.	Maluku Utara	1 801 248	54 882	1 856 130	1 808 760	47 370	1 856 130
33.	Papua Barat	5 840 353	1 665 917	7 506 270	6 880 167	626 103	7 506 270
34.	P a p u a	11 805 767	1 180 865	12 986 632	12 396 447	590 185	12 986 632
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>242 706 380</b>	<b>34 889 434</b>	<b>277 595 814</b>	<b>247 041 479</b>	<b>30 554 335</b>	<b>277 595 814</b>

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.c (juta rupiah), 2016

TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA  
(million rupiahs), 2016

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	12 364 564	288 677	12 653 241	12 119 713	533 528	12 653 241
2.	Sumatera Utara	10 440 619	536 276	10 976 895	9 476 424	1 500 471	10 976 895
3.	Sumatera Barat	4 624 675	251 497	4 876 172	4 504 038	372 134	4 876 172
4.	R i a u	6 942 927	3 132 206	10 075 133	8 731 938	1 343 195	10 075 133
5.	J a m b i	3 203 974	177 911	3 381 885	3 294 485	87 400	3 381 885
6.	Sumatera Selatan	6 582 781	44 861	6 627 642	4 962 573	1 665 069	6 627 642
7.	Bengkulu	2 355 564	136 087	2 491 651	2 029 691	461 960	2 491 651
8.	Lampung	5 588 723	102 512	5 691 235	5 476 922	214 313	5 691 235
9.	Bangka Belitung	1 949 866	337 694	2 287 560	2 069 868	217 692	2 287 560
10.	Kepulauan Riau	2 852 614	0	2 852 614	2 782 118	70 496	2 852 614
11.	DKI Jakarta	53 784 706	5 607 752	59 392 458	47 128 810	12 263 648	59 392 458
12.	Jawa Barat	27 694 035	3 650 427	31 344 462	27 621 964	3 722 498	31 344 462
13.	Jawa Tengah	19 632 577	417 921	20 050 498	19 354 375	696 123	20 050 498
14.	DI Yogyakarta	3 899 193	377 880	4 277 073	3 847 963	429 110	4 277 073
15.	Jawa Timur	24 962 122	1 355 114	26 317 236	23 859 954	2 457 282	26 317 236
16.	Banten	8 656 395	130 075	8 786 470	8 925 813	860 657	9 786 470
17.	B a l i	5 249 015	674 677	5 923 692	5 420 934	502 761	5 923 692
18.	Nusa Tenggara Barat	8 959 977	198 663	9 158 640	3 764 302	384 358	4 148 660
19.	Nusa Tenggara Timur	3 875 554	165 206	4 040 760	3 702 912	337 848	4 040 760
20.	Kalimantan Barat	4 494 429	9 089	4 503 518	4 320 619	182 899	4 503 518
21.	Kalimantan Tengah	3 548 505	39 350	3 587 855	3 174 706	413 149	3 587 855
22.	Kalimantan Selatan	5 218 111	382 578	5 600 689	5 178 715	421 974	5 600 689
23.	Kalimantan Timur	7 985 728	226 681	8 212 409	7 601 242	611 167	8 212 409
24.	Kalimantan Utara	2 332 987	735 234	3 068 221	2 556 534	511 687	3 068 221
25.	Sulawesi Utara	2 885 186	100 584	2 985 770	2 801 145	184 625	2 985 770
26.	Sulawesi Tengah	3 175 693	77 437	3 253 130	3 178 114	75 016	3 253 130
27.	Sulawesi Selatan	7 162 589	129 955	7 292 544	6 930 979	361 565	7 292 544
28.	Sulawesi Tenggara	2 809 721	450 595	3 260 316	2 663 870	596 446	3 260 316
29.	Gorontalo	1 584 308	68 396	1 652 704	1 595 895	56 809	1 652 704
30.	Sulawesi Barat	1 688 607	125 838	1 814 445	1 765 978	48 467	1 814 445
31.	M a l u k u	2 744 943	86 709	2 831 652	2 798 916	32 736	2 831 652
32.	Maluku Utara	2 022 258	38 870	2 061 128	2 023 862	37 266	2 061 128
33.	Papua Barat	6 740 387	516 616	7 257 003	6 464 612	792 391	7 257 003
34.	P a p u a	12 567 840	503 495	13 071 335	11 968 494	1 102 841	13 071 335
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>275 571 196</b>	<b>22 279 863</b>	<b>297 851 059</b>	<b>264 098 478</b>	<b>33 752 581</b>	<b>297 851 059</b>

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.d (juta rupiah), 2017

TABLE RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA  
(million rupiahs), 2017

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	14 291 939	441 761	14 733 700	14 733 700	0	14 733 700
2.	Sumatera Utara	12 170 582	942 102	13 112 684	13 034 684	78 000	13 112 684
3.	Sumatera Barat	6 110 977	135 000	6 245 977	6 225 977	20 000	6 245 977
4.	R i a u	8 859 018	2 149 132	11 008 150	11 008 150	0	11 008 150
5.	J a m b i	4 163 725	178 584	4 342 309	4 342 309	0	4 342 309
6.	Sumatera Selatan	8 587 020	25 000	8 612 020	6 942 881	1 669 139	8 612 020
7.	Bengkulu	3 041 325	321 633	3 362 958	3 344 958	18 000	3 362 958
8.	Lampung	6 723 785	84 143	6 807 928	6 802 928	5 000	6 807 928
9.	Bangka Belitung	2 355 579	315 544	2 671 123	2 666 123	5 000	2 671 123
10.	Kepulauan Riau	3 201 559	159 339	3 360 898	3 360 898	0	3 360 898
11.	DKI Jakarta	62 466 130	7 725 828	70 191 958	63 612 303	6 579 655	70 191 958
12.	Jawa Barat	30 540 901	2 200 000	32 740 901	32 429 026	311 875	32 740 901
13.	Jawa Tengah	23 467 518	200 000	23 667 518	23 363 518	304 000	23 667 518
14.	DI Yogyakarta	4 988 379	216 007	5 204 386	5 200 386	4 000	5 204 386
15.	Jawa Timur	27 932 994	75 000	28 647 994	28 239 661	408 333	28 647 994
16.	Banten	9 790 923	559 063	10 349 986	10 349 986	0	10 349 986
17.	B a l i	6 222 700	505 067	6 727 771	6 654 313	73 458	6 727 771
18.	Nusa Tenggara Barat	4 599 205	237 600	5 028 995	4 942 454	86 541	5 028 995
19.	Nusa Tenggara Timur	4 222 737	122 954	4 845 691	4 663 191	182 500	4 845 691
20.	Kalimantan Barat	5 095 395	85 000	5 180 395	5 065 395	115 000	5 180 395
21.	Kalimantan Tengah	4 086 898	62 365	4 149 263	3 984 273	164 990	4 149 263
22.	Kalimantan Selatan	5 703 186	65 000	5 768 186	5 736 686	31 500	5 768 186
23.	Kalimantan Timur	8 098 900	0	8 098 900	8 098 900	0	8 098 900
24.	Kalimantan Utara	1 978 280	905 000	2 883 280	2 733 280	150 000	2 883 280
25.	Sulawesi Utara	3 556 373	45 970	3 602 343	3 572 343	30 000	3 602 343
26.	Sulawesi Tengah	3 579 386	55 415	3 634 801	3 587 601	47 200	3 634 801
27.	Sulawesi Selatan	8 901 929	383 532	9 285 461	9 149 461	136 000	9 285 461
28.	Sulawesi Tenggara	3 545 198	161 378	3 706 576	3 597 160	109 416	3 706 576
29.	Gorontalo	1 831 693	10 415	1 842 108	1 839 532	2 576	1 842 108
30.	Sulawesi Barat	1 813 837	175 167	1 989 004	1 981 004	8 000	1 989 004
31.	M a l u k u	2 860 027	20 000	2 880 027	2 877 291	2 736	2 880 027
32.	Maluku Utara	2 864 176	120 000	2 984 176	2 649 166	335 010	2 984 176
33.	Papua Barat	6 888 868	365 093	7 253 961	7 198 961	55 000	7 253 961
34.	P a p u a	13 968 877	1 190 000	15 158 877	15 083 877	75 000	15 158 877
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>319 202 213</b>	<b>20 878 092</b>	<b>340 080 305</b>	<b>329 072 376</b>	<b>11 007 929</b>	<b>340 080 305</b>

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.a (juta rupiah), 2013  
 TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA  
 (million rupiahs), 2013

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	10 671 837	1 968 698	12 640 536	11 220 428	1 420 098	12 640 526
2.	Sumatera Utara	7 397 936	1 194 108	8 592 044	7 260 468	1 331 576	8 592 044
3.	Sumatera Barat	3 147 839	276 751	3 424 590	3 113 313	311 277	3 424 590
4.	Riau	6 994 646	1 978 313	8 972 959	7 525 283	1 447 676	8 972 959
5.	Jambi	2 886 305	690 767	3 577 072	3 010 741	566 331	3 577 072
6.	Sumatera Selatan	5 468 140	521 335	5 989 475	5 578 700	310 771	5 989 475
7.	Bengkulu	1 696 370	241 356	1 937 726	1 721 906	210 720	1 937 726
8.	Lampung	3 901 951	23 711	3 925 662	3 884 536	41 126	3 925 662
9.	Bangka Belitung	1 529 111	285 022	1 814 133	1 609 667	204 466	1 814 133
10.	Kepulauan Riau	2 843 718	514 289	3 358 007	2 715 832	642 175	3 358 007
11.	DKI Jakarta	39 517 544	9 463 721	48 981 265	38 301 502	10 679 763	48 981 265
12.	Jawa Barat	19 237 611	2 934 631	22 172 242	18 396 745	3 775 497	22 172 242
13.	Jawa Tengah	13 343 358	1 306 017	14 649 375	12 724 776	1 924 599	14 649 375
14.	DI Yogyakarta	2 583 057	403 200	2 986 257	2 509 643	476 614	2 986 257
15.	Jawa Timur	17 372 769	1 750 829	19 123 598	16 738 658	2 384 940	19 123 598
16.	Banten	6 230 230	581 814	6 812 044	5 295 139	1 516 905	6 812 044
17.	Bali	4 109 378	89 203	4 198 581	3 868 741	329 840	4 198 581
18.	Nusa Tenggara Barat	2 373 374	28 135	2 401 509	2 379 594	21 915	2 401 509
19.	Nusa Tenggara Timur	2 393 070	245 945	2 639 015	2 381 311	257 704	2 639 015
20.	Kalimantan Barat	3 266 314	222 258	3 488 572	3 296 607	187 965	3 488 572
21.	Kalimantan Tengah	3 009 096	559 334	3 568 430	2 928 725	639 705	3 568 430
22.	Kalimantan Selatan	4 350 811	1 203 925	5 554 736	4 750 074	804 662	5 554 736
23.	Kalimantan Timur	11 631 697	3 198 904	14 830 601	13 780 245	1 050 356	14 830 601
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	2 062 083	252 914	2 314 997	2 025 591	289 406	2 314 997
26.	Sulawesi Tengah	2 132 935	147 789	2 280 724	2 145 228	135 496	2 280 724
27.	Sulawesi Selatan	4 867 593	149 803	5 017 396	4 924 218	93 178	5 017 396
28.	Sulawesi Tenggara	1 972 560	203 680	2 176 240	1 812 945	363 295	2 176 240
29.	Gorontalo	1 052 626	101 033	1 153 659	1 050 817	102 842	1 153 659
30.	Sulawesi Barat	1 073 860	101 380	1 175 240	1 044 071	131 169	1 175 240
31.	Maluku	1 545 465	149 438	1 694 903	1 576 449	118 454	1 694 903
32.	Maluku Utara	1 315 899	125 225	1 441 124	1 387 593	53 531	1 441 124
33.	Papua Barat	5 637 697	372 575	6 010 272	4 512 430	1 497 842	6 010 272
34.	Papua	8 361 139	768 416	9 129 555	8 171 352	958 203	9 129 555
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>205 780 279</b>	<b>31 556 200</b>	<b>237 336 479</b>	<b>203 748 432</b>	<b>33 588 047</b>	<b>237 336 479</b>

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
(juta rupiah), 2013

TABEL

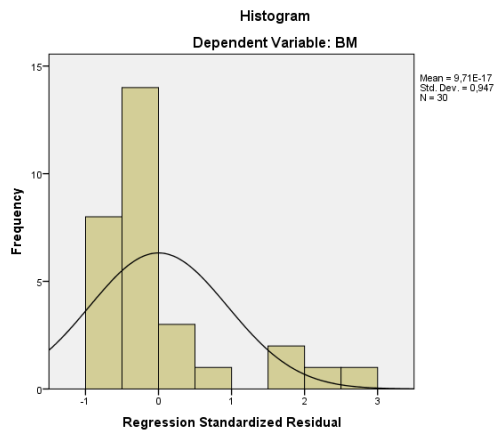


## LAMPIRAN OUTPUT SPSS

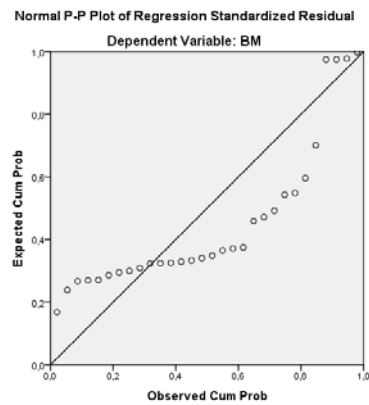
### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

##### Uji Normalitas Histogram



##### Uji Normalitas Grafik



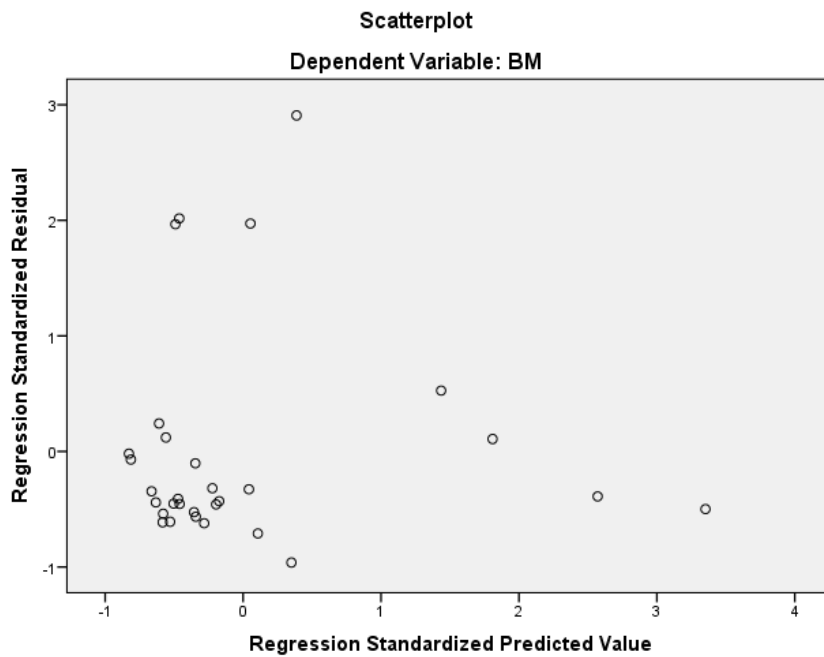
**b. Uji Multikolinieritas**

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,015		
PAD	,012	,839	1,192
DAU	,057	,985	1,015
SiLPA	,022	,847	1,180

a. Dependent Variable: BM

**Uji Heteroskedastisitas  
Scatterplot**





#### d. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727	1,718

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

#### 2. Uji Hipotesis

##### a. Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
	PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
	DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
	SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

a. Dependent Variable: BM

##### b. Uji f

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	285131972649504370000,000	3	95043990883168120000,000	9,331	,000 <sup>b</sup>
	Residual	264842771041255000000,000	26	10186260424663654000,000		
	Total	549974743690759400000,000	29			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

**c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

**d. Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
	PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
	DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
	SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

a. Dependent Variable: BM

IAIN JEMBER

## Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

Direproduksi oleh:

Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

dari sumber: <http://www.stanford.edu>

### Catatan-Catatan Reproduksi dan Cara Membaca Tabel:

1. Tabel DW ini direproduksi dengan merubah format tabel mengikuti format tabel DW yang umumnya dilampirkan pada buku-buku teks statistik/ekonometrik di Indonesia, agar lebih mudah dibaca dan diperbandingkan
2. Simbol 'k' pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas (penjelas), tidak termasuk variabel terikat.
3. Simbol 'n' pada tabel menunjukkan banyaknya observasi

IAIN JEMBER

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683	1.6063	1.7874
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690	1.6084	1.7878
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696	1.6105	1.7883
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702	1.6125	1.7887
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709	1.6145	1.7892
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715	1.6164	1.7896
121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7721	1.6184	1.7901
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7727	1.6203	1.7905
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7733	1.6222	1.7910
124	1.6906	1.7231	1.6743	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7739	1.6240	1.7914
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7745	1.6258	1.7919
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7751	1.6276	1.7923
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7757	1.6294	1.7928
128	1.6957	1.7271	1.6798	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7763	1.6312	1.7932
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7769	1.6329	1.7937
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7774	1.6346	1.7941
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7780	1.6363	1.7945
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7786	1.6380	1.7950
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7791	1.6397	1.7954
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7797	1.6413	1.7958
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7802	1.6429	1.7962
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7808	1.6445	1.7967

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
137	1.7062	1.7356	1.6914	1.7506	1.6765	1.7659	1.6613	1.7813	1.6461	1.7971
138	1.7073	1.7365	1.6926	1.7514	1.6778	1.7665	1.6628	1.7819	1.6476	1.7975
139	1.7084	1.7374	1.6938	1.7521	1.6791	1.7672	1.6642	1.7824	1.6491	1.7979
140	1.7095	1.7382	1.6950	1.7529	1.6804	1.7678	1.6656	1.7830	1.6507	1.7984
141	1.7106	1.7391	1.6962	1.7537	1.6817	1.7685	1.6670	1.7835	1.6522	1.7988
142	1.7116	1.7400	1.6974	1.7544	1.6829	1.7691	1.6684	1.7840	1.6536	1.7992
143	1.7127	1.7408	1.6985	1.7552	1.6842	1.7697	1.6697	1.7846	1.6551	1.7996
144	1.7137	1.7417	1.6996	1.7559	1.6854	1.7704	1.6710	1.7851	1.6565	1.8000
145	1.7147	1.7425	1.7008	1.7566	1.6866	1.7710	1.6724	1.7856	1.6580	1.8004
146	1.7157	1.7433	1.7019	1.7574	1.6878	1.7716	1.6737	1.7861	1.6594	1.8008
147	1.7167	1.7441	1.7030	1.7581	1.6890	1.7722	1.6750	1.7866	1.6608	1.8012
148	1.7177	1.7449	1.7041	1.7588	1.6902	1.7729	1.6762	1.7871	1.6622	1.8016
149	1.7187	1.7457	1.7051	1.7595	1.6914	1.7735	1.6775	1.7876	1.6635	1.8020
150	1.7197	1.7465	1.7062	1.7602	1.6926	1.7741	1.6788	1.7881	1.6649	1.8024
151	1.7207	1.7473	1.7072	1.7609	1.6937	1.7747	1.6800	1.7886	1.6662	1.8028
152	1.7216	1.7481	1.7083	1.7616	1.6948	1.7752	1.6812	1.7891	1.6675	1.8032
153	1.7226	1.7488	1.7093	1.7622	1.6959	1.7758	1.6824	1.7896	1.6688	1.8036
154	1.7235	1.7496	1.7103	1.7629	1.6971	1.7764	1.6836	1.7901	1.6701	1.8040
155	1.7244	1.7504	1.7114	1.7636	1.6982	1.7770	1.6848	1.7906	1.6714	1.8044
156	1.7253	1.7511	1.7123	1.7642	1.6992	1.7776	1.6860	1.7911	1.6727	1.8048
157	1.7262	1.7519	1.7133	1.7649	1.7003	1.7781	1.6872	1.7915	1.6739	1.8052
158	1.7271	1.7526	1.7143	1.7656	1.7014	1.7787	1.6883	1.7920	1.6751	1.8055
159	1.7280	1.7533	1.7153	1.7662	1.7024	1.7792	1.6895	1.7925	1.6764	1.8059
160	1.7289	1.7541	1.7163	1.7668	1.7035	1.7798	1.6906	1.7930	1.6776	1.8063
161	1.7298	1.7548	1.7172	1.7675	1.7045	1.7804	1.6917	1.7934	1.6788	1.8067
162	1.7306	1.7555	1.7182	1.7681	1.7055	1.7809	1.6928	1.7939	1.6800	1.8070
163	1.7315	1.7562	1.7191	1.7687	1.7066	1.7814	1.6939	1.7943	1.6811	1.8074
164	1.7324	1.7569	1.7200	1.7693	1.7075	1.7820	1.6950	1.7948	1.6823	1.8078
165	1.7332	1.7576	1.7209	1.7700	1.7085	1.7825	1.6960	1.7953	1.6834	1.8082
166	1.7340	1.7582	1.7218	1.7706	1.7095	1.7831	1.6971	1.7957	1.6846	1.8085
167	1.7348	1.7589	1.7227	1.7712	1.7105	1.7836	1.6982	1.7961	1.6857	1.8089
168	1.7357	1.7596	1.7236	1.7718	1.7115	1.7841	1.6992	1.7966	1.6868	1.8092
169	1.7365	1.7603	1.7245	1.7724	1.7124	1.7846	1.7002	1.7970	1.6879	1.8096
170	1.7373	1.7609	1.7254	1.7730	1.7134	1.7851	1.7012	1.7975	1.6890	1.8100
171	1.7381	1.7616	1.7262	1.7735	1.7143	1.7856	1.7023	1.7979	1.6901	1.8103
172	1.7389	1.7622	1.7271	1.7741	1.7152	1.7861	1.7033	1.7983	1.6912	1.8107
173	1.7396	1.7629	1.7279	1.7747	1.7162	1.7866	1.7042	1.7988	1.6922	1.8110
174	1.7404	1.7635	1.7288	1.7753	1.7171	1.7872	1.7052	1.7992	1.6933	1.8114
175	1.7412	1.7642	1.7296	1.7758	1.7180	1.7877	1.7062	1.7996	1.6943	1.8117
176	1.7420	1.7648	1.7305	1.7764	1.7189	1.7881	1.7072	1.8000	1.6954	1.8121
177	1.7427	1.7654	1.7313	1.7769	1.7197	1.7886	1.7081	1.8005	1.6964	1.8124
178	1.7435	1.7660	1.7321	1.7775	1.7206	1.7891	1.7091	1.8009	1.6974	1.8128
179	1.7442	1.7667	1.7329	1.7780	1.7215	1.7896	1.7100	1.8013	1.6984	1.8131
180	1.7449	1.7673	1.7337	1.7786	1.7224	1.7901	1.7109	1.8017	1.6994	1.8135
181	1.7457	1.7679	1.7345	1.7791	1.7232	1.7906	1.7118	1.8021	1.7004	1.8138
182	1.7464	1.7685	1.7353	1.7797	1.7241	1.7910	1.7128	1.8025	1.7014	1.8141
183	1.7471	1.7691	1.7360	1.7802	1.7249	1.7915	1.7137	1.8029	1.7023	1.8145
184	1.7478	1.7697	1.7368	1.7807	1.7257	1.7920	1.7146	1.8033	1.7033	1.8148
185	1.7485	1.7702	1.7376	1.7813	1.7266	1.7924	1.7155	1.8037	1.7042	1.8151
186	1.7492	1.7708	1.7384	1.7818	1.7274	1.7929	1.7163	1.8041	1.7052	1.8155
187	1.7499	1.7714	1.7391	1.7823	1.7282	1.7933	1.7172	1.8045	1.7061	1.8158
188	1.7506	1.7720	1.7398	1.7828	1.7290	1.7938	1.7181	1.8049	1.7070	1.8161
189	1.7513	1.7725	1.7406	1.7833	1.7298	1.7942	1.7189	1.8053	1.7080	1.8165
190	1.7520	1.7731	1.7413	1.7838	1.7306	1.7947	1.7198	1.8057	1.7089	1.8168
191	1.7526	1.7737	1.7420	1.7843	1.7314	1.7951	1.7206	1.8061	1.7098	1.8171
192	1.7533	1.7742	1.7428	1.7848	1.7322	1.7956	1.7215	1.8064	1.7107	1.8174
193	1.7540	1.7748	1.7435	1.7853	1.7329	1.7960	1.7223	1.8068	1.7116	1.8178
194	1.7546	1.7753	1.7442	1.7858	1.7337	1.7965	1.7231	1.8072	1.7124	1.8181
195	1.7553	1.7759	1.7449	1.7863	1.7345	1.7969	1.7239	1.8076	1.7133	1.8184
196	1.7559	1.7764	1.7456	1.7868	1.7352	1.7973	1.7247	1.8079	1.7142	1.8187
197	1.7566	1.7769	1.7463	1.7873	1.7360	1.7977	1.7255	1.8083	1.7150	1.8190
198	1.7572	1.7775	1.7470	1.7878	1.7367	1.7982	1.7263	1.8087	1.7159	1.8193
199	1.7578	1.7780	1.7477	1.7882	1.7374	1.7986	1.7271	1.8091	1.7167	1.8196
200	1.7584	1.7785	1.7483	1.7887	1.7382	1.7990	1.7279	1.8094	1.7176	1.8199

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
11	0.2025	3.0045								
12	0.2681	2.8320	0.1714	3.1494						
13	0.3278	2.6920	0.2305	2.9851	0.1469	3.2658				
14	0.3890	2.5716	0.2856	2.8477	0.2001	3.1112	0.1273	3.3604		
15	0.4471	2.4715	0.3429	2.7270	0.2509	2.9787	0.1753	3.2160	0.1113	3.4382
16	0.5022	2.3881	0.3981	2.6241	0.3043	2.8601	0.2221	3.0895	0.1548	3.3039
17	0.5542	2.3176	0.4511	2.5366	0.3564	2.7569	0.2718	2.9746	0.1978	3.1840
18	0.6030	2.2575	0.5016	2.4612	0.4070	2.6675	0.3208	2.8727	0.2441	3.0735
19	0.6487	2.2061	0.5494	2.3960	0.4557	2.5894	0.3689	2.7831	0.2901	2.9740
20	0.6915	2.1619	0.5945	2.3394	0.5022	2.5208	0.4156	2.7037	0.3357	2.8854
21	0.7315	2.1236	0.6371	2.2899	0.5465	2.4605	0.4606	2.6332	0.3804	2.8059
22	0.7690	2.0902	0.6772	2.2465	0.5884	2.4072	0.5036	2.5705	0.4236	2.7345
23	0.8041	2.0609	0.7149	2.2082	0.6282	2.3599	0.5448	2.5145	0.4654	2.6704
24	0.8371	2.0352	0.7505	2.1743	0.6659	2.3177	0.5840	2.4643	0.5055	2.6126
25	0.8680	2.0125	0.7840	2.1441	0.7015	2.2801	0.6213	2.4192	0.5440	2.5604
26	0.8972	1.9924	0.8156	2.1172	0.7353	2.2463	0.6568	2.3786	0.5808	2.5132
27	0.9246	1.9745	0.8455	2.0931	0.7673	2.2159	0.6906	2.3419	0.6159	2.4703
28	0.9505	1.9585	0.8737	2.0715	0.7975	2.1884	0.7227	2.3086	0.6495	2.4312
29	0.9750	1.9442	0.9004	2.0520	0.8263	2.1636	0.7532	2.2784	0.6815	2.3956
30	0.9982	1.9313	0.9256	2.0343	0.8535	2.1410	0.7822	2.2508	0.7120	2.3631
31	1.0201	1.9198	0.9496	2.0183	0.8794	2.1205	0.8098	2.2256	0.7412	2.3332
32	1.0409	1.9093	0.9724	2.0038	0.9040	2.1017	0.8361	2.2026	0.7690	2.3058
33	1.0607	1.8999	0.9940	1.9906	0.9274	2.0846	0.8612	2.1814	0.7955	2.2806
34	1.0794	1.8913	1.0146	1.9785	0.9497	2.0688	0.8851	2.1619	0.8209	2.2574
35	1.0974	1.8835	1.0342	1.9674	0.9710	2.0544	0.9079	2.1440	0.8452	2.2359
36	1.1144	1.8764	1.0529	1.9573	0.9913	2.0410	0.9297	2.1274	0.8684	2.2159
37	1.1307	1.8700	1.0708	1.9480	1.0107	2.0288	0.9505	2.1120	0.8906	2.1975
38	1.1463	1.8641	1.0879	1.9394	1.0292	2.0174	0.9705	2.0978	0.9118	2.1803
39	1.1612	1.8587	1.1042	1.9315	1.0469	2.0069	0.9895	2.0846	0.9322	2.1644
40	1.1754	1.8538	1.1198	1.9243	1.0639	1.9972	1.0078	2.0723	0.9517	2.1495
41	1.1891	1.8493	1.1348	1.9175	1.0802	1.9881	1.0254	2.0609	0.9705	2.1356
42	1.2022	1.8451	1.1492	1.9113	1.0958	1.9797	1.0422	2.0502	0.9885	2.1226
43	1.2148	1.8413	1.1630	1.9055	1.1108	1.9719	1.0584	2.0403	1.0058	2.1105
44	1.2269	1.8378	1.1762	1.9002	1.1252	1.9646	1.0739	2.0310	1.0225	2.0991
45	1.2385	1.8346	1.1890	1.8952	1.1391	1.9578	1.0889	2.0222	1.0385	2.0884
46	1.2497	1.8317	1.2013	1.8906	1.1524	1.9514	1.1033	2.0140	1.0539	2.0783
47	1.2605	1.8290	1.2131	1.8863	1.1653	1.9455	1.1171	2.0064	1.0687	2.0689
48	1.2709	1.8265	1.2245	1.8823	1.1776	1.9399	1.1305	1.9992	1.0831	2.0600
49	1.2809	1.8242	1.2355	1.8785	1.1896	1.9346	1.1434	1.9924	1.0969	2.0516
50	1.2906	1.8220	1.2461	1.8750	1.2011	1.9297	1.1558	1.9860	1.1102	2.0437
51	1.3000	1.8201	1.2563	1.8718	1.2122	1.9251	1.1678	1.9799	1.1231	2.0362
52	1.3090	1.8183	1.2662	1.8687	1.2230	1.9208	1.1794	1.9743	1.1355	2.0291
53	1.3177	1.8166	1.2758	1.8659	1.2334	1.9167	1.1906	1.9689	1.1476	2.0224
54	1.3262	1.8151	1.2851	1.8632	1.2435	1.9128	1.2015	1.9638	1.1592	2.0161
55	1.3344	1.8137	1.2940	1.8607	1.2532	1.9092	1.2120	1.9590	1.1705	2.0101
56	1.3424	1.8124	1.3027	1.8584	1.2626	1.9058	1.2222	1.9545	1.1814	2.0044
57	1.3501	1.8112	1.3111	1.8562	1.2718	1.9026	1.2320	1.9502	1.1920	1.9990
58	1.3576	1.8101	1.3193	1.8542	1.2806	1.8995	1.2416	1.9461	1.2022	1.9938
59	1.3648	1.8091	1.3272	1.8523	1.2892	1.8967	1.2509	1.9422	1.2122	1.9889
60	1.3719	1.8082	1.3349	1.8505	1.2976	1.8939	1.2599	1.9386	1.2218	1.9843
61	1.3787	1.8073	1.3424	1.8488	1.3057	1.8914	1.2686	1.9351	1.2312	1.9798
62	1.3854	1.8066	1.3497	1.8472	1.3136	1.8889	1.2771	1.9318	1.2403	1.9756
63	1.3918	1.8058	1.3567	1.8457	1.3212	1.8866	1.2853	1.9286	1.2492	1.9716
64	1.3981	1.8052	1.3636	1.8443	1.3287	1.8844	1.2934	1.9256	1.2578	1.9678
65	1.4043	1.8046	1.3703	1.8430	1.3359	1.8824	1.3012	1.9228	1.2661	1.9641
66	1.4102	1.8041	1.3768	1.8418	1.3429	1.8804	1.3087	1.9200	1.2742	1.9606
67	1.4160	1.8036	1.3831	1.8406	1.3498	1.8786	1.3161	1.9174	1.2822	1.9572
68	1.4217	1.8032	1.3893	1.8395	1.3565	1.8768	1.3233	1.9150	1.2899	1.9540
69	1.4272	1.8028	1.3953	1.8385	1.3630	1.8751	1.3303	1.9126	1.2974	1.9510
70	1.4326	1.8025	1.4012	1.8375	1.3693	1.8735	1.3372	1.9104	1.3047	1.9481
71	1.4379	1.8021	1.4069	1.8366	1.3755	1.8720	1.3438	1.9082	1.3118	1.9452
72	1.4430	1.8019	1.4125	1.8358	1.3815	1.8706	1.3503	1.9062	1.3188	1.9426
73	1.4480	1.8016	1.4179	1.8350	1.3874	1.8692	1.3566	1.9042	1.3256	1.9400
74	1.4529	1.8014	1.4232	1.8343	1.3932	1.8679	1.3628	1.9024	1.3322	1.9375
75	1.4577	1.8013	1.4284	1.8336	1.3988	1.8667	1.3688	1.9006	1.3386	1.9352

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
76	1.4623	1.8011	1.4335	1.8330	1.4043	1.8655	1.3747	1.8989	1.3449	1.9329
77	1.4669	1.8010	1.4384	1.8324	1.4096	1.8644	1.3805	1.8972	1.3511	1.9307
78	1.4714	1.8009	1.4433	1.8318	1.4148	1.8634	1.3861	1.8957	1.3571	1.9286
79	1.4757	1.8009	1.4480	1.8313	1.4199	1.8624	1.3916	1.8942	1.3630	1.9266
80	1.4800	1.8008	1.4526	1.8308	1.4250	1.8614	1.3970	1.8927	1.3687	1.9247
81	1.4842	1.8008	1.4572	1.8303	1.4298	1.8605	1.4022	1.8914	1.3743	1.9228
82	1.4883	1.8008	1.4616	1.8299	1.4346	1.8596	1.4074	1.8900	1.3798	1.9211
83	1.4923	1.8008	1.4659	1.8295	1.4393	1.8588	1.4124	1.8888	1.3852	1.9193
84	1.4962	1.8008	1.4702	1.8291	1.4439	1.8580	1.4173	1.8876	1.3905	1.9177
85	1.5000	1.8009	1.4743	1.8288	1.4484	1.8573	1.4221	1.8864	1.3956	1.9161
86	1.5038	1.8010	1.4784	1.8285	1.4528	1.8566	1.4268	1.8853	1.4007	1.9146
87	1.5075	1.8010	1.4824	1.8282	1.4571	1.8559	1.4315	1.8842	1.4056	1.9131
88	1.5111	1.8011	1.4863	1.8279	1.4613	1.8553	1.4360	1.8832	1.4104	1.9117
89	1.5147	1.8012	1.4902	1.8277	1.4654	1.8547	1.4404	1.8822	1.4152	1.9103
90	1.5181	1.8014	1.4939	1.8275	1.4695	1.8541	1.4448	1.8813	1.4198	1.9090
91	1.5215	1.8015	1.4976	1.8273	1.4735	1.8536	1.4490	1.8804	1.4244	1.9077
92	1.5249	1.8016	1.5013	1.8271	1.4774	1.8530	1.4532	1.8795	1.4288	1.9065
93	1.5282	1.8018	1.5048	1.8269	1.4812	1.8526	1.4573	1.8787	1.4332	1.9053
94	1.5314	1.8019	1.5083	1.8268	1.4849	1.8521	1.4613	1.8779	1.4375	1.9042
95	1.5346	1.8021	1.5117	1.8266	1.4886	1.8516	1.4653	1.8772	1.4417	1.9031
96	1.5377	1.8023	1.5151	1.8265	1.4922	1.8512	1.4691	1.8764	1.4458	1.9021
97	1.5407	1.8025	1.5184	1.8264	1.4958	1.8508	1.4729	1.8757	1.4499	1.9011
98	1.5437	1.8027	1.5216	1.8263	1.4993	1.8505	1.4767	1.8750	1.4539	1.9001
99	1.5467	1.8029	1.5248	1.8263	1.5027	1.8501	1.4803	1.8744	1.4578	1.8991
100	1.5496	1.8031	1.5279	1.8262	1.5060	1.8498	1.4839	1.8738	1.4616	1.8982
101	1.5524	1.8033	1.5310	1.8261	1.5093	1.8495	1.4875	1.8732	1.4654	1.8973
102	1.5552	1.8035	1.5340	1.8261	1.5126	1.8491	1.4909	1.8726	1.4691	1.8965
103	1.5580	1.8037	1.5370	1.8261	1.5158	1.8489	1.4944	1.8721	1.4727	1.8956
104	1.5607	1.8040	1.5399	1.8261	1.5189	1.8486	1.4977	1.8715	1.4763	1.8948
105	1.5634	1.8042	1.5428	1.8261	1.5220	1.8483	1.5010	1.8710	1.4798	1.8941
106	1.5660	1.8044	1.5456	1.8261	1.5250	1.8481	1.5043	1.8705	1.4833	1.8933
107	1.5686	1.8047	1.5484	1.8261	1.5280	1.8479	1.5074	1.8701	1.4867	1.8926
108	1.5711	1.8049	1.5511	1.8261	1.5310	1.8477	1.5106	1.8696	1.4900	1.8919
109	1.5736	1.8052	1.5538	1.8261	1.5338	1.8475	1.5137	1.8692	1.4933	1.8913
110	1.5761	1.8054	1.5565	1.8262	1.5367	1.8473	1.5167	1.8688	1.4965	1.8906
111	1.5785	1.8057	1.5591	1.8262	1.5395	1.8471	1.5197	1.8684	1.4997	1.8900
112	1.5809	1.8060	1.5616	1.8263	1.5422	1.8470	1.5226	1.8680	1.5028	1.8894
113	1.5832	1.8062	1.5642	1.8264	1.5449	1.8468	1.5255	1.8676	1.5059	1.8888
114	1.5855	1.8065	1.5667	1.8264	1.5476	1.8467	1.5284	1.8673	1.5089	1.8882
115	1.5878	1.8068	1.5691	1.8265	1.5502	1.8466	1.5312	1.8670	1.5119	1.8877
116	1.5901	1.8070	1.5715	1.8266	1.5528	1.8465	1.5339	1.8667	1.5148	1.8872
117	1.5923	1.8073	1.5739	1.8267	1.5554	1.8463	1.5366	1.8663	1.5177	1.8867
118	1.5945	1.8076	1.5763	1.8268	1.5579	1.8463	1.5393	1.8661	1.5206	1.8862
119	1.5966	1.8079	1.5786	1.8269	1.5603	1.8462	1.5420	1.8658	1.5234	1.8857
120	1.5987	1.8082	1.5808	1.8270	1.5628	1.8461	1.5445	1.8655	1.5262	1.8852
121	1.6008	1.8084	1.5831	1.8271	1.5652	1.8460	1.5471	1.8653	1.5289	1.8848
122	1.6029	1.8087	1.5853	1.8272	1.5675	1.8459	1.5496	1.8650	1.5316	1.8844
123	1.6049	1.8090	1.5875	1.8273	1.5699	1.8459	1.5521	1.8648	1.5342	1.8839
124	1.6069	1.8093	1.5896	1.8274	1.5722	1.8458	1.5546	1.8646	1.5368	1.8835
125	1.6089	1.8096	1.5917	1.8276	1.5744	1.8458	1.5570	1.8644	1.5394	1.8832
126	1.6108	1.8099	1.5938	1.8277	1.5767	1.8458	1.5594	1.8641	1.5419	1.8828
127	1.6127	1.8102	1.5959	1.8278	1.5789	1.8458	1.5617	1.8639	1.5444	1.8824
128	1.6146	1.8105	1.5979	1.8280	1.5811	1.8457	1.5640	1.8638	1.5468	1.8821
129	1.6165	1.8107	1.5999	1.8281	1.5832	1.8457	1.5663	1.8636	1.5493	1.8817
130	1.6184	1.8110	1.6019	1.8282	1.5853	1.8457	1.5686	1.8634	1.5517	1.8814
131	1.6202	1.8113	1.6039	1.8284	1.5874	1.8457	1.5708	1.8633	1.5540	1.8811
132	1.6220	1.8116	1.6058	1.8285	1.5895	1.8457	1.5730	1.8631	1.5564	1.8808
133	1.6238	1.8119	1.6077	1.8287	1.5915	1.8457	1.5751	1.8630	1.5586	1.8805
134	1.6255	1.8122	1.6096	1.8288	1.5935	1.8457	1.5773	1.8629	1.5609	1.8802
135	1.6272	1.8125	1.6114	1.8290	1.5955	1.8457	1.5794	1.8627	1.5632	1.8799
136	1.6289	1.8128	1.6133	1.8292	1.5974	1.8458	1.5815	1.8626	1.5654	1.8797
137	1.6306	1.8131	1.6151	1.8293	1.5994	1.8458	1.5835	1.8625	1.5675	1.8794
138	1.6323	1.8134	1.6169	1.8295	1.6013	1.8458	1.5855	1.8624	1.5697	1.8792
139	1.6340	1.8137	1.6186	1.8297	1.6031	1.8459	1.5875	1.8623	1.5718	1.8789
140	1.6356	1.8140	1.6204	1.8298	1.6050	1.8459	1.5895	1.8622	1.5739	1.8787
141	1.6372	1.8143	1.6221	1.8300	1.6068	1.8459	1.5915	1.8621	1.5760	1.8785



Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
142	1.6388	1.8146	1.6238	1.8302	1.6087	1.8460	1.5934	1.8620	1.5780	1.8783
143	1.6403	1.8149	1.6255	1.8303	1.6104	1.8460	1.5953	1.8619	1.5800	1.8781
144	1.6419	1.8151	1.6271	1.8305	1.6122	1.8461	1.5972	1.8619	1.5820	1.8779
145	1.6434	1.8154	1.6288	1.8307	1.6140	1.8462	1.5990	1.8618	1.5840	1.8777
146	1.6449	1.8157	1.6304	1.8309	1.6157	1.8462	1.6009	1.8618	1.5859	1.8775
147	1.6464	1.8160	1.6320	1.8310	1.6174	1.8463	1.6027	1.8617	1.5878	1.8773
148	1.6479	1.8163	1.6336	1.8312	1.6191	1.8463	1.6045	1.8617	1.5897	1.8772
149	1.6494	1.8166	1.6351	1.8314	1.6207	1.8464	1.6062	1.8616	1.5916	1.8770
150	1.6508	1.8169	1.6367	1.8316	1.6224	1.8465	1.6080	1.8616	1.5935	1.8768
151	1.6523	1.8172	1.6382	1.8318	1.6240	1.8466	1.6097	1.8615	1.5953	1.8767
152	1.6537	1.8175	1.6397	1.8320	1.6256	1.8466	1.6114	1.8615	1.5971	1.8765
153	1.6551	1.8178	1.6412	1.8322	1.6272	1.8467	1.6131	1.8615	1.5989	1.8764
154	1.6565	1.8181	1.6427	1.8323	1.6288	1.8468	1.6148	1.8614	1.6007	1.8763
155	1.6578	1.8184	1.6441	1.8325	1.6303	1.8469	1.6164	1.8614	1.6024	1.8761
156	1.6592	1.8186	1.6456	1.8327	1.6319	1.8470	1.6181	1.8614	1.6041	1.8760
157	1.6605	1.8189	1.6470	1.8329	1.6334	1.8471	1.6197	1.8614	1.6058	1.8759
158	1.6618	1.8192	1.6484	1.8331	1.6349	1.8472	1.6213	1.8614	1.6075	1.8758
159	1.6631	1.8195	1.6498	1.8333	1.6364	1.8472	1.6229	1.8614	1.6092	1.8757
160	1.6644	1.8198	1.6512	1.8335	1.6379	1.8473	1.6244	1.8614	1.6108	1.8756
161	1.6657	1.8201	1.6526	1.8337	1.6393	1.8474	1.6260	1.8614	1.6125	1.8755
162	1.6670	1.8204	1.6539	1.8339	1.6408	1.8475	1.6275	1.8614	1.6141	1.8754
163	1.6683	1.8207	1.6553	1.8341	1.6422	1.8476	1.6290	1.8614	1.6157	1.8753
164	1.6695	1.8209	1.6566	1.8343	1.6436	1.8478	1.6305	1.8614	1.6173	1.8752
165	1.6707	1.8212	1.6579	1.8345	1.6450	1.8479	1.6320	1.8614	1.6188	1.8751
166	1.6720	1.8215	1.6592	1.8346	1.6464	1.8480	1.6334	1.8614	1.6204	1.8751
167	1.6732	1.8218	1.6605	1.8348	1.6477	1.8481	1.6349	1.8615	1.6219	1.8750
168	1.6743	1.8221	1.6618	1.8350	1.6491	1.8482	1.6363	1.8615	1.6234	1.8749
169	1.6755	1.8223	1.6630	1.8352	1.6504	1.8483	1.6377	1.8615	1.6249	1.8748
170	1.6767	1.8226	1.6643	1.8354	1.6517	1.8484	1.6391	1.8615	1.6264	1.8748
171	1.6779	1.8229	1.6655	1.8356	1.6531	1.8485	1.6405	1.8615	1.6279	1.8747
172	1.6790	1.8232	1.6667	1.8358	1.6544	1.8486	1.6419	1.8616	1.6293	1.8747
173	1.6801	1.8235	1.6679	1.8360	1.6556	1.8487	1.6433	1.8616	1.6308	1.8746
174	1.6813	1.8237	1.6691	1.8362	1.6569	1.8489	1.6446	1.8617	1.6322	1.8746
175	1.6824	1.8240	1.6703	1.8364	1.6582	1.8490	1.6459	1.8617	1.6336	1.8745
176	1.6835	1.8243	1.6715	1.8366	1.6594	1.8491	1.6472	1.8617	1.6350	1.8745
177	1.6846	1.8246	1.6727	1.8368	1.6606	1.8492	1.6486	1.8618	1.6364	1.8744
178	1.6857	1.8248	1.6738	1.8370	1.6619	1.8493	1.6499	1.8618	1.6377	1.8744
179	1.6867	1.8251	1.6750	1.8372	1.6631	1.8495	1.6511	1.8618	1.6391	1.8744
180	1.6878	1.8254	1.6761	1.8374	1.6643	1.8496	1.6524	1.8619	1.6404	1.8744
181	1.6888	1.8256	1.6772	1.8376	1.6655	1.8497	1.6537	1.8619	1.6418	1.8743
182	1.6899	1.8259	1.6783	1.8378	1.6667	1.8498	1.6549	1.8620	1.6431	1.8743
183	1.6909	1.8262	1.6794	1.8380	1.6678	1.8500	1.6561	1.8621	1.6444	1.8743
184	1.6919	1.8264	1.6805	1.8382	1.6690	1.8501	1.6574	1.8621	1.6457	1.8743
185	1.6930	1.8267	1.6816	1.8384	1.6701	1.8502	1.6586	1.8622	1.6469	1.8742
186	1.6940	1.8270	1.6826	1.8386	1.6712	1.8503	1.6598	1.8622	1.6482	1.8742
187	1.6950	1.8272	1.6837	1.8388	1.6724	1.8505	1.6610	1.8623	1.6495	1.8742
188	1.6959	1.8275	1.6848	1.8390	1.6735	1.8506	1.6621	1.8623	1.6507	1.8742
189	1.6969	1.8278	1.6858	1.8392	1.6746	1.8507	1.6633	1.8624	1.6519	1.8742
190	1.6979	1.8280	1.6868	1.8394	1.6757	1.8509	1.6644	1.8625	1.6531	1.8742
191	1.6988	1.8283	1.6878	1.8396	1.6768	1.8510	1.6656	1.8625	1.6543	1.8742
192	1.6998	1.8285	1.6889	1.8398	1.6778	1.8511	1.6667	1.8626	1.6555	1.8742
193	1.7007	1.8288	1.6899	1.8400	1.6789	1.8513	1.6678	1.8627	1.6567	1.8742
194	1.7017	1.8291	1.6909	1.8402	1.6799	1.8514	1.6690	1.8627	1.6579	1.8742
195	1.7026	1.8293	1.6918	1.8404	1.6810	1.8515	1.6701	1.8628	1.6591	1.8742
196	1.7035	1.8296	1.6928	1.8406	1.6820	1.8516	1.6712	1.8629	1.6602	1.8742
197	1.7044	1.8298	1.6938	1.8407	1.6831	1.8518	1.6722	1.8629	1.6614	1.8742
198	1.7053	1.8301	1.6947	1.8409	1.6841	1.8519	1.6733	1.8630	1.6625	1.8742
199	1.7062	1.8303	1.6957	1.8411	1.6851	1.8521	1.6744	1.8631	1.6636	1.8742
200	1.7071	1.8306	1.6966	1.8413	1.6861	1.8522	1.6754	1.8632	1.6647	1.8742

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
16	0.0981	3.5029								
17	0.1376	3.3782	0.0871	3.5572						
18	0.1773	3.2650	0.1232	3.4414	0.0779	3.6032				
19	0.2203	3.1593	0.1598	3.3348	0.1108	3.4957	0.0700	3.6424		
20	0.2635	3.0629	0.1998	3.2342	0.1447	3.3954	0.1002	3.5425	0.0633	3.6762
21	0.3067	2.9760	0.2403	3.1413	0.1820	3.2998	0.1317	3.4483	0.0911	3.5832
22	0.3493	2.8973	0.2812	3.0566	0.2200	3.2106	0.1664	3.3576	0.1203	3.4946
23	0.3908	2.8259	0.3217	2.9792	0.2587	3.1285	0.2022	3.2722	0.1527	3.4087
24	0.4312	2.7611	0.3616	2.9084	0.2972	3.0528	0.2387	3.1929	0.1864	3.3270
25	0.4702	2.7023	0.4005	2.8436	0.3354	2.9830	0.2754	3.1191	0.2209	3.2506
26	0.5078	2.6488	0.4383	2.7844	0.3728	2.9187	0.3118	3.0507	0.2558	3.1790
27	0.5439	2.6000	0.4748	2.7301	0.4093	2.8595	0.3478	2.9872	0.2906	3.1122
28	0.5785	2.5554	0.5101	2.6803	0.4449	2.8049	0.3831	2.9284	0.3252	3.0498
29	0.6117	2.5146	0.5441	2.6345	0.4793	2.7545	0.4175	2.8738	0.3592	2.9916
30	0.6435	2.4771	0.5769	2.5923	0.5126	2.7079	0.4511	2.8232	0.3926	2.9374
31	0.6739	2.4427	0.6083	2.5535	0.5447	2.6648	0.4836	2.7762	0.4251	2.8868
32	0.7030	2.4110	0.6385	2.5176	0.5757	2.6249	0.5151	2.7325	0.4569	2.8396
33	0.7309	2.3818	0.6675	2.4844	0.6056	2.5879	0.5456	2.6918	0.4877	2.7956
34	0.7576	2.3547	0.6953	2.4536	0.6343	2.5535	0.5750	2.6539	0.5176	2.7544
35	0.7831	2.3297	0.7220	2.4250	0.6620	2.5215	0.6035	2.6186	0.5466	2.7159
36	0.8076	2.3064	0.7476	2.3984	0.6886	2.4916	0.6309	2.5856	0.5746	2.6799
37	0.8311	2.2848	0.7722	2.3737	0.7142	2.4638	0.6573	2.5547	0.6018	2.6461
38	0.8536	2.2647	0.7958	2.3506	0.7389	2.4378	0.6828	2.5258	0.6280	2.6144
39	0.8751	2.2459	0.8185	2.3290	0.7626	2.4134	0.7074	2.4987	0.6533	2.5847
40	0.8959	2.2284	0.8404	2.3089	0.7854	2.3906	0.7312	2.4733	0.6778	2.5567
41	0.9158	2.2120	0.8613	2.2900	0.8074	2.3692	0.7540	2.4494	0.7015	2.5304
42	0.9349	2.1967	0.8815	2.2723	0.8285	2.3491	0.7761	2.4269	0.7243	2.5056
43	0.9533	2.1823	0.9009	2.2556	0.8489	2.3302	0.7973	2.4058	0.7464	2.4822
44	0.9710	2.1688	0.9196	2.2400	0.8686	2.3124	0.8179	2.3858	0.7677	2.4601
45	0.9880	2.1561	0.9377	2.2252	0.8875	2.2956	0.8377	2.3670	0.7883	2.4392
46	1.0044	2.1442	0.9550	2.2113	0.9058	2.2797	0.8568	2.3492	0.8083	2.4195
47	1.0203	2.1329	0.9718	2.1982	0.9234	2.2648	0.8753	2.3324	0.8275	2.4008
48	1.0355	2.1223	0.9879	2.1859	0.9405	2.2506	0.8931	2.3164	0.8461	2.3831
49	1.0502	2.1122	1.0035	2.1742	0.9569	2.2372	0.9104	2.3013	0.8642	2.3663
50	1.0645	2.1028	1.0186	2.1631	0.9728	2.2245	0.9271	2.2870	0.8816	2.3503
51	1.0782	2.0938	1.0332	2.1526	0.9882	2.2125	0.9432	2.2734	0.8985	2.3352
52	1.0915	2.0853	1.0473	2.1426	1.0030	2.2011	0.9589	2.2605	0.9148	2.3207
53	1.1043	2.0772	1.0609	2.1332	1.0174	2.1902	0.9740	2.2482	0.9307	2.3070
54	1.1167	2.0696	1.0741	2.1242	1.0314	2.1799	0.9886	2.2365	0.9460	2.2939
55	1.1288	2.0623	1.0869	2.1157	1.0449	2.1700	1.0028	2.2253	0.9609	2.2815
56	1.1404	2.0554	1.0992	2.1076	1.0579	2.1607	1.0166	2.2147	0.9753	2.2696
57	1.1517	2.0489	1.1112	2.0998	1.0706	2.1518	1.0299	2.2046	0.9893	2.2582
58	1.1626	2.0426	1.1228	2.0925	1.0829	2.1432	1.0429	2.1949	1.0029	2.2474
59	1.1733	2.0367	1.1341	2.0854	1.0948	2.1351	1.0555	2.1856	1.0161	2.2370
60	1.1835	2.0310	1.1451	2.0787	1.1064	2.1273	1.0676	2.1768	1.0289	2.2271
61	1.1936	2.0256	1.1557	2.0723	1.1176	2.1199	1.0795	2.1684	1.0413	2.2176
62	1.2033	2.0204	1.1660	2.0662	1.1286	2.1128	1.0910	2.1603	1.0534	2.2084
63	1.2127	2.0155	1.1760	2.0604	1.1392	2.1060	1.1022	2.1525	1.0651	2.1997
64	1.2219	2.0108	1.1858	2.0548	1.1495	2.0995	1.1131	2.1451	1.0766	2.1913
65	1.2308	2.0063	1.1953	2.0494	1.1595	2.0933	1.1236	2.1380	1.0877	2.1833
66	1.2395	2.0020	1.2045	2.0443	1.1693	2.0873	1.1339	2.1311	1.0985	2.1756
67	1.2479	1.9979	1.2135	2.0393	1.1788	2.0816	1.1440	2.1245	1.1090	2.1682
68	1.2561	1.9939	1.2222	2.0346	1.1880	2.0761	1.1537	2.1182	1.1193	2.1611
69	1.2642	1.9901	1.2307	2.0301	1.1970	2.0708	1.1632	2.1122	1.1293	2.1542
70	1.2720	1.9865	1.2390	2.0257	1.2058	2.0657	1.1725	2.1063	1.1390	2.1476
71	1.2796	1.9830	1.2471	2.0216	1.2144	2.0608	1.1815	2.1007	1.1485	2.1413
72	1.2870	1.9797	1.2550	2.0176	1.2227	2.0561	1.1903	2.0953	1.1578	2.1352
73	1.2942	1.9765	1.2626	2.0137	1.2308	2.0516	1.1989	2.0901	1.1668	2.1293
74	1.3013	1.9734	1.2701	2.0100	1.2388	2.0472	1.2073	2.0851	1.1756	2.1236
75	1.3082	1.9705	1.2774	2.0064	1.2465	2.0430	1.2154	2.0803	1.1842	2.1181
76	1.3149	1.9676	1.2846	2.0030	1.2541	2.0390	1.2234	2.0756	1.1926	2.1128
77	1.3214	1.9649	1.2916	1.9997	1.2615	2.0351	1.2312	2.0711	1.2008	2.1077
78	1.3279	1.9622	1.2984	1.9965	1.2687	2.0314	1.2388	2.0668	1.2088	2.1028
79	1.3341	1.9597	1.3050	1.9934	1.2757	2.0277	1.2462	2.0626	1.2166	2.0980
80	1.3402	1.9573	1.3115	1.9905	1.2826	2.0242	1.2535	2.0586	1.2242	2.0934
81	1.3462	1.9549	1.3179	1.9876	1.2893	2.0209	1.2606	2.0547	1.2317	2.0890

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
82	1.3521	1.9527	1.3241	1.9849	1.2959	2.0176	1.2675	2.0509	1.2390	2.0847
83	1.3578	1.9505	1.3302	1.9822	1.3023	2.0144	1.2743	2.0472	1.2461	2.0805
84	1.3634	1.9484	1.3361	1.9796	1.3086	2.0114	1.2809	2.0437	1.2531	2.0765
85	1.3689	1.9464	1.3419	1.9771	1.3148	2.0085	1.2874	2.0403	1.2599	2.0726
86	1.3743	1.9444	1.3476	1.9747	1.3208	2.0056	1.2938	2.0370	1.2666	2.0688
87	1.3795	1.9425	1.3532	1.9724	1.3267	2.0029	1.3000	2.0338	1.2732	2.0652
88	1.3847	1.9407	1.3587	1.9702	1.3325	2.0002	1.3061	2.0307	1.2796	2.0616
89	1.3897	1.9389	1.3640	1.9680	1.3381	1.9976	1.3121	2.0277	1.2859	2.0582
90	1.3946	1.9372	1.3693	1.9659	1.3437	1.9951	1.3179	2.0247	1.2920	2.0548
91	1.3995	1.9356	1.3744	1.9639	1.3491	1.9927	1.3237	2.0219	1.2980	2.0516
92	1.4042	1.9340	1.3794	1.9619	1.3544	1.9903	1.3293	2.0192	1.3039	2.0485
93	1.4089	1.9325	1.3844	1.9600	1.3597	1.9881	1.3348	2.0165	1.3097	2.0454
94	1.4135	1.9310	1.3892	1.9582	1.3648	1.9859	1.3402	2.0139	1.3154	2.0424
95	1.4179	1.9295	1.3940	1.9564	1.3698	1.9837	1.3455	2.0114	1.3210	2.0396
96	1.4223	1.9282	1.3986	1.9547	1.3747	1.9816	1.3507	2.0090	1.3264	2.0368
97	1.4266	1.9268	1.4032	1.9530	1.3796	1.9796	1.3557	2.0067	1.3318	2.0341
98	1.4309	1.9255	1.4077	1.9514	1.3843	1.9777	1.3607	2.0044	1.3370	2.0314
99	1.4350	1.9243	1.4121	1.9498	1.3889	1.9758	1.3656	2.0021	1.3422	2.0289
100	1.4391	1.9231	1.4164	1.9483	1.3935	1.9739	1.3705	2.0000	1.3472	2.0264
101	1.4431	1.9219	1.4206	1.9468	1.3980	1.9722	1.3752	1.9979	1.3522	2.0239
102	1.4470	1.9207	1.4248	1.9454	1.4024	1.9704	1.3798	1.9958	1.3571	2.0216
103	1.4509	1.9196	1.4289	1.9440	1.4067	1.9687	1.3844	1.9938	1.3619	2.0193
104	1.4547	1.9186	1.4329	1.9426	1.4110	1.9671	1.3889	1.9919	1.3666	2.0171
105	1.4584	1.9175	1.4369	1.9413	1.4151	1.9655	1.3933	1.9900	1.3712	2.0149
106	1.4621	1.9165	1.4408	1.9401	1.4192	1.9640	1.3976	1.9882	1.3758	2.0128
107	1.4657	1.9155	1.4446	1.9388	1.4233	1.9624	1.4018	1.9864	1.3802	2.0107
108	1.4693	1.9146	1.4483	1.9376	1.4272	1.9610	1.4060	1.9847	1.3846	2.0087
109	1.4727	1.9137	1.4520	1.9364	1.4311	1.9595	1.4101	1.9830	1.3889	2.0067
110	1.4762	1.9128	1.4556	1.9353	1.4350	1.9582	1.4141	1.9813	1.3932	2.0048
111	1.4795	1.9119	1.4592	1.9342	1.4387	1.9568	1.4181	1.9797	1.3973	2.0030
112	1.4829	1.9111	1.4627	1.9331	1.4424	1.9555	1.4220	1.9782	1.4014	2.0011
113	1.4861	1.9103	1.4662	1.9321	1.4461	1.9542	1.4258	1.9766	1.4055	1.9994
114	1.4893	1.9095	1.4696	1.9311	1.4497	1.9530	1.4296	1.9752	1.4094	1.9977
115	1.4925	1.9087	1.4729	1.9301	1.4532	1.9518	1.4333	1.9737	1.4133	1.9960
116	1.4956	1.9080	1.4762	1.9291	1.4567	1.9506	1.4370	1.9723	1.4172	1.9943
117	1.4987	1.9073	1.4795	1.9282	1.4601	1.9494	1.4406	1.9709	1.4209	1.9927
118	1.5017	1.9066	1.4827	1.9273	1.4635	1.9483	1.4441	1.9696	1.4247	1.9912
119	1.5047	1.9059	1.4858	1.9264	1.4668	1.9472	1.4476	1.9683	1.4283	1.9896
120	1.5076	1.9053	1.4889	1.9256	1.4700	1.9461	1.4511	1.9670	1.4319	1.9881
121	1.5105	1.9046	1.4919	1.9247	1.4733	1.9451	1.4544	1.9658	1.4355	1.9867
122	1.5133	1.9040	1.4950	1.9239	1.4764	1.9441	1.4578	1.9646	1.4390	1.9853
123	1.5161	1.9034	1.4979	1.9231	1.4795	1.9431	1.4611	1.9634	1.4424	1.9839
124	1.5189	1.9028	1.5008	1.9223	1.4826	1.9422	1.4643	1.9622	1.4458	1.9825
125	1.5216	1.9023	1.5037	1.9216	1.4857	1.9412	1.4675	1.9611	1.4492	1.9812
126	1.5243	1.9017	1.5065	1.9209	1.4886	1.9403	1.4706	1.9600	1.4525	1.9799
127	1.5269	1.9012	1.5093	1.9202	1.4916	1.9394	1.4737	1.9589	1.4557	1.9786
128	1.5295	1.9006	1.5121	1.9195	1.4945	1.9385	1.4768	1.9578	1.4589	1.9774
129	1.5321	1.9001	1.5148	1.9188	1.4973	1.9377	1.4798	1.9568	1.4621	1.9762
130	1.5346	1.8997	1.5175	1.9181	1.5002	1.9369	1.4827	1.9558	1.4652	1.9750
131	1.5371	1.8992	1.5201	1.9175	1.5029	1.9360	1.4856	1.9548	1.4682	1.9738
132	1.5396	1.8987	1.5227	1.9169	1.5057	1.9353	1.4885	1.9539	1.4713	1.9727
133	1.5420	1.8983	1.5253	1.9163	1.5084	1.9345	1.4914	1.9529	1.4742	1.9716
134	1.5444	1.8978	1.5278	1.9157	1.5110	1.9337	1.4942	1.9520	1.4772	1.9705
135	1.5468	1.8974	1.5303	1.9151	1.5137	1.9330	1.4969	1.9511	1.4801	1.9695
136	1.5491	1.8970	1.5328	1.9145	1.5163	1.9323	1.4997	1.9502	1.4829	1.9684
137	1.5514	1.8966	1.5352	1.9140	1.5188	1.9316	1.5024	1.9494	1.4858	1.9674
138	1.5537	1.8962	1.5376	1.9134	1.5213	1.9309	1.5050	1.9486	1.4885	1.9664
139	1.5559	1.8958	1.5400	1.9129	1.5238	1.9302	1.5076	1.9477	1.4913	1.9655
140	1.5582	1.8955	1.5423	1.9124	1.5263	1.9296	1.5102	1.9469	1.4940	1.9645
141	1.5603	1.8951	1.5446	1.9119	1.5287	1.9289	1.5128	1.9461	1.4967	1.9636
142	1.5625	1.8947	1.5469	1.9114	1.5311	1.9283	1.5153	1.9454	1.4993	1.9627
143	1.5646	1.8944	1.5491	1.9110	1.5335	1.9277	1.5178	1.9446	1.5019	1.9618
144	1.5667	1.8941	1.5513	1.9105	1.5358	1.9271	1.5202	1.9439	1.5045	1.9609
145	1.5688	1.8938	1.5535	1.9100	1.5381	1.9265	1.5226	1.9432	1.5070	1.9600
146	1.5709	1.8935	1.5557	1.9096	1.5404	1.9259	1.5250	1.9425	1.5095	1.9592
147	1.5729	1.8932	1.5578	1.9092	1.5427	1.9254	1.5274	1.9418	1.5120	1.9584

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
148	1.5749	1.8929	1.5600	1.9088	1.5449	1.9248	1.5297	1.9411	1.5144	1.9576
149	1.5769	1.8926	1.5620	1.9083	1.5471	1.9243	1.5320	1.9404	1.5169	1.9568
150	1.5788	1.8923	1.5641	1.9080	1.5493	1.9238	1.5343	1.9398	1.5193	1.9560
151	1.5808	1.8920	1.5661	1.9076	1.5514	1.9233	1.5365	1.9392	1.5216	1.9552
152	1.5827	1.8918	1.5682	1.9072	1.5535	1.9228	1.5388	1.9386	1.5239	1.9545
153	1.5846	1.8915	1.5701	1.9068	1.5556	1.9223	1.5410	1.9379	1.5262	1.9538
154	1.5864	1.8913	1.5721	1.9065	1.5577	1.9218	1.5431	1.9374	1.5285	1.9531
155	1.5883	1.8910	1.5740	1.9061	1.5597	1.9214	1.5453	1.9368	1.5307	1.9524
156	1.5901	1.8908	1.5760	1.9058	1.5617	1.9209	1.5474	1.9362	1.5330	1.9517
157	1.5919	1.8906	1.5779	1.9054	1.5637	1.9205	1.5495	1.9356	1.5352	1.9510
158	1.5937	1.8904	1.5797	1.9051	1.5657	1.9200	1.5516	1.9351	1.5373	1.9503
159	1.5954	1.8902	1.5816	1.9048	1.5676	1.9196	1.5536	1.9346	1.5395	1.9497
160	1.5972	1.8899	1.5834	1.9045	1.5696	1.9192	1.5556	1.9340	1.5416	1.9490
161	1.5989	1.8897	1.5852	1.9042	1.5715	1.9188	1.5576	1.9335	1.5437	1.9484
162	1.6006	1.8896	1.5870	1.9039	1.5734	1.9184	1.5596	1.9330	1.5457	1.9478
163	1.6023	1.8894	1.5888	1.9036	1.5752	1.9180	1.5616	1.9325	1.5478	1.9472
164	1.6040	1.8892	1.5906	1.9033	1.5771	1.9176	1.5635	1.9320	1.5498	1.9466
165	1.6056	1.8890	1.5923	1.9030	1.5789	1.9172	1.5654	1.9316	1.5518	1.9460
166	1.6072	1.8888	1.5940	1.9028	1.5807	1.9169	1.5673	1.9311	1.5538	1.9455
167	1.6089	1.8887	1.5957	1.9025	1.5825	1.9165	1.5692	1.9306	1.5557	1.9449
168	1.6105	1.8885	1.5974	1.9023	1.5842	1.9161	1.5710	1.9302	1.5577	1.9444
169	1.6120	1.8884	1.5991	1.9020	1.5860	1.9158	1.5728	1.9298	1.5596	1.9438
170	1.6136	1.8882	1.6007	1.9018	1.5877	1.9155	1.5746	1.9293	1.5615	1.9433
171	1.6151	1.8881	1.6023	1.9015	1.5894	1.9151	1.5764	1.9289	1.5634	1.9428
172	1.6167	1.8879	1.6039	1.9013	1.5911	1.9148	1.5782	1.9285	1.5652	1.9423
173	1.6182	1.8878	1.6055	1.9011	1.5928	1.9145	1.5799	1.9281	1.5670	1.9418
174	1.6197	1.8876	1.6071	1.9009	1.5944	1.9142	1.5817	1.9277	1.5688	1.9413
175	1.6212	1.8875	1.6087	1.9006	1.5961	1.9139	1.5834	1.9273	1.5706	1.9408
176	1.6226	1.8874	1.6102	1.9004	1.5977	1.9136	1.5851	1.9269	1.5724	1.9404
177	1.6241	1.8873	1.6117	1.9002	1.5993	1.9133	1.5868	1.9265	1.5742	1.9399
178	1.6255	1.8872	1.6133	1.9000	1.6009	1.9130	1.5884	1.9262	1.5759	1.9394
179	1.6270	1.8870	1.6148	1.8998	1.6025	1.9128	1.5901	1.9258	1.5776	1.9390
180	1.6284	1.8869	1.6162	1.8996	1.6040	1.9125	1.5917	1.9255	1.5793	1.9386
181	1.6298	1.8868	1.6177	1.8995	1.6056	1.9122	1.5933	1.9251	1.5810	1.9381
182	1.6312	1.8867	1.6192	1.8993	1.6071	1.9120	1.5949	1.9248	1.5827	1.9377
183	1.6325	1.8866	1.6206	1.8991	1.6086	1.9117	1.5965	1.9244	1.5844	1.9373
184	1.6339	1.8865	1.6220	1.8989	1.6101	1.9115	1.5981	1.9241	1.5860	1.9369
185	1.6352	1.8864	1.6234	1.8988	1.6116	1.9112	1.5996	1.9238	1.5876	1.9365
186	1.6366	1.8864	1.6248	1.8986	1.6130	1.9110	1.6012	1.9235	1.5892	1.9361
187	1.6379	1.8863	1.6262	1.8984	1.6145	1.9107	1.6027	1.9232	1.5908	1.9357
188	1.6392	1.8862	1.6276	1.8983	1.6159	1.9105	1.6042	1.9228	1.5924	1.9353
189	1.6405	1.8861	1.6289	1.8981	1.6173	1.9103	1.6057	1.9226	1.5939	1.9349
190	1.6418	1.8860	1.6303	1.8980	1.6188	1.9101	1.6071	1.9223	1.5955	1.9346
191	1.6430	1.8860	1.6316	1.8978	1.6202	1.9099	1.6086	1.9220	1.5970	1.9342
192	1.6443	1.8859	1.6329	1.8977	1.6215	1.9096	1.6101	1.9217	1.5985	1.9339
193	1.6455	1.8858	1.6343	1.8976	1.6229	1.9094	1.6115	1.9214	1.6000	1.9335
194	1.6468	1.8858	1.6355	1.8974	1.6243	1.9092	1.6129	1.9211	1.6015	1.9332
195	1.6480	1.8857	1.6368	1.8973	1.6256	1.9090	1.6143	1.9209	1.6030	1.9328
196	1.6492	1.8856	1.6381	1.8972	1.6270	1.9088	1.6157	1.9206	1.6044	1.9325
197	1.6504	1.8856	1.6394	1.8971	1.6283	1.9087	1.6171	1.9204	1.6059	1.9322
198	1.6516	1.8855	1.6406	1.8969	1.6296	1.9085	1.6185	1.9201	1.6073	1.9318
199	1.6528	1.8855	1.6419	1.8968	1.6309	1.9083	1.6198	1.9199	1.6087	1.9315
200	1.6539	1.8854	1.6431	1.8967	1.6322	1.9081	1.6212	1.9196	1.6101	1.9312

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

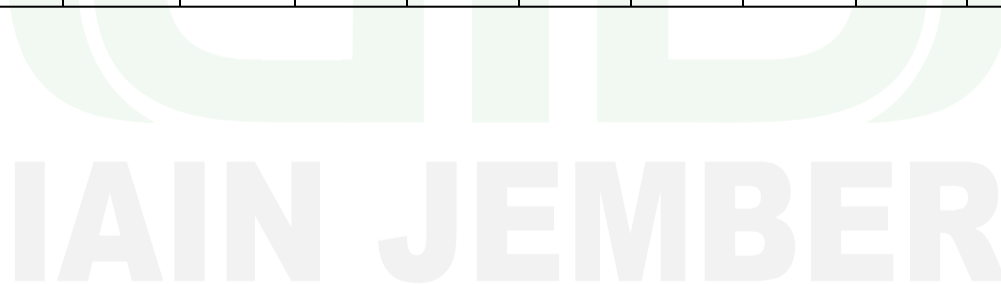
n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
21	0.0575	3.7054								
22	0.0832	3.6188	0.0524	3.7309						
23	0.1103	3.5355	0.0762	3.6501	0.0480	3.7533				
24	0.1407	3.4540	0.1015	3.5717	0.0701	3.6777	0.0441	3.7730		
25	0.1723	3.3760	0.1300	3.4945	0.0937	3.6038	0.0647	3.7022	0.0407	3.7904
26	0.2050	3.3025	0.1598	3.4201	0.1204	3.5307	0.0868	3.6326	0.0598	3.7240
27	0.2382	3.2333	0.1907	3.3494	0.1485	3.4597	0.1119	3.5632	0.0806	3.6583
28	0.2715	3.1681	0.2223	3.2825	0.1779	3.3919	0.1384	3.4955	0.1042	3.5925
29	0.3046	3.1070	0.2541	3.2192	0.2079	3.3273	0.1663	3.4304	0.1293	3.5279
30	0.3374	3.0497	0.2859	3.1595	0.2383	3.2658	0.1949	3.3681	0.1557	3.4655
31	0.3697	2.9960	0.3175	3.1032	0.2688	3.2076	0.2239	3.3086	0.1830	3.4055
32	0.4013	2.9458	0.3487	3.0503	0.2992	3.1525	0.2532	3.2519	0.2108	3.3478
33	0.4322	2.8987	0.3793	3.0005	0.3294	3.1005	0.2825	3.1981	0.2389	3.2928
34	0.4623	2.8545	0.4094	2.9536	0.3591	3.0513	0.3116	3.1470	0.2670	3.2402
35	0.4916	2.8131	0.4388	2.9095	0.3883	3.0048	0.3403	3.0985	0.2951	3.1901
36	0.5201	2.7742	0.4675	2.8680	0.4169	2.9610	0.3687	3.0526	0.3230	3.1425
37	0.5477	2.7377	0.4954	2.8289	0.4449	2.9195	0.3966	3.0091	0.3505	3.0972
38	0.5745	2.7033	0.5225	2.7921	0.4723	2.8804	0.4240	2.9678	0.3777	3.0541
39	0.6004	2.6710	0.5489	2.7573	0.4990	2.8434	0.4507	2.9288	0.4044	3.0132
40	0.6256	2.6406	0.5745	2.7246	0.5249	2.8084	0.4769	2.8917	0.4305	2.9743
41	0.6499	2.6119	0.5994	2.6936	0.5502	2.7753	0.5024	2.8566	0.4562	2.9373
42	0.6734	2.5848	0.6235	2.6643	0.5747	2.7439	0.5273	2.8233	0.4812	2.9022
43	0.6962	2.5592	0.6469	2.6366	0.5986	2.7142	0.5515	2.7916	0.5057	2.8688
44	0.7182	2.5351	0.6695	2.6104	0.6218	2.6860	0.5751	2.7616	0.5295	2.8370
45	0.7396	2.5122	0.6915	2.5856	0.6443	2.6593	0.5980	2.7331	0.5528	2.8067
46	0.7602	2.4905	0.7128	2.5621	0.6661	2.6339	0.6203	2.7059	0.5755	2.7779
47	0.7802	2.4700	0.7334	2.5397	0.6873	2.6098	0.6420	2.6801	0.5976	2.7504
48	0.7995	2.4505	0.7534	2.5185	0.7079	2.5869	0.6631	2.6555	0.6191	2.7243
49	0.8182	2.4320	0.7728	2.4983	0.7279	2.5651	0.6836	2.6321	0.6400	2.6993
50	0.8364	2.4144	0.7916	2.4791	0.7472	2.5443	0.7035	2.6098	0.6604	2.6755
51	0.8540	2.3977	0.8098	2.4608	0.7660	2.5245	0.7228	2.5885	0.6802	2.6527
52	0.8710	2.3818	0.8275	2.4434	0.7843	2.5056	0.7416	2.5682	0.6995	2.6310
53	0.8875	2.3666	0.8446	2.4268	0.8020	2.4876	0.7599	2.5487	0.7183	2.6102
54	0.9035	2.3521	0.8612	2.4110	0.8193	2.4704	0.7777	2.5302	0.7365	2.5903
55	0.9190	2.3383	0.8774	2.3959	0.8360	2.4539	0.7949	2.5124	0.7543	2.5713
56	0.9341	2.3252	0.8930	2.3814	0.8522	2.4382	0.8117	2.4955	0.7716	2.5531
57	0.9487	2.3126	0.9083	2.3676	0.8680	2.4232	0.8280	2.4792	0.7884	2.5356
58	0.9629	2.3005	0.9230	2.3544	0.8834	2.4088	0.8439	2.4636	0.8047	2.5189
59	0.9767	2.2890	0.9374	2.3417	0.8983	2.3950	0.8593	2.4487	0.8207	2.5028
60	0.9901	2.2780	0.9514	2.3296	0.9128	2.3817	0.8744	2.4344	0.8362	2.4874
61	1.0031	2.2674	0.9649	2.3180	0.9269	2.3690	0.8890	2.4206	0.8513	2.4726
62	1.0157	2.2573	0.9781	2.3068	0.9406	2.3569	0.9032	2.4074	0.8660	2.4584
63	1.0280	2.2476	0.9910	2.2961	0.9539	2.3452	0.9170	2.3947	0.8803	2.4447
64	1.0400	2.2383	1.0035	2.2858	0.9669	2.3340	0.9305	2.3826	0.8943	2.4316
65	1.0517	2.2293	1.0156	2.2760	0.9796	2.3232	0.9437	2.3708	0.9079	2.4189
66	1.0630	2.2207	1.0274	2.2665	0.9919	2.3128	0.9565	2.3595	0.9211	2.4068
67	1.0740	2.2125	1.0390	2.2574	1.0039	2.3028	0.9689	2.3487	0.9340	2.3950
68	1.0848	2.2045	1.0502	2.2486	1.0156	2.2932	0.9811	2.3382	0.9466	2.3837
69	1.0952	2.1969	1.0612	2.2401	1.0270	2.2839	0.9930	2.3281	0.9589	2.3728
70	1.1054	2.1895	1.0718	2.2320	1.0382	2.2750	1.0045	2.3184	0.9709	2.3623
71	1.1154	2.1824	1.0822	2.2241	1.0490	2.2663	1.0158	2.3090	0.9826	2.3522
72	1.1251	2.1756	1.0924	2.2166	1.0596	2.2580	1.0268	2.3000	0.9940	2.3424
73	1.1346	2.1690	1.1023	2.2093	1.0699	2.2500	1.0375	2.2912	1.0052	2.3329
74	1.1438	2.1626	1.1119	2.2022	1.0800	2.2423	1.0480	2.2828	1.0161	2.3238
75	1.1528	2.1565	1.1214	2.1954	1.0898	2.2348	1.0583	2.2747	1.0267	2.3149
76	1.1616	2.1506	1.1306	2.1888	1.0994	2.2276	1.0683	2.2668	1.0371	2.3064
77	1.1702	2.1449	1.1395	2.1825	1.1088	2.2206	1.0780	2.2591	1.0472	2.2981
78	1.1786	2.1393	1.1483	2.1763	1.1180	2.2138	1.0876	2.2518	1.0571	2.2901
79	1.1868	2.1340	1.1569	2.1704	1.1269	2.2073	1.0969	2.2446	1.0668	2.2824
80	1.1948	2.1288	1.1653	2.1647	1.1357	2.2010	1.1060	2.2377	1.0763	2.2749
81	1.2026	2.1238	1.1735	2.1591	1.1442	2.1949	1.1149	2.2310	1.0856	2.2676
82	1.2103	2.1190	1.1815	2.1537	1.1526	2.1889	1.1236	2.2246	1.0946	2.2606
83	1.2178	2.1143	1.1893	2.1485	1.1608	2.1832	1.1322	2.2183	1.1035	2.2537
84	1.2251	2.1098	1.1970	2.1435	1.1688	2.1776	1.1405	2.2122	1.1122	2.2471
85	1.2323	2.1054	1.2045	2.1386	1.1766	2.1722	1.1487	2.2063	1.1206	2.2407
86	1.2393	2.1011	1.2119	2.1338	1.1843	2.1670	1.1567	2.2005	1.1290	2.2345

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
87	1.2462	2.0970	1.2191	2.1293	1.1918	2.1619	1.1645	2.1950	1.1371	2.2284
88	1.2529	2.0930	1.2261	2.1248	1.1992	2.1570	1.1722	2.1896	1.1451	2.2225
89	1.2595	2.0891	1.2330	2.1205	1.2064	2.1522	1.1797	2.1843	1.1529	2.2168
90	1.2659	2.0853	1.2397	2.1163	1.2134	2.1476	1.1870	2.1793	1.1605	2.2113
91	1.2723	2.0817	1.2464	2.1122	1.2204	2.1431	1.1942	2.1743	1.1680	2.2059
92	1.2785	2.0781	1.2529	2.1082	1.2271	2.1387	1.2013	2.1695	1.1754	2.2007
93	1.2845	2.0747	1.2592	2.1044	1.2338	2.1344	1.2082	2.1648	1.1826	2.1956
94	1.2905	2.0713	1.2654	2.1006	1.2403	2.1303	1.2150	2.1603	1.1897	2.1906
95	1.2963	2.0681	1.2716	2.0970	1.2467	2.1262	1.2217	2.1559	1.1966	2.1858
96	1.3021	2.0649	1.2776	2.0935	1.2529	2.1223	1.2282	2.1515	1.2034	2.1811
97	1.3077	2.0619	1.2834	2.0900	1.2591	2.1185	1.2346	2.1474	1.2100	2.1765
98	1.3132	2.0589	1.2892	2.0867	1.2651	2.1148	1.2409	2.1433	1.2166	2.1721
99	1.3186	2.0560	1.2949	2.0834	1.2710	2.1112	1.2470	2.1393	1.2230	2.1677
100	1.3239	2.0531	1.3004	2.0802	1.2768	2.1077	1.2531	2.1354	1.2293	2.1635
101	1.3291	2.0504	1.3059	2.0772	1.2825	2.1043	1.2590	2.1317	1.2355	2.1594
102	1.3342	2.0477	1.3112	2.0741	1.2881	2.1009	1.2649	2.1280	1.2415	2.1554
103	1.3392	2.0451	1.3165	2.0712	1.2936	2.0977	1.2706	2.1244	1.2475	2.1515
104	1.3442	2.0426	1.3216	2.0684	1.2990	2.0945	1.2762	2.1210	1.2534	2.1477
105	1.3490	2.0401	1.3267	2.0656	1.3043	2.0914	1.2817	2.1175	1.2591	2.1440
106	1.3538	2.0377	1.3317	2.0629	1.3095	2.0884	1.2872	2.1142	1.2648	2.1403
107	1.3585	2.0353	1.3366	2.0602	1.3146	2.0855	1.2925	2.1110	1.2703	2.1368
108	1.3631	2.0330	1.3414	2.0577	1.3196	2.0826	1.2978	2.1078	1.2758	2.1333
109	1.3676	2.0308	1.3461	2.0552	1.3246	2.0798	1.3029	2.1048	1.2811	2.1300
110	1.3720	2.0286	1.3508	2.0527	1.3294	2.0771	1.3080	2.1018	1.2864	2.1267
111	1.3764	2.0265	1.3554	2.0503	1.3342	2.0744	1.3129	2.0988	1.2916	2.1235
112	1.3807	2.0244	1.3599	2.0480	1.3389	2.0718	1.3178	2.0959	1.2967	2.1203
113	1.3849	2.0224	1.3643	2.0457	1.3435	2.0693	1.3227	2.0931	1.3017	2.1173
114	1.3891	2.0204	1.3686	2.0435	1.3481	2.0668	1.3274	2.0904	1.3066	2.1143
115	1.3932	2.0185	1.3729	2.0413	1.3525	2.0644	1.3321	2.0877	1.3115	2.1113
116	1.3972	2.0166	1.3771	2.0392	1.3569	2.0620	1.3366	2.0851	1.3162	2.1085
117	1.4012	2.0148	1.3813	2.0371	1.3613	2.0597	1.3411	2.0826	1.3209	2.1057
118	1.4051	2.0130	1.3854	2.0351	1.3655	2.0575	1.3456	2.0801	1.3256	2.1029
119	1.4089	2.0112	1.3894	2.0331	1.3697	2.0553	1.3500	2.0776	1.3301	2.1002
120	1.4127	2.0095	1.3933	2.0312	1.3739	2.0531	1.3543	2.0752	1.3346	2.0976
121	1.4164	2.0079	1.3972	2.0293	1.3779	2.0510	1.3585	2.0729	1.3390	2.0951
122	1.4201	2.0062	1.4010	2.0275	1.3819	2.0489	1.3627	2.0706	1.3433	2.0926
123	1.4237	2.0046	1.4048	2.0257	1.3858	2.0469	1.3668	2.0684	1.3476	2.0901
124	1.4272	2.0031	1.4085	2.0239	1.3897	2.0449	1.3708	2.0662	1.3518	2.0877
125	1.4307	2.0016	1.4122	2.0222	1.3936	2.0430	1.3748	2.0641	1.3560	2.0854
126	1.4342	2.0001	1.4158	2.0205	1.3973	2.0411	1.3787	2.0620	1.3600	2.0831
127	1.4376	1.9986	1.4194	2.0188	1.4010	2.0393	1.3826	2.0599	1.3641	2.0808
128	1.4409	1.9972	1.4229	2.0172	1.4047	2.0374	1.3864	2.0579	1.3680	2.0786
129	1.4442	1.9958	1.4263	2.0156	1.4083	2.0357	1.3902	2.0559	1.3719	2.0764
130	1.4475	1.9944	1.4297	2.0141	1.4118	2.0339	1.3939	2.0540	1.3758	2.0743
131	1.4507	1.9931	1.4331	2.0126	1.4153	2.0322	1.3975	2.0521	1.3796	2.0722
132	1.4539	1.9918	1.4364	2.0111	1.4188	2.0306	1.4011	2.0503	1.3833	2.0702
133	1.4570	1.9905	1.4397	2.0096	1.4222	2.0289	1.4046	2.0485	1.3870	2.0682
134	1.4601	1.9893	1.4429	2.0082	1.4255	2.0273	1.4081	2.0467	1.3906	2.0662
135	1.4631	1.9880	1.4460	2.0068	1.4289	2.0258	1.4116	2.0450	1.3942	2.0643
136	1.4661	1.9868	1.4492	2.0054	1.4321	2.0243	1.4150	2.0433	1.3978	2.0624
137	1.4691	1.9857	1.4523	2.0041	1.4353	2.0227	1.4183	2.0416	1.4012	2.0606
138	1.4720	1.9845	1.4553	2.0028	1.4385	2.0213	1.4216	2.0399	1.4047	2.0588
139	1.4748	1.9834	1.4583	2.0015	1.4416	2.0198	1.4249	2.0383	1.4081	2.0570
140	1.4777	1.9823	1.4613	2.0002	1.4447	2.0184	1.4281	2.0368	1.4114	2.0553
141	1.4805	1.9812	1.4642	1.9990	1.4478	2.0170	1.4313	2.0352	1.4147	2.0536
142	1.4832	1.9801	1.4671	1.9978	1.4508	2.0156	1.4344	2.0337	1.4180	2.0519
143	1.4860	1.9791	1.4699	1.9966	1.4538	2.0143	1.4375	2.0322	1.4212	2.0503
144	1.4887	1.9781	1.4727	1.9954	1.4567	2.0130	1.4406	2.0307	1.4244	2.0486
145	1.4913	1.9771	1.4755	1.9943	1.4596	2.0117	1.4436	2.0293	1.4275	2.0471
146	1.4939	1.9761	1.4782	1.9932	1.4625	2.0105	1.4466	2.0279	1.4306	2.0455
147	1.4965	1.9751	1.4809	1.9921	1.4653	2.0092	1.4495	2.0265	1.4337	2.0440
148	1.4991	1.9742	1.4836	1.9910	1.4681	2.0080	1.4524	2.0252	1.4367	2.0425
149	1.5016	1.9733	1.4862	1.9900	1.4708	2.0068	1.4553	2.0238	1.4396	2.0410
150	1.5041	1.9724	1.4889	1.9889	1.4735	2.0056	1.4581	2.0225	1.4426	2.0396
151	1.5066	1.9715	1.4914	1.9879	1.4762	2.0045	1.4609	2.0212	1.4455	2.0381
152	1.5090	1.9706	1.4940	1.9869	1.4788	2.0034	1.4636	2.0200	1.4484	2.0367

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
153	1.5114	1.9698	1.4965	1.9859	1.4815	2.0022	1.4664	2.0187	1.4512	2.0354
154	1.5138	1.9689	1.4990	1.9850	1.4841	2.0012	1.4691	2.0175	1.4540	2.0340
155	1.5161	1.9681	1.5014	1.9840	1.4866	2.0001	1.4717	2.0163	1.4567	2.0327
156	1.5184	1.9673	1.5038	1.9831	1.4891	1.9990	1.4743	2.0151	1.4595	2.0314
157	1.5207	1.9665	1.5062	1.9822	1.4916	1.9980	1.4769	2.0140	1.4622	2.0301
158	1.5230	1.9657	1.5086	1.9813	1.4941	1.9970	1.4795	2.0129	1.4648	2.0289
159	1.5252	1.9650	1.5109	1.9804	1.4965	1.9960	1.4820	2.0117	1.4675	2.0276
160	1.5274	1.9642	1.5132	1.9795	1.4989	1.9950	1.4845	2.0106	1.4701	2.0264
161	1.5296	1.9635	1.5155	1.9787	1.5013	1.9941	1.4870	2.0096	1.4726	2.0252
162	1.5318	1.9628	1.5178	1.9779	1.5037	1.9931	1.4894	2.0085	1.4752	2.0241
163	1.5339	1.9621	1.5200	1.9771	1.5060	1.9922	1.4919	2.0075	1.4777	2.0229
164	1.5360	1.9614	1.5222	1.9762	1.5083	1.9913	1.4943	2.0064	1.4802	2.0218
165	1.5381	1.9607	1.5244	1.9755	1.5105	1.9904	1.4966	2.0054	1.4826	2.0206
166	1.5402	1.9600	1.5265	1.9747	1.5128	1.9895	1.4990	2.0045	1.4851	2.0195
167	1.5422	1.9594	1.5287	1.9739	1.5150	1.9886	1.5013	2.0035	1.4875	2.0185
168	1.5443	1.9587	1.5308	1.9732	1.5172	1.9878	1.5036	2.0025	1.4898	2.0174
169	1.5463	1.9581	1.5329	1.9724	1.5194	1.9869	1.5058	2.0016	1.4922	2.0164
170	1.5482	1.9574	1.5349	1.9717	1.5215	1.9861	1.5080	2.0007	1.4945	2.0153
171	1.5502	1.9568	1.5370	1.9710	1.5236	1.9853	1.5102	1.9997	1.4968	2.0143
172	1.5521	1.9562	1.5390	1.9703	1.5257	1.9845	1.5124	1.9988	1.4991	2.0133
173	1.5540	1.9556	1.5410	1.9696	1.5278	1.9837	1.5146	1.9980	1.5013	2.0123
174	1.5559	1.9551	1.5429	1.9689	1.5299	1.9830	1.5167	1.9971	1.5035	2.0114
175	1.5578	1.9545	1.5449	1.9683	1.5319	1.9822	1.5189	1.9962	1.5057	2.0104
176	1.5597	1.9539	1.5468	1.9676	1.5339	1.9815	1.5209	1.9954	1.5079	2.0095
177	1.5615	1.9534	1.5487	1.9670	1.5359	1.9807	1.5230	1.9946	1.5100	2.0086
178	1.5633	1.9528	1.5506	1.9664	1.5379	1.9800	1.5251	1.9938	1.5122	2.0076
179	1.5651	1.9523	1.5525	1.9657	1.5398	1.9793	1.5271	1.9930	1.5143	2.0068
180	1.5669	1.9518	1.5544	1.9651	1.5418	1.9786	1.5291	1.9922	1.5164	2.0059
181	1.5687	1.9513	1.5562	1.9645	1.5437	1.9779	1.5311	1.9914	1.5184	2.0050
182	1.5704	1.9507	1.5580	1.9639	1.5456	1.9772	1.5330	1.9906	1.5205	2.0042
183	1.5721	1.9503	1.5598	1.9633	1.5474	1.9766	1.5350	1.9899	1.5225	2.0033
184	1.5738	1.9498	1.5616	1.9628	1.5493	1.9759	1.5369	1.9891	1.5245	2.0025
185	1.5755	1.9493	1.5634	1.9622	1.5511	1.9753	1.5388	1.9884	1.5265	2.0017
186	1.5772	1.9488	1.5651	1.9617	1.5529	1.9746	1.5407	1.9877	1.5284	2.0009
187	1.5788	1.9483	1.5668	1.9611	1.5547	1.9740	1.5426	1.9870	1.5304	2.0001
188	1.5805	1.9479	1.5685	1.9606	1.5565	1.9734	1.5444	1.9863	1.5323	1.9993
189	1.5821	1.9474	1.5702	1.9600	1.5583	1.9728	1.5463	1.9856	1.5342	1.9985
190	1.5837	1.9470	1.5719	1.9595	1.5600	1.9722	1.5481	1.9849	1.5361	1.9978
191	1.5853	1.9465	1.5736	1.9590	1.5618	1.9716	1.5499	1.9842	1.5379	1.9970
192	1.5869	1.9461	1.5752	1.9585	1.5635	1.9710	1.5517	1.9836	1.5398	1.9963
193	1.5885	1.9457	1.5768	1.9580	1.5652	1.9704	1.5534	1.9829	1.5416	1.9956
194	1.5900	1.9453	1.5785	1.9575	1.5668	1.9699	1.5551	1.9823	1.5434	1.9948
195	1.5915	1.9449	1.5801	1.9570	1.5685	1.9693	1.5569	1.9817	1.5452	1.9941
196	1.5931	1.9445	1.5816	1.9566	1.5701	1.9688	1.5586	1.9810	1.5470	1.9934
197	1.5946	1.9441	1.5832	1.9561	1.5718	1.9682	1.5603	1.9804	1.5487	1.9928
198	1.5961	1.9437	1.5848	1.9556	1.5734	1.9677	1.5620	1.9798	1.5505	1.9921
199	1.5975	1.9433	1.5863	1.9552	1.5750	1.9672	1.5636	1.9792	1.5522	1.9914
200	1.5990	1.9429	1.5878	1.9547	1.5766	1.9667	1.5653	1.9787	1.5539	1.9908







### Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.025 0.02	0.01 0.010	0.005 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

### Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F  
Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi  
<http://junaidichaniago.wordpress.com>



**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78



**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

## BIODATA PENULIS



1. Nama : Endang Dwi Wahyuni
2. NIM : E20163030
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 22 September 1997
4. Program Studi : Akuntansi Syariah
5. Jurusan : Ekonomi Islam
6. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Alamat : Kelurahan Bence Rt 03 Rw 01 Kecamatan  
Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK AL-Hidayah Tanggung Bence
  - b. MI Darul Huda Tanggung Bence
  - c. MTs NU Garum
  - d. MAN 2 Blitar

IAIN JEMBER

# PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SE-JAWA PERIODE TAHUN 2013-2017

Oleh:

Endang Dwi Wahyuni  
NIM: E20163030

Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos: 68136  
Website: [www.in-jember.ac.id](http://www.in-jember.ac.id) -email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD terdapat pos pendapatan (PAD, dana perimbangan, serta pembiayaan lain yang sah) serta pos pembelanjaan (untuk kebutuhan fasilitas publik dan penyejahteraan masyarakat)

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (2) apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (3) apakah SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa? (4) apakah PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemprov se-Jawa?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD dan SiLPA berpengaruh signifikan atau positif terhadap belanja modal. Variabel PAD nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,707 > t_{tabel}$  2,056. Variabel SiLPA nilai signifikansi  $0,022 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,433 > t_{tabel}$  2,056. Berbeda dengan variabel DAU yang berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap belanja modal karena memiliki nilai signifikansi  $0,057 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,995 < t_{tabel}$  2,056. Sedangkan secara simultan variabel PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung}$   $9,331 > F_{tabel}$  2,98.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah dimulai sejak 1 Januari 2001. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini karena masalah otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak keterkaitan dan melibatkan banyak variabel. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana telah terjadi pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan yang dikaitkan dengan sumber keuangan atau pembiayaan. Sesuai dengan UU No 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau *Intergovernment Fiscal Relation*.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan ketatanegaraan serta tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai gantinya UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 lahir, yang mana merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja daerah dipisahkan menjadi dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan beban untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, berbeda halnya dengan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya sehingga diakui neraca.<sup>2</sup> Manajemen belanja daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah agar optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai. Belanja Daerah yang termasuk belanja modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang

---

<sup>1</sup> Ahad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 9.

<sup>2</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta:Erlangga, 2010), 87.

kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Sementara peningkatan Belanja Modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.<sup>4</sup> Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.<sup>5</sup>

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk

<sup>3</sup> Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali”, (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7 Nomor 3) 2018

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta

<sup>5</sup> I Made Pradana Adiputra dkk, “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Moda Sebagai Variabel Intervening, (Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha)

keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2015-2045, penduduk di Pulau Jawa pada Tahun 2019 mencapai 150,4 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan separuh penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 Juta jiwa.<sup>6</sup> Adapun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, yakni masing-masing 75,23 juta jiwa dan 75,17 juta jiwa. Adapun provinsi di Jawa yang memiliki penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, yakni mencapai 49 juta jiwa. Kemudian diikuti Jawa Timur sebanyak 39,74 juta jiwa, lalu Jawa Tengah 34,55 juta jiwa. Lalu, Banten dengan jumlah penduduk 12,71 juta jiwa, DKI Jakarta 10,5 juta jiwa dan Daerah Istimewa Yogyakarta 3,87 juta jiwa.<sup>7</sup>



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Daerah yang memiliki penduduk yang relatif besar akan memerlukan akses-akses publik dan pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyejahteraan masyarakat yang relatif besar dibanding dengan daerah yang penduduknya kecil. Selain itu,

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019> diakses pada Jumat 4 Oktober 2019

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/>



dari sektor penerimaan yakni PAD, serta pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat juga tentunya berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan pembelanjaan untuk pengadaan fasilitas publik berasal dari anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa lebih Perhitungan Pembiayaan (SiLPA) terhadap Belanja Modal dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013 - 2017”**.

#### HIPOTESIS PENELITIAN:

Hipotesis berasal dari Bahasa Inggris, *hypo* (dibawah) dan *thesa* (kebenaran). Jadi, secara etimologi hipotesis berarti kebenaran yang ada dibawah, kebenaran sementara, atau kebenaran yang masih perlu diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Dalam penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2017”**, maka hipotesisnya sebagai berikut:

1. Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal

Dalam penyusunan APBD, pos alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga pemerintah daerah ingin menambah pos belanja modal dengan tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD sebanyak - banyaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

*H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.*

2. Pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal

Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Kesit Bambang Prakoso, *“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”*(Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Volume 8 No 2, 101-118).

yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi belanja modal salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>9</sup> Oleh karena itu hipotesis DAU terhadap belanja modal:

*H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal*

3. Pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan belanja modal

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hasil Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>10</sup> Sebagai Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal*

4. Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap alokasi belanja modal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Adib Irsyadi (2014:10) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah DAU, PAD, DAK, dan SiLPA.<sup>12</sup> Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: PAD, DAU, SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap alokasi Belanja Modal*

---

<sup>9</sup> Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* (Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.2007)

<sup>10</sup> Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah).* Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>11</sup> Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* (Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.2007)

<sup>12</sup> Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah).* Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## KAJIAN TEORI

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>13</sup>

### 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun, daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.<sup>14</sup> Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalanced kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>15</sup>

### 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun

---

<sup>13</sup> Ahad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 52.

<sup>14</sup> Ibid., 52

<sup>15</sup> Kusnandar Dodik Siswanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", (Jurnal Penelitian UD), 2012

anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.<sup>16</sup>

#### 4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Sedangkan menurut Peraturan dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja

---

<sup>16</sup> Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur.*

yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Lokasi Penelitian di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2013-2017. Data penelitian diunduh dari situs resmi Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu ada 34 provinsi. Untuk pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Karakteristik yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu pulau Jawa yang mana padat penduduknya, dengan periode waktu lima tahun terakhir dalam laporan realisasi anggaran APBD. Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD dari provinsi di pulau Jawa pada tahun 2013-2017. Provinsi di pulau Jawa adalah provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Teknik pengujian data menggunakan Uji Asumsi Klasik dan teknik analisis data yang digunakan yaitu model regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen PAD, DAU dan DAU terhadap variabel dependen Belanja Modal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

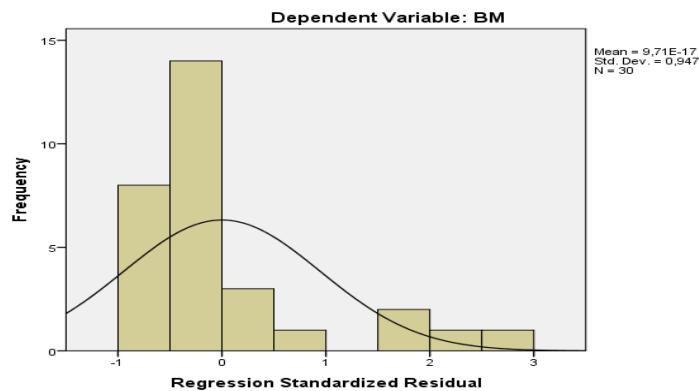
### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data-data dalam variabel pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk menganalisis data yang akan diuji yaitu dengan analisis Grafik.

#### Uji Normalitas

## Histogram



Sumber: Data Diolah

Dari hasil output histogram diatas terlihat bahwa kurva dependents dan *regression standardized residual* membentuk gambar lonceng jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai *tolerance* dapat dilakukan tidak ada gejala multikolonieritas, jika  $VIF < 10$  dan Nilai Tolerance  $> 0,10$ . Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas :

# IAIN JEMBER

### Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,015		
PAD	,012	,839	1,192
DAU	,057	,985	1,015
SiLPA	,022	,847	1,180

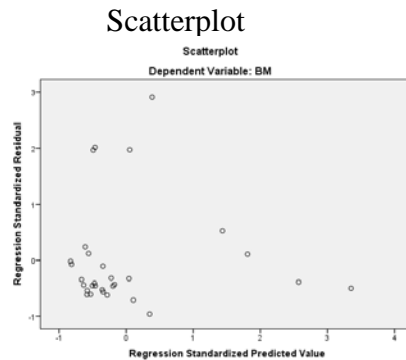
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel PAD (X1) senilai 1,192 nilai *tolerance* sebesar 0,839. Variabel DAU (X2) memiliki VIF sebesar 1,015 dan nilai *tolerance* sebesar 0,985. Sementara variabel SiLPA memiliki VIF sebesar 1,180 dan nilai *tolerance* sebesar 0,847. Semua variabel tersebut nilai VIF kurang dari 10 dengan *tolerance* diatas 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan heteroskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section. Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan menggunakan pola scatterplot.

#### Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah

Analisis output Scatterplot:

Berdasarkan tampilan pada *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *regression studentized residual*. Maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi, akan tetapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai dw dengan d1 dan du sebagai berikut:

- a)  $dU < dw < 4-dU$ , maka  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terjadi autokorelasi.
- b)  $Dw < dL$  atau  $dw > 4-dL$ , maka  $H_a$  ditolak. Artinya terjadi autokorelasi.
- c)  $dL < dw < dL$  atau  $4-du < dw < 4-dL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang terjadi.



Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727	1,718

#### Analisis Model Summary:

Berdasarkan pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,718. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan dU, dengan  $n$  = jumlah sampel,  $K$  = jumlah variabel. Pada penelitian ini nilai  $n = 30$ ,  $K = 4$ , maka diperoleh nilai  $dL = 1,426$  dan  $dU = 1,7386$ . Kesimpulannya,  $dw (1,718) < dU$  (sebesar 1,7386)  $< 4-dU$  ( $4-1,7386 = 2,2614$ ). Jadi, dalam model persamaan regresi ini bisa tidak mengandung masalah autokorelasi.

#### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal. Berikut hasil uji analisis regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
	PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
	DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
	SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

Sumber : data yang diolah

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa persamaan

model regresi berganda adalah :

$$\text{BM} = 3393461568,629 + 0,170 \text{ PAD} - 1,254 \text{ DAU} \\ + 1189,565 \text{ SiLPA} + e$$

- a. Konstanta ( $\alpha$ ) = 3393461568,629

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar 3393461568,629, yang menunjukkan bahwa apabila variabel PAD, DAU, dan SiLPA bernilai nol (sama dengan nol), maka Belanja Modal sebesar 3393461568,629.

- b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,170

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal adalah positif. Jika PAD dinaikan satu satuan PAD maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Modal sebesar 0,170. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PAD dan Belanja Modal.

- c. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) = - 1,254

Pengaruh DAU terhadap belanja Modal adalah negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara kedua Variabel. Jika DAU dinaikan satu satuan DAU maka akan terjadi penurunan pada Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 1,254. Koefisien yang mempunyai nilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara pengungkapan DAU dan belanja Modal.

- d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)= 1189,565

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal adalah positif. Jika SiLPA dinaikan satu satuan SiLPA maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Modal sebesar 1189,565. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara SiLPA dan Belanja Modal.

- e. Standar Error (e)

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas  $< 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas  $> 0,05$  atau  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

#### Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3393461568,629	1304449858,775		2,601	,015
PAD	,170	,063	,402	2,707	,012
DAU	-1,254	,629	-,273	-1,995	,057
SiLPA	1189,565	488,941	,360	2,433	,022

Sumber : data yang diolah

Analisis Uji t:

(1) Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

$H_1$  : terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t$

hitung sebesar  $2,707 > 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan PAD ( $X_1$ ) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

- (2) Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

$H_2$  : terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,057 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $-1,995 < 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Artinya, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

- (3) Pengaruh SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

$H_3$  : terdapat pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel SiLPA ( $X_3$ ) adalah sebesar  $0,022 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,433 > 2,056$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan SiLPA ( $X_3$ ) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

- b. Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F \text{ hitung} > F$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan  $F \text{ hitung} < F$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut:

Uji F (Simultan)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	285131972649504370000,000	3	95043990883168120000,000	9,331	,000 <sup>b</sup>
	Residual	264842771041255000000,000	26	10186260424663654000,000		
	Total	549974743690759400000,000	29			

Sumber: Data diolah

Dengan hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa secara simultan.

$H_4$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa secara simultan.

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F \text{ hitung} 9,331 > F \text{ tabel} 2,98$ , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis

diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2017 secara simultan.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,463	3191592145,727

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,463, yang memiliki arti bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja modal sebesar 46,3 %. Sedangkan untuk sisanya sebesar 53,7 % dijelaskan oleh variabel lain.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi Fiskal Terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa Periode 2013-2017, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar

$2,707 > t_{\text{tabel}} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara PAD terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.

2. Untuk pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,057 > 0,05$  dan nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar  $1,995 < t_{\text{tabel}} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan DAU terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa dinyatakan ditolak.
3. Untuk pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap alokasi belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  dan nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar  $2,433 > t_{\text{tabel}} 2,056$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Jawa periode 2013-2017.
4. Berdasarkan hasil pengujian simultan dapat disimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $9,331 > F \text{ tabel } 2,98$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh Desentralisasi Fiskal (PAD, DAU, dan SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- D.S. Priyarsono. 2011: *Dari Pertanian Ke Industri: Analisis Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Regional*, Bogor: IPB Press
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Desak Made M. dan Dewa Gede W, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Dengan Pendapatann Perkapita Sebagai Pemoderasi*”, (E-Jurnal Univeresitas Udayana Bali). 2018

Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.

Hariato, D. & Adi, P.H. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019> diakses pada Jumat 4 Oktober 2019

<https://jabar.bps.go.id> diakses pada Minggu, 17 Oktober 2019

<https://jabarprov.go.id/> diakses pada Jumat,8 November 2019

<https://jatengprov.go.id/> diakses pada Minggu, 17 Oktober 2019

<https://jatim.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 9 November 2019

<https://jogjaprov.go.id/> diakses pada Sabtu 16 November 2019

<https://www.bantenprov.go.id/> diakses pada Minggu, 10 November 2019

<https://www.jatimprov.go.id/> diakses pada sabtu, 9 November 2019

<https://yogyakarta.bps.go.id/> diakses pada Sabtu, 16 November 2019

I Made Pradana Adiputra dkk, “*Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Moda Sebagai Variabel Intervening*, (*Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha*)

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Pembangunan Edisi Kelima*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Kusnandar Dodik Siswantoro, “*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan*



*Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”, (Jurnal Penelitian UI), 2012

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan*. Jember: STAIN-Press Jember

Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, “Fiscal Decentralization and Economic Growth: Role of Democratic Institutions”, *Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) Working Papers*, Vol. 89, 2013, hlm.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia,

Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah

PP Nomor 24 Tahun 2005

PP Nomor 71 Tahun 2010

Putri Retno Aryani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017

Ridwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Santika Adi Karyadi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

[Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik](#) diakses pada Sabtu, 9 November 2019

Shah Nawaz Malik, Mahmood-Ul-Hassan dan Shahzad Hussain, “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan”, *The Pakistan Development Review*, 45:4, 2006, hlm. 845

Sheila Ardhian Nuarisa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasi Belanja Modal”, (*Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*), 2013

Sjahrijal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press

[Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017](#)". Diakses Pada Sabtu, 9 November 2019

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta

Sukarna, Wiranta. 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Suliyanto. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset

Syahrir, Ika dkk. 2013. *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestinambungan Pembangunan Cetakan Kedua*. Solo: Era Adicitra Intermedia

Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Jakarta.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia

Yani,Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* . Jakarta:Raja Grafindo Persada

IAIN JEMBER